

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
*THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2022 dan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen/
*Financial Statements as of December 31, 2022 and
For The Year Then Ended
With Independent Auditor's Report*

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/Page</u>	
Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal	1	<i>The Secretary General Statement</i>
Laporan Auditor Independen	1 – 4	<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	1	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Realisasi Anggaran	2	<i>Statement Of Budget Realization</i>
Laporan Operasional	3	<i>Statement Of Operation</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement Of Change in Equity</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 105	<i>Notes To The Financial Statements</i>



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
THE SECRETARY-GENERAL STATEMENT

TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022

THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahtiar Arif
Alamat kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

The undersigned:

Name : Bahtiar Arif
Office Address : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Job Title : Secretary General
of The Audit Board of
The Republic of Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statement of The Audit Board of The Republic of Indonesia;*
2. *Financial Statement of The Audit Board of The Republic of Indonesia have been prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.*
3. a. *All information have been fully and correctly disclosed in financial statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia.*
b. *The Financial Statements of The Audit Board of The Republic of Indonesia do not contain misleading information or material facts, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *We are responsible for The Audit Board of The Republic of Indonesia compliance to the regulations and internal control.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Jakarta,

14 April 2023/April 14, 2023



Bahtiar Arif

Sekretaris Jenderal / Secretary General
NIP 197005051990031001

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Kepada Yang Terhormat:

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI,
dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI**

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

To The Honorable:

**Chairman of The House of Representatives of
The Republic of Indonesia, and
Chairman of The Audit Board of
The Republic of Indonesia**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2022, serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPK RI tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BPK RI berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI"), which comprise the balance sheet as of December 31, 2022, and the statement of budget realization, statement of operation, and statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, financial position of the BPK RI as at December 31, 2022, and its financial performance for the year then ended in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the BPK RI in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BPK RI dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BPK RI atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BPK RI.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BPK RI.

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (Continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the BPK RI's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the BPK RI or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the BPK RI's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the BPK RI's internal control.*

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BPK RI untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BPK RI tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 32.e atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan operasi BPK RI telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19 yang dimulai di Cina di awal tahun 2020 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia yang dimulai di bulan Maret 2020. Efek virus Covid-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk efek terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis.

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the BPK RI's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the BPK RI to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Emphasis of Matter

We bring attention to Note 32.e of the accompanying financial report which explains that BPK RI's operations have been and may continue to be affected by the spread of the Covid-19 virus which began in China in early 2020 and then spread to other countries including Indonesia beginning in the month of March 2020. The effects of the Covid-19 virus on the global economy and Indonesia include effects on economic growth, a decline in the capital market, increased credit risk, depreciation of foreign exchange rates and disruption of business operations.

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

No. 00013/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**Reports on Other Legal and Regulatory Requirement**

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 00014/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan No. 00015/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023 tanggal 14 April 2023.

Compliance with Laws and Regulations and the Internal Control we submitted in separate reports to the management with our report No. 00014/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023 dated April 14, 2023 and No. 00015/2.1229/AU.5/11/1735-2/1/IV/2023 dated April 14, 2023.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN**


R. Dwi Kartono Soewito, SE Ak, CPA, CA
Nomor Register Akuntan Publik: AP.1735 /
Public Accountant Registration Number: AP.1735



**Jakarta, 14 April 2023/
Jakarta, April 14, 2023**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31		
		2022	2021	
ASET				ASSETS
Aset Lancar	5.5.a			Current Assets
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.a.1, 9	450	-	Cash in the Spending Treasurer
Kas Lainnya dan Setara Kas	5.5.a.1, 10	1,639,518,243	1,546,135,900	Other Cash and Cash Equivalent
Belanja Dibayar di Muka	5.5.a.2, 11	1,350,294,826	1,731,278,514	Prepaid Expenditure
Piutang Bukan Pajak	5.5.a.3, 12	816,500,054	1,128,536,479	Non-Taxable Receivable
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	5.5.a.4, 13	(146,602,730)	(82,153,211)	Allowance for doubtful-Non-Taxable Receivable
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a.5, 14	72,930,700	72,930,700	Current Portion of Indemnification Claim - net
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	5.5.a, 15	(364,654)	(364,654)	Allowance for doubtful - Current portion Indemnification Claim
Persediaan	5.5.a.6, 16	11,181,323,086	15,230,502,361	Inventories
Jumlah Aset Lancar		14,913,599,975	19,626,866,089	Total Current Assets
Aset Tetap	5.5.b, 5.5.c			Fixed Assets
Tanah	5.5.b, 17.a	6,124,822,220,744	5,954,117,599,963	Land
Peralatan dan Mesin	5.5.b, 17.b	2,295,971,882,697	2,228,452,577,791	Equipment and Machinery
Gedung dan Bangunan	5.5.b, 17.c	2,620,760,438,900	2,586,655,009,353	Building and Properties
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.b, 17.d	396,586,899,423	396,232,320,663	Road, Irrigation, and Transmission Network
Aset Tetap Lainnya	5.5.b, 17.e	20,782,449,355	17,878,342,009	Other Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.b, 17.f	48,800,000	8,560,897,430	Construction in Progress
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.c, 17.g	(2,645,291,544,735)	(2,475,787,576,188)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap		8,813,681,146,384	8,716,109,171,021	Total Fixed Assets
Piutang Jangka Panjang	5.5.d, 18			Long-term Receivables
Tagihan TP/ TGR		3,274,971,321	3,052,875,377	Indemnification Claim
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR		(2,926,290,062)	(2,656,503,072)	Allowance for doubtful - Indemnification Claim
Jumlah Piutang Jangka Panjang		348,681,259	396,372,305	Total Long-term Receivables
Aset Lainnya	5.5.e, 19			Other Assets
Aset Tak Berwujud		205,224,325,682	197,781,459,838	Intangible Assets
Aset Lain-lain		15,965,917,960	13,566,193,478	Other Assets
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		(169,962,317,265)	(151,245,736,576)	Accumulated Depreciation/ Amortization Others asset
Jumlah Aset Lainnya		51,227,926,377	60,101,916,740	Total Other Assets
JUMLAH ASET		8,880,171,353,995	8,796,234,326,155	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN	5.6			LIABILITIES
Kewajiban Jangka Pendek	5.6, 20			Short-term Liabilities
Utang kepada Pihak Ketiga	5.6, 20.a	16,485,408,287	6,932,308,038	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	5.6, 20.b	3,187,000	3,187,000	Debt Overpaid of Income
Pendapatan Diterima di Muka	5.6, 20.c	1,960,178,498	2,172,778,102	Unearned Revenues
Uang Muka dari KPPN	5.6, 20.d	450	-	Down payment from KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6, 20.e	11,621,773	88,594,500	Other Short-term Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18,460,396,008	9,196,867,640	Total Short-term Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		18,460,396,008	9,196,867,640	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas	5.7, 21	8,861,710,957,987	8,787,037,458,515	Equity
JUMLAH EKUITAS		8,861,710,957,987	8,787,037,458,515	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,880,171,353,995	8,796,234,326,155	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
 FOR THE YEARS ENDED
 December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022			2021	
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
PENDAPATAN						REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.1, 7	16,143,752,000	29,362,424,206	181.88	29,180,653,415	Non - Tax Incomes
JUMLAH PENDAPATAN		16,143,752,000	29,362,424,206	181.88	29,180,653,415	TOTAL REVENUES
BELANJA						EXPENDITURES
Belanja Operasional	5.3, 8					Operation Expenditures
Belanja Pegawai	5.3, 8.a	2,482,829,359,000	2,480,883,932,348	99.92	2,092,217,889,692	Employee Expenditures
Belanja Barang	5.3, 8.b	1,389,286,524,000	1,377,641,871,650	99.16	1,404,354,916,271	Goods Expenditures
Jumlah Belanja Operasional		3,872,115,883,000	3,858,525,803,998	99.65	3,496,572,805,963	Total Operation Expenditures
Belanja Modal	5.3, 8.c					Capital Expenditures
Belanja Tanah		443,579,000	443,578,781	100.00	-	Land Expenditures
Belanja Peralatan dan Mesin		108,865,026,000	108,729,164,673	99.88	120,554,508,117	Equipment and Machinery Expenditures
Belanja Gedung dan Bangunan		10,064,370,000	10,029,096,955	99.65	40,997,478,618	Building and Property Expenditures
Belanja Modal lainnya		10,854,645,000	10,850,946,972	99.97	9,590,057,339	Other Capital Expenditures
Jumlah Belanja Modal		130,227,620,000	130,052,787,381	99.87	171,142,044,074	Total Capital Expenditures
JUMLAH BELANJA		4,002,343,503,000	3,988,578,591,379	99.66	3,667,714,850,037	TOTAL EXPENDITURES

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)**

**THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF OPERATIONAL
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2022 and 2021
(Expressed in Rupiah)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31		
		2022	2021	
KEGIATAN OPERASIONAL				OPERATIONAL ACTIVITIES
PENDAPATAN				REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.2, 22	19,969,575,629	13,560,582,868	Non-Tax State Revenues
Jumlah Pendapatan		19,969,575,629	13,560,582,868	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban Pegawai	5.4, 23	2,483,617,650,089	2,090,493,028,350	Employee Expenses
Beban Persediaan	5.4, 24	34,593,418,705	44,234,939,987	Inventory Expenses
Beban Barang dan Jasa	5.4, 25	605,293,255,552	626,557,747,083	Goods and services Expenses
Beban Pemeliharaan	5.4, 26	141,449,599,100	143,564,453,186	Maintenance Expenses
Beban Perjalanan Dinas	5.4, 27	615,760,762,555	578,486,337,191	Official Travel Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4, 28	228,875,074,178	225,122,207,598	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.4, 29	337,097,669	33,131,353	Allowance for doubtful Expenses
Jumlah Beban		4,109,926,857,848	3,708,491,844,748	Total Expenses
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4,089,957,282,219)	(3,694,931,261,880)	Surplus/(Defisit) of Operational Activities
KEGIATAN NON OPERASIONAL				NON OPERATIONAL ACTIVITIES
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	30			Surplus/(Defisit) of Disposal of Noncurrent Assets
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30.a	(4,612,025,379)	2,130,270,387	Surplus/(Defisit) of Other Non-operating Activities
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	30.b	293,806,334	49,194,509	SURPLUS/(DEFISIT) OF NON OPERATIONAL ACTIVITIES
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(4,318,219,045)	2,179,464,896	SURPLUS/(DEFISIT) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS
POS LUAR BIASA				EXTRAORDINARY ITEMS
Pendapatan Luar Biasa		-	-	Extra Ordinary Revenues
Beban Luar Biasa		-	-	Extra Ordinary Expenses
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(4,094,275,501,264)	(3,692,751,796,984)	SURPLUS/(DEFICIT) OF STATEMENT OF OPERATIONS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
 FOR THE YEARS ENDED
 December 31, 2022 and 2021
 (Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
EKUITAS AWAL	5.7, 31.a	8,787,037,458,515	8,811,904,432,913	BEGINNING BALANCE OF EQUITY
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.7, 31.b	(4,094,275,501,264)	(3,692,751,796,984)	SURPLUS/(DEFISIT) SO
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN				ADJUSTMENT VALUE CURRENT YEAR
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN				CUMULATIVE IMPACT OF CHANGES IN POLICY/
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.7, 31.c	170,715,485,876	15,238,973,768	FUNDAMENTAL ERRORS
Koreksi Nilai Persediaan		(14,825,209)	-	Inventory Adjustments
Koreksi Atas Reklasifikasi		-	(3,249,208,135)	Correction Over Reclassification
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	Difference in Revaluation of Fixed Assets
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		170,467,097,807	13,610,745,092	Fixed Asset Non Revaluation Adjustments
Lain-lain		263,213,278	4,877,436,811	Others
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.7, 31.d	3,998,233,514,860	3,652,645,848,818	TRANSACTION BETWEEN ENTITIES
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		74,673,499,472	(24,866,974,398)	SURPLUS/(DEFICIT) OF EQUITY
EKUITAS AKHIR		8,861,710,957,987	8,787,037,458,515	ENDING BALANCE OF EQUITY

1. Umum

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 dan Perppu No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perppu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 Tahun 1965. Dalam amandemen UUD 1945, keberadaan BPK diatur dalam pasal 23E sampai dengan pasal 23G. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. Kedua ketentuan perundangan inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

1. General

a. Establishment

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree NO. 11/OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding The Audit Board were issued.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In the amendments to the 1945 Constitution, the existence of BPK is regulated in Article 23E to Article 23G. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. These two statutory provisions are the basis for the existence of BPK RI at this time.

1. Umum (Lanjutan)

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Secara kelembagaan, BPK RI diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara dengan sembilan orang Anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan Anggota ini terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, dan tujuh orang Anggota.

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2/K/1-XIII.2/4/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Anggota I, Anggota II, Anggota III, Anggota IV, Anggota V, Anggota VI dan Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan, susunan Anggota BPK RI adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 /December 31, 2022

Ketua	:	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.	:	Chairman
Wakil Ketua	:	Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA, CPA, CFrA, QGIA, CGCAE.	:	Vice Chairman
Anggota I	:	Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak., CSFA., Cert DA., CGCAE.	:	Board Member I
Anggota II	:	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA, CFrA.	:	Board Member II
Anggota III	:	Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA., CGCAE.	:	Board Member III
Anggota IV	:	Haerul Saleh, SH, CRA. CRP, CIABV.	:	Board Member IV
Anggota V	:	Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.	:	Board Member V
Anggota VI	:	Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA, CSFA.	:	Board Member VI
Anggota VII	:	Dr. Hendra Susanto, ST, M. Eng., M.H., CFrA, CSFA, CIAE, CGCAE, CertDA.	:	Board Member VII

31 Desember 2021 /December 31, 2021

Ketua	:	Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.	:	Chairman
Wakil Ketua	:	Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA, CFrA., QGIA.	:	Vice Chairman
Anggota I	:	Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H, CFrA., CSFA.	:	Board Member I
Anggota II	:	Dr. Pius Lustrilanang S.IP, M.Si, CFrA., CSFA.	:	Board Member II
Anggota III	:	Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.	:	Board Member III
Anggota IV	:	Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.	:	Board Member IV
Anggota V	:	Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA, CFrA. *)	:	Board Member V
Anggota VI	:	Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.	:	Board Member VI
Anggota VII	:	Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.	:	Board Member VII

*) Pada tanggal 18 Desember 2021 telah wafat Anggota V BPK, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

*) On December 18, 2021 has passed away, the Board Member V BPK, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.

c. Tempat Kedudukan BPK RI

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Badan Diklat PKN, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, 1 (satu) Auditorat Utama Investigasi dan 5 (lima) Staf Ahli.

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

1. General (Continued)

b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI

Institutionally, the BPK RI is regulated based on Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency. The BPK RI is a state institution with nine members whose membership is formalized by a Presidential Decree. The Nine Members consist of a Chair who is also a Member, a Deputy Chair who is also a Member, and seven Members.

Based on the Audit Board of the Republic of Indonesia Decree Number 2/K/1-XIII.2/4/2022 dated April 19, 2022 regarding the appointment of the Chairman, Vice Chairman, Board Member I, Board Member II, Board Member III, Board Member IV, Board Member V, Board Member VI and Board Member VII of the Audit Board, the composition of the board members of BPK RI are as follows:

c. BPK RI Domicile

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are 1 (one) General Secretariat, 1 (one) PKN Training Center, 1 (one) Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditorates of State Finance, 1 (one) Principal Auditorate of Investigation and 5 (five) Expert Staffs.

BPK RI Headquarter is located at Jalan Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

1. Umum (Lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (Lanjutan)

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Badan Diklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No. 2, Entrop, Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Mulawarman No.98, Tarakan.

1. General (Continued)

c. BPK RI Domicile (Continued)

- *Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.*
- *PKN BPK RI Training Center, Jl. Binawarga II, South Jakarta.*
- *BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, South Jakarta.*
- *BPK RI Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.*
- *BPK RI Representative Office in West Java, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.*
- *BPK RI Representative Office in Central Java, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.*
- *BPK RI Representative Office in Special Region of Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.*
- *BPK RI Representative Office in East Java, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.*
- *BPK RI Representative Office in Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.*
- *BPK RI Representative Office in North Sumatera, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.*
- *BPK RI Representative Office in West Sumatera, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.*
- *BPK RI Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.*
- *BPK RI Representative Office in Riau Islands, Jl. Kartini I No. 29 - 30 Sekupang, Batam.*
- *BPK RI Representative Office in Bangka Belitung Islands, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.*
- *BPK RI Representative Office in Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.*
- *BPK RI Representative Office in Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.*
- *BPK RI Representative Office in South Sumatera, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.*
- *BPK RI Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.*
- *BPK RI Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.*
- *BPK RI Representative Office in West Nusa Tenggara, Jl. Udayana No. 22, Mataram.*
- *BPK RI Representative Office in East Nusa Tenggara, Jl. Amabi No. 120, Kupang.*
- *BPK RI Representative Office in Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.*
- *BPK RI Representative Office in North Maluku, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.*
- *BPK RI Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No. 2, Entrop, Jayapura.*
- *BPK RI Representative Office in West Papua, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- *BPK RI Representative Office in North Kalimantan, Jl. Mulawarman No.98, Tarakan.*

1. Umum (Lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK RI (Lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- Balai Diklat PKN Medan, Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.
- Balai Diklat PKN Yogyakarta, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta
- Balai Diklat PKN Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata-Gowa.
- Balai Diklat PKN Bali, Jl. Permata Pering, Gianyar, Bali.
- Museum BPK RI, Jl. P. Diponegoro No. 1 Magelang.

d. Dasar Hukum

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPK RI adalah:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

1. General (Continued)

c. BPK RI Domicile (Continued)

- *BPK RI Representative Office in West Kalimantan, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- *BPK RI Representative Office in Central Kalimantan, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- *BPK RI Representative Office in East Kalimantan, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- *BPK RI Representative Office in South Kalimantan, Jl. A. Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- *BPK RI Representative Office in North Sulawesi, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.*
- *BPK RI Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.*
- *BPK RI Representative Office in Central Sulawesi, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.*
- *BPK RI Representative Office in West Sulawesi, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.*
- *BPK RI Representative Office in Southeast Sulawesi, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.*
- *BPK RI Representative Office in South Sulawesi, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- *PKN Medan Training Center, Jl. Jamin Ginting Km. 10,5 Simpang Selayang, Medan.*
- *PKN Yogyakarta Training Center, Jl. HOS. Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta*
- *PKN Gowa Training Center, Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata-Gowa.*
- *PKN Bali Training Center, Jl. Permata Pering, Gianyar, Bali.*
- *BPK RI Museum, Jl. P. Diponegoro No. 1 Magelang.*

d. Legal Basis

Laws and regulations serving as the legal basis of BPK RI Financial Statement are as follows:

- *Law No. 17 Year 2003 regarding State Finance.*
- *Law No. 1 Year 2004 regarding State Treasury.*
- *Law No. 15 Year 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.*
- *Law No. 6 Year 2021 regarding the State Budget for Budget Year 2022.*
- *Law Number 2 Year 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 Year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Becomes Law.*
- *Government Regulation No. 8 Year 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.*
- *Government Regulation No. 71 Year 2010 regarding Government Accounting Standard.*
- *Law No. 27 Year 2014 regarding regarding Management of State/Regional Property.*
- *Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.05/2011 on general guidelines for the Government Accounting System.*

1. Umum (Lanjutan)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

1. General (Continued)

d. Legal Basis (Continued)

- *Minister of Finance Regulation Number 214/PMK.05/2013 regarding Standard Chart of Accounts.*
- *Minister of Finance Regulation Number 251/PMK.06/2015 regarding Procedures for Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Regulation Number 181/PMK.06/2016 concerning Administration of State Property.*
- *Minister of Finance Regulation Number 65/PMK.06/2017 concerning Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Regulation Number 207/PMK.06/2019 concerning Amendments to Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.06/2014 concerning Determination of the Quality of Receivables and the Establishment of Allowance for Uncollectibles at State Ministries/Agencies and State General Treasurer.*
- *Minister of Finance Regulation Number 212/PMK.05/2019 regarding Government Accounting Journal on Central Government.*
- *Minister of Finance Regulation Number 163/PMK.06/2020 regarding Management of State Receivables at State Ministries/Institutions, State General Treasurer and Simple Management by the State Receivable Affairs Committee.*
- *Minister of Finance Regulation Number 150/PMK.06/2022 regarding Amendments of Minister of Finance Regulation Number 163/PMK.06/2020 regarding Management of State Receivables at State Ministries/Institutions, State General Treasurer and Simple Management by the State Receivable Affairs Committee.*
- *Minister of Finance Regulation Number 171/PMK.05/2021 concerning Implementation of the SAKTI System*
- *Minister of Finance Regulation Number 217/PMK.05/2022 concerning the Central Government Financial Accounting and Reporting System*
- *Minister of Finance Regulation Number 231/PMK.05/2022 concerning Central Government Accounting Policies*
- *Minister of Finance Regulation of Finance Number 232/PMK.05/2022 concerning Accounting Systems and Institutional Financial Reporting*
- *Minister of Finance Decree Number 53/KM.6/2012 concerning Implementation of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree Number 04/KM.6/2013 concerning Amendment to Decree of the Minister of Finance Number 53/KM.6/2012 concerning Application of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree Number 94/KM.6/2013 concerning the Module for Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities.*

1. Umum (Lanjutan)

d. Dasar Hukum (Lanjutan)

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 81/KMK.06/2018 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 240/KMK.06/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (Unaudited).

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Rencana strategis (Renstra) BPK Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi
 "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".
2. Misi
 - a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
 - b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.

1. General (Continued)

d. Legal Basis (Continued)

- *Minister of Finance Decree Number 145/KM.6/2014 concerning Amendments to Decree of the Minister of Finance Number 94/KM.6/2013 concerning the Depreciation Module for State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree No. 620/KMK.06/2015 concerning Useful Lifespan in the framework of Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree No. 81/KMK.06/2018 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Finance No. 620/KMK.06/2015 concerning Useful Periods in the Context of Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree No. 240/KMK.06/2022 concerning the Second Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 620/KMK.06/2015 concerning Useful Periods in the Context of Amortization of State Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Decree No. 295/KMK.06/2019 concerning Tables of Useful Periods in the Context of Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.*
- *Director General of Treasury Regulation Number PER-42/PB/2014 concerning Guidelines for Preparing Financial Statements of State Ministries/Institutions.*
- *Director General of Treasury Decree Number KEP-331/PB/2021 concerning Codification of Account Segments in the Standard Chart of Accounts.*
- *Director General of Treasury Decree Number: KEP-291/PB/2022 concerning Updating the Account Segment Codification in the Standard Chart of Accounts.*
- *Director General of Treasury Letter Number S-54/PB/PB.6/2022 dated 29 December 2022 concerning Schedule for Reconciliation, Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Institutions (LKKL) Year 2022 (Unaudited).*

e. Strategic Plan Year 2020 - 2024

The strategic plan of BPK 2020 - 2024 are as follows:

1. *Vision*
"Becoming a Trusted Auditing Agency that Plays an Active Role in Realizing Quality and Beneficial State Financial Governance to Achieving State Goals".
2. *Mission*
 - a. *Examine the governance and responsibilities of state finances to provide recommendations, opinions, and considerations;*
 - b. *Encouraging the prevention of corruption and accelerating the settlement of state compensation.*

1. Umum (Lanjutan)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (lanjutan)

- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
3. Nilai Dasar
 Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:
- Independensi; Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
 - Integritas; Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan
 - Profesionalisme; Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
4. Tujuan Strategis
 Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.
5. Sasaran Strategis (SS)
 Dalam mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”.
- Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
- Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
 - Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
 - Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - Strategi 5: Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara;

1. General (Continued)

e. Strategic Plan Year 2020 - 2024 (continued)

- c. Implement transparent and sustainable organizational governance in order to be a role model for other institutions.
3. Base Value
The formulation of the Vision and Mission in the 2020-2024 BPK Strategic Plan remains based on basic values in carrying out BPK's duties and responsibilities. Whole BPK employees will always hold the basic values consisting of:
- Independence; The value of independence is always upheld in the implementation of each task and responsibility, either institutionally, organizationally, or individually. In carrying out each assignment, free examination in mental attitude and appearance from personal, external, and/or organizational disturbances that can affect independence.*
 - Integrity; The value of integrity is built by prioritizing an honest, objective, and firm attitude in applying principles, values, and decisions*
 - Professionalism; The value of professionalism is developed by applying the principles of prudence, thoroughness, and accuracy, and is guided by applicable standards.*
4. Strategic Goals
The achievement of the vision and implementation of the mission is carried out with the aim of "Improving quality and useful state financial governance".
5. Strategic Target (ST)
In achieving this goal, BPK will realize the strategic goal of "Increasing the use of recommendations, opinions, and considerations on the management and responsibility of state finances as well as the settlement of state compensation supported by high-performing organizational governance".
- The strategic targets are achieved through five strategies grouped in two policy directions which are prepared by aligning BPK's budgeting program. The first policy direction is to increase synergy and collaboration in the examination and settlement of state compensation in a sustainable manner. This policy direction consists of five strategies as follows:*
- Strategy 1: Improve the capability of a modern and dynamic audit organization;*
 - Strategy 2: Improve audit quality strategically, anticipatively, and responsively;*
 - Strategy 3: Increasing the effectiveness of supervision on state financial audits;*
 - Strategy 4: Realizing a center of excellence for education and training on state financial audits;*
 - Strategy 5: Strengthening regulations and legal aspects of state financial audits and settlement of state compensation;*

1. Umum (Lanjutan)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

Sedangkan untuk arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi yang dicapai melalui strategi mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi.

6. Indikator Kinerja Utama BPK

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK melalui tujuan strategis dan sasaran strategis, ditetapkan ukuran keberhasilan dalam jangka waktu lima tahun yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Satuan Kerja BPK Pusat sebagai berikut:

- Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK;
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan;
- Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi.

Matriks hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan Strategis/Strategic Goals	Sasaran Strategis/Strategic Target	Indikator Kinerja Utama (IKU) /Key Performance Indicators (KPI)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat/ <i>Improved Quality and Useful State Financial Governance</i>	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi/ <i>Increased utilization of recommendations, opinions and considerations on the management and responsibility of state finances as well as settlement of state compensation supported by high-performance organizational governance</i>	1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK/ <i>Level of Quality and Benefit of State Financial Governance Based on BPK Audit Results</i>
		2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan / <i>Stakeholder Satisfaction Index on the Benefits of Examination Results</i>
		3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi / <i>Quality Assurance Value of Bureaucratic Reform</i>

1. General (Continued)

e. Strategic Plan Year 2020 - 2024 (Continued)

Meanwhile, the second policy direction is to increase synergy and collaboration in organizational governance which is achieved through a strategy of optimizing resource management and collaboration with stakeholders.

Strategic Goals are a form of operationalization to achieve the Vision, Mission, and Goals. To achieve the Strategic Goals, BPK formulates policy directions and strategies.

6. Key Performance Indicators BPK

In order to realize BPK's vision and mission through strategic goals and strategic targets, a five-year success rate is defined as a Key Performance Indicator (KPI).

BPK Main Performance Indicator are as follow:

- Level of Quality and Benefit of State Financial Governance Based on BPK Audit Results;
- Stakeholder Satisfaction Index on the Benefits of Examination Results;
- Quality Assurance Value of Bureaucratic Reform.

The relationship matrix between strategic objectives, strategic target, and key performance indicators used, can be seen in the following table:

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

e. Strategic Plan Year 2020 - 2024 (Continued)

6. Indikator Kinerja Utama BPK (Lanjutan)

6. Key Performance Indicators BPK (Continued)

Adapun Capaian IKU BPK Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The 2022 BPK KPI achievements are as follows:

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR STRATEGIC GOALS / INDICATOR		TARGET / TARGET	REALISASI / REALIZATION	CAPAIAN / ACHIEVEMENT	SKOR KINERJA/ PERFORMANCE SCORE
Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi / Increased Utilization of Recommendations, Opinions and Considerations on State Financial Management and Responsibility and Settlement of State Compensation Supported by High Performance Organizational Governance					
IKU / Sub IKU					
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK/ <i>Level of Quality and Benefits of State Financial Governance Based on BPK Audit Results</i>	76%	77.48%	101.95%	101.24
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%) / <i>Percentage of Entities Follow Up on Audit Result Recommendations Has Reached $\geq 75\%$ (60% Weight)</i>		70.18%		
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%) / <i>Level of Utilization of BPK Opinions and/or Considerations (15% Weight)</i>		88.20%		
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%) / <i>State Compensation Claim Settlement Rate (15% Weight)</i>		85.47%		
1.4	Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi (Bobot 10%) / <i>Investigation Result Utilization Rate (10% weight)</i>		93.21%		
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan / <i>Stakeholder Satisfaction Index on the Benefits of Audit Results</i>	4,30 (Sangat Memuaskan/ <i>Very Satisfied</i>)	4,31 (Sangat Memuaskan/ <i>Very Satisfied</i>)	100.23%	
3	Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi / <i>Bureaucratic Reform Quality Assurance Value</i>	88,22 (A)	89,26 (A)	101.18%	

Secara garis besar, Sasaran Strategis Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi diukur melalui tiga IKU. Pada tahun 2022, capaian atas tiga IKU tersebut disajikan sebagai berikut:

1. IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK terealisasi sebesar 77,48% atau mencapai 101,95% dari target Tahun 2022 sebesar 76%. IKU ini bersifat kuantitatif dalam mengukur dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara dan terdiri dari:
 - a. Entitas yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan,
 - b. Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK
 - c. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Negara.

According to the Strategic Target of Increasing Utilization of Recommendations, Opinions, and Considerations on the Management and Responsibility of State Finances and Settlement of State Compensation Supported by High Performance Organization Governance is measured through three KPI's. In 2022, the achievements of the three KPI's are presented as follows:

1. KPI Level of Quality and Benefit of State Financial Governance Based on BPK Audit Results realized 77.48% or reach 101.95% of the 2022 target of 76%. This KPI is quantitative in measuring the impact of BPK's audit results on improving state financial governance and consists of:
 - a. Entities that follow up on Audit Results Recommendations,
 - b. Utilization of BPK's Opinions and/or Considerations
 - c. Settlement of Claims for State Compensation.

1. Umum (Lanjutan)

e. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 (Lanjutan)

6. Indikator Kinerja Utama BPK (Lanjutan)

Semakin tinggi capaian IKU ini mengindikasikan semakin tinggi kontribusi BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.

- 2 IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan terealisasi sebesar 4,31 (sangat memuaskan) atau mencapai 100,23% dari target Tahun 2022 sebesar 4,30. IKU ini diukur berdasarkan survei yang dilakukan oleh surveyor eksternal yang independen dan berfungsi sebagai konfirmasi terhadap para pemangku kepentingan dalam mengukur manfaat hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi capaian IKU ini mengindikasikan semakin baik persepsi masyarakat terhadap peran BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara.

- 3 IKU Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi, yang terealisasi sebesar 89,26 (Predikat A) sebesar 89,26 (Predikat A) atau mencapai 101,18% dari target Tahun 2022 sebesar 88,22 (Predikat A). IKU ini merupakan cerminan hasil evaluasi pihak eksternal dhi. Kementerian PAN dan RB dalam menilai kualitas kelembagaan BPK. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa BPK terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada berbagai komponen penilaian.

f. Program dan Kegiatan BPK

Dalam perencanaan nasional, sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) lima tahunan dan acuan RPJP daerah.

RPJMN tersebut memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN tersebut dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya, RKP disusun berdasarkan RPJM. Dokumen perencanaan RPJM dan RKP tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra KL. Renstra KL tersebut meuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan KL dan bersifat indikatif. Renstra KL tersebut menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan KL yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

1. General (Continued)

e. Strategic Plan Year 2020 - 2024 (Continued)

6. Key Performance Indicators BPK (Continued)

More higher the KPI achievement indicates the higher BPK's contribution in encouraging the improvement of state financial governance.

- 2 The KPI Stakeholder Satisfaction Index for the Benefits of the Audit Results was realized at 4.31 (very satisfying) or reached 100.23% of the 2022 target of 4.30. This KPI is measured based on a survey conducted by an independent external surveyor and serves as confirmation to stakeholders in measuring the benefits of the BPK audit results. More higher the KPI achievement indicates the better public perception of the role of BPK in encouraging improvements in state financial governance.*

- 3 KPI Quality Assurance Value of Bureaucratic Reform, which was realized was 89.26 (Predicate A) of 89.26 (Predicate A) or reached 101.18% of the 2022 target of 88.22 (Predicate A). This KPI is a reflection of the evaluation results of external parties dhi. Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in assessing the institutional quality of BPK. The results of the evaluation show that BPK continues to strive to achieve better governance through continuous improvement which is marked by increasing scores on various assessment components.*

f. BPK's Program And Activities

In national planning, the National Development Planning (SPPN) system has been established based on Law Number 25 Year 2004. In accordance with the SPPN, national development plans include twenty-year long-term plans, medium-term plans and annual plans.

The National Long-Term Development Plan (RPJP) for 2005-2025 has been stipulated in Law Number 17 Year 2007. The National RPJP is a guideline in the preparation of the five-year National Mid-Term Development Plan (RJPMN) and a reference for regional RPJP.

The RPJMN includes, among others, national development strategies, general policies, Ministry / Institution and cross-KL programs, territorial and cross-regional, and macroeconomic frameworks. The RPJMN is elaborated in an annual development plan in the form of a Government Work Plan (RKP).

Furthermore, the RKP is prepared based on the RPJM. The RPJM and RKP planning documents form the basis for the preparation of the KL Strategic Plan. The KL Renstra includes the vision, mission, goals, strategies, policies and programs and activities of the KL development and is indicative. The KL Strategic Plan serves as a guideline for the preparation of the annual KL Work Plan (Renja) which contains development policies, programs and activities.

1. Umum (Lanjutan)

f. Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

Sebagai lembaga negara, BPK melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan SPPN. Untuk itu, dokumen anggaran, khususnya RPJM dan RPJM Nasional, menjadi pertimbangan penyusunan Renstra BPK. Selanjutnya, Renstra BPK tersebut menjadi acuan penyusunan Renja BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK sebagai dokumen anggaran tahunan BPK.

Unit Organisasi dan Satker BPK Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Bagian Anggaran/Unit organisasi/Satker/ Budget Section/ Organization and Working Unit	2022		2021	
	BPK /The Audit Board (004)		BPK/The Audit Board (004)	
Unit Organisasi (Eselon)/ Organisation Unit / Eselon	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board (01)	Konsolidasi/Consolidated (55)	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board (01)	Konsolidasi/Consolidated (55)
Satker / Working Units	Aktif/ Active	Tidak Aktif /Unactive	Aktif/Active	Tidak Aktif/ Unactive
a. Kantor Pusat / Central Office	2 satker/unit	-	2 satker/unit	-
b. Badan Diklat PKN / PKN Training Center	1 satker/unit	-	1 satker/unit	-
c. Balai Diklat PKN / PKN Training Center	4 satker/unit	-	4 satker/unit	-
d. Museum/Museum	1 satker/unit	-	1 satker/unit	-
e. Perwakilan/Representative	34 satker/unit	-	34 satker/unit	-
f. Konsolidasi/Consolidated	-	1 satker/unit	-	1 satker/unit
	42 satker/unit	1 satker/unit	42 satker/unit	1 satker/unit

Terdapat satu satker tidak aktif yaitu Satker Konsolidasi BPK yang dibentuk berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S 2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang petunjuk penggunaan satker konsolidasi. Satker konsolidasi tersebut dibentuk untuk mengakomodir jurnal *take out* revaluasi aset tetap pada tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai rekomendasi BPK yang berdampak pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga di lingkup LKPP.

1. General (Continued)

f. BPK's Program And Activities (Continued)

As a state institution, BPK conducts planning by considering SPPN. For this reason, budget documents, especially the RPJM and National RPJM, are considered by the BPK Renstra. Furthermore, the BPK Renstra becomes a reference for the preparation of the BPK Renja and the BPK Work Plan and Budget (RKA) as the BPK annual budget document.

The BPK Organizational Units and Working Units for the 2022 and 2021 Fiscal Year are as follows:

There is one inactive satker, namely the BPK Consolidated Satker which was formed based on the Director General of Treasury Letter Number S 2228/PB/2017 dated 28 February 2017 concerning instructions for using consolidated satkers. The consolidated work unit was formed to accommodate take out journals for fixed asset revaluation in 2017, 2018 and 2019 according to BPK recommendations which have an impact on all State Ministries/Institutions within the scope of LKPP.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

f. Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

f. Program And BPK Activities (Continued)

Program/Kegiatan Program/Activities	Pengampu Eselon I/ Supporting Echeclon I	Pengampu Eselon II/ Supporting Echeclon II
004: Badan Pemeriksa Keuangan		
CI: Program Pemeriksaan Keuangan Negara / State Financial Audit Program		
1043: Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ <i>State Finance Audit and Monitoring of State Losses</i>	AKN I-VII, Auditorat Utama Investigasi, dan Staf Ahli/ <i>AKN I-VII, Main Auditorate Investigated, and the Experts</i>	- Auditorat pada AKN I-VII dan AUI/ <i>Auditorate on AKN I-VII and AUI</i> - BPK Perwakilan/ <i>BPK Representative</i>
1153: Pengawasan oleh Inspektorat/ <i>Control by Inspectorate</i>	Inspektorat Utama/ <i>Main Inspectorate</i>	Inspektorat PIMK, PKMP dan PI/ <i>PIMK, PKMP and PI Inspectorate</i>
1154: Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah/ <i>Legal Consultation Services and Courtesy of State Losses</i>	Ditama Bingbangkum/ <i>Ditama Bingbangkum</i>	Direktorat KHK/ <i>KHK Directorate</i>
1155: Pelayanan Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum/ <i>Development Legislation Services and Legal Aid Services</i>	Ditama Bingbangkum/ <i>Ditama Bingbangkum</i>	Direktorat LPBH/ <i>LPBH Directorate</i>
1156: Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja/ <i>Strategic Planning and Performance Management</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat PSMK/ <i>PSMK Directorate</i>
1157: Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan/ <i>Evaluating dan Reporting Audit Result</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat EPP/ <i>EPP Directorate</i>
1158: Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Research and Development of State Finance Audit</i>	Ditama Revbang/ <i>Ditama Revbang</i>	Direktorat Litbang/R & D/ <i>Directorate</i>
1159: Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>HR Management Examining State Finance.</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ <i>Bureau of Human Resources Department</i>
1167: Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara/ <i>Education and Training of State Finance Audit</i>	Badan Diklat PKN / <i>PKN Training Centre</i>	Badan Diklat PKN dan Balai Diklat PKN / <i>PKN Training Agency and Training Centre</i>
2039: Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara/ <i>Investigation of State Financial Management</i>	Auditorat Utama Investigasi/ <i>Main Investigation Auditorate</i>	Auditorat Utama Investigasi/ <i>Main Investigation Auditorate</i>

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

f. Program dan Kegiatan BPK (Lanjutan)

f. Program And BPK Activities (Continued)

Program/Kegiatan Program/Activities	Pengampu Eselon I/ Supporting Echeclon I	Pengampu Eselon II/ Supporting Echeclon II
004: Badan Pemeriksa Keuangan		
WA: Program Dukungan Manajemen / Management Back up Program		
1032: Pelayanan Kehumasan dan Kerjasama International /Public Relations Services and International Cooperation	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Biro Humas dan KSI), Biro Sekretariat Pimpinan dan Museum BPK RI/ <i>Bureau of Public Relations and International Cooperation (Bureau of Public Relations and KSI), Secretariat Bureau of the Chair and Museum of the BPK RI</i>
1033: Manajemen SDM/ <i>Management of Human Resource</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)/ <i>Bureau of Human Resource</i>
1034: Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/ <i>Management and Accountability of State Finance</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Keuangan/ <i>Financial Bureau</i>
1152: Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum/ <i>Management of Facilities and Infrastructure and Public Service</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Umum/ <i>General Bureau</i>
2045: Pelayanan Kesekretariatan Badan/ <i>Agency Secretariat Services</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Sekretariat Pimpinan/ <i>Leadership Secretariat Bureau</i>
2046: Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi/ <i>System Management and Information Technology</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>Secretariat General</i>	Biro Teknologi Informasi / <i>Information Technology Bureau</i>

g. Capaian Output Strategis BPK Tahun 2022

g. BPK Strategic Output Achievement in 2022

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh BPK adalah sebagai berikut:

During the 2022 Fiscal Year period, the strategic outputs that have been achieved by BPK are as follows:

No	Kode Output Strategis/ Strategic Output Code	Uraian Output/ Output Description	Alokasi Anggaran/ Budget Allocation	Realisasi Belanja/ Expenditures Realization (Rp)	% Penyerapan/ Absorption	Target Output (Paket)/ Output Target (Package)	Realisasi Volume Output (Paket)/ Realization of Output Volume (Package)	Progress Capaian Output/Progress Achievement Output (%)
1	1043.FAF.050-054 1043.FAF.059 1043.FAF.501 1043.FAF.U01-U41 1043.FAF.U49-U90 1043.FAF.U93 2039.FAF.U01	LHP	553,688,240,000	550,403,528,490	99.41	6,367	6,368	100.29
2	1043.FAF.109-122 1043.FAF.124	Laporan Pemantauan/ Progress Report	22,177,258,000	21,637,981,659	97.57	2,796	2,797	100.00
3	1157.FAF.001	IHPS	2,861,081,000	2,860,887,930	99.99	2	2	100.00

1. Umum (Lanjutan)

g. Capaian Output Strategis BPK Tahun 2022 (Lanjutan)

Uraian capaian atas masing-masing output strategis dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas dan PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pada TA 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan yang menghasilkan sebanyak 6.386 LHP dengan rincian sebagai berikut:

Output / Output	Target/Target	Realisasi/ Realization	Anggaran/Forecast (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)
LHP Keuangan/Finance Audit Report	684	684	315,541,622,431	314,972,090,046
LHP Kinerja/Performance Audit Report	213	214	920,667,203,922	91,260,721,180
LHP DTT/LHP DTT	5,470	5,488	146,079,897,177	144,170,717,264
LHP DTT	250	254	123,650,007,177	121,783,752,249
LHP Investigatif	36	48	15,764,642,000	15,764,638,465
LHP Bantuan Partai Politik/ <i>Political Party Assistance</i>	5,184	5,186	6,665,248,000	6,622,326,550
Total	6,367	6,386	1,382,288,723,530	550,403,528,490

Sesuai dengan strategi Renstra BPK 2020-2024, kebijakan pemeriksaan BPK difokuskan untuk melaksanakan pemeriksaan tematik atas RPJMN 2020-2024 dalam kerangka pemeriksaan tematik nasional selain pemeriksaan sesuai mandat. Pada Tahun 2022 pemeriksaan tematik nasional berfokus pada PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan ringkasan hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Hasil Pemeriksaan atas PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi

Pemeriksaan tematik nasional PN 5 menghasilkan sebanyak 66 LHP, yang terdiri dari 56 LHP Kinerja dan 10 LHP Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi sebesar Rp38.210.916.861 atau 99,09% dari pagu anggaran sebesar Rp38.562.374.116, seperti disajikan pada tabel berikut:

1. General (Continued)

g. BPK Strategic Output Achievement in 2022 (Continued)

Description of the achievements of each strategic output is explained as below:

1. Audit Report

Based on Law No. 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Responsibility, the BPK carries out audits of state financial management and responsibility consisting of financial audits, performance audits, and audits with a specific purpose (PDTT). Financial Audit is an examination of financial reports, performance audit is an examination of economic and efficiency aspects, as well as an examination of aspects of effectiveness and PDTT is an examination carried out with a special purpose outside of financial audits and performance audits, including examination of other matters related to finance and investigative audits. In FY 2022, BPK has carried out audits which resulted in 6,386 LHP with the following details:

In accordance with the 2020-2024 BPK Strategic Plan strategy, policy BPK audits are focused on carrying out thematic audits of the 2020-2024 RPJMN within the national thematic audit framework in addition to audits according to the mandate. In 2022 the national thematic examination focuses on PN 5 Strengthening Infrastructure to Support Economic Development and Basic Services and PN 7 Strengthening Polhukhankam Stability and Public Service Transformation with a summary of the results of the examination as explained below:

a. Examination Results of PN 5 Strengthening Infrastructure to Support Economic Development

The national thematic inspection of PN 5 produced 66 LHP, consisting of 56 Performance LHP and 10 LHP With Specific Purposes with a realization of Rp38,210,916,861 or 99.09% of the budget ceiling of Rp38,562,374,116, as presented in the following table:

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

g. Capaian Output Strategis BPK Tahun 2022 (Lanjutan)

g. BPK Strategic Output Achievement in 2022 (Continued)

Output / Output	Volume /Volume		Anggaran/Forecast (Rp)	
	Target/ Target	Realisasi/ Realization	Rencana/ Planning	Realisasi/ Realization
LHP Kinerja/LHP Performance	56	56	26,889,469,514	26,569,283,142
LHP DTT/LHP DTT	10	10	11,672,904,602	11,641,633,719
Total/Total	66	66	38,562,374,116	38,210,916,861

b. Hasil Pemeriksaan atas PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

a. Examination Results of PN 7 Strengthening Polhukhankam Stability and Public Service Transformation

Pemeriksaan tematik nasional PN 7, menghasilkan 70 LHP, terdiri dari 44 LHP Kinerja dan 26 LHP Dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi anggaran sebesar Rp42.854.260.352 atau 99,76% dari pagu anggaran sebesar Rp42.945.910.971, seperti disajikan pada tabel berikut:

The national thematic examination of PN 7 resulted in 70 LHP, consisting of 44 LHP Performance and 26 LHP With Specific Purposes with a budget realization of Rp42,854,260,352 or 99.76% of the budget ceiling of Rp42,945,910,971, as presented in the following table :

Output / Output	Volume /Volume		Anggaran/Forecast (Rp)	
	Target/ Target	Realisasi/ Realization	Rencana/ Planning	Realisasi/ Realization
LHP Kinerja/LHP Performance	44	44	25,183,610,824	25,169,219,106
LHP DTT/LHP DTT	24	26	17,762,300,147	17,685,041,246
Total/Total	68	70	42,945,910,971	42,854,260,352

2. Laporan Pemantauan

2. Monitoring Report

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dipantau oleh BPK.

Based on Article 20 of Law Number 15 of 2004 concerning Examination of State Financial Management and Responsibility and Article 8 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (5) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia states that officials who inspected and/or responsible is obligatory follow up on recommendations from BPK's audit results and the implementation of follow-up actions on these audit results is monitored by BPK.

Lebih lanjut, Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau penyelesaian dan pelaksanaan peneanaan ganti kerugian negara/daerah.

Furthermore, Article 22 paragraph (4) of Law Number 15 of 2004 and Article 10 paragraph (1) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia, to ensure the implementation of compensation payments, BPK has the authority to monitor the completion and implementation of the imposition of compensation. state/regional losses.

Capaian output dan penyerapan anggaran laporan pemantauan TA 2022 disajikan pada tabel berikut:

The output achievements and budget absorption for the monitoring report FY 2022 are presented in the following table:

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

g. Capaian Output Strategis BPK Tahun 2022 (Lanjutan)

g. BPK Strategic Output Achievement in 2022 (Continued)

No	Laporan Pemantauan/Monitoring Report	Volume/Volume			Anggaran (Budget) Rp		
		Target/Target	Realisasi/Realization	%	Rencana/Budget	Realisasi/Realization	%
1	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah/ National or District Compensation Settlement Monitoring Report	1302	1302	100	11,457,045,000	11,105,192,611	96.93%
1	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Follow-up Monitoring Report on Examination Results	1494	1494	100	10,720,213,000	10,532,789,048	98.25%
	Total/Total	2,796	2,796	100	22,177,258,000	21,637,981,659	95.75%

3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)

3. Summary of Semi Annually Audit Results

Pasal 18 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Pada TA 2022, BPK telah menyampaikan 2 IHPS, yaitu IHPS II Tahun 2021 pada bulan Maret 2022 dan IHPS I Tahun 2022 pada bulan September 2022.

Article 18 of Law No. 15 of 2004 concerning Examination of Management and Responsibility for State Finances mandates BPK to submit Summary of Semester Examination Results (IHPS) to representative institutions, presidents, and heads of regions no later than 3 months after the end of the semester in question. In FY 2022, BPK has submitted 2 IHPS, namely IHPS II 2021 in March 2022 and IHPS I 2022 in September 2022.

IHPS II Tahun 2021 merupakan ikhtisar dari 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 3 laporan keuangan, 317 hasil pemeriksaan kinerja, dan 215 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

IHPS II of 2021 is an overview of the 535 BPK Audit Reports (LHP) for the central government, regional governments, State-Owned Enterprises (BUMN) and other bodies which include the results of examinations of 3 financial reports, 317 results of performance audits, and 215 results of audits with a specific purpose.

IHPS I Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas 682 laporan keuangan, 41 hasil pemeriksaan kinerja, dan 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

IHPS I of 2022 is an overview of 771 BPK Audit Result Reports (LHP) for the central government, regional governments, State-Owned Enterprises (BUMN), and other bodies. Based on the type of audit carried out by the BPK, IHPS I 2022 contains the results of an examination of 682 financial reports, 41 results of a performance audit, and 48 results of an audit with a specific purpose.

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Approach to Develop Financial Statements

Laporan Keuangan BPK Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK (BA 004). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BPK.

Financial Report of BPK Year 2022 is a report that covers all financial aspects managed by BPK (BA 004). This Financial Statement is generated through Accounting Financial System Institution which is a series of manual and computerized procedures starting from data collection, recording and overview up to the reporting of financial position and financial operation at BPK.

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Proses penyusunan Laporan Keuangan ini telah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI terdiri dari modul-modul berikut:

- a. Modul Administrator
- b. Modul Penganggaran
- c. Modul Komitmen
- d. Modul Bendahara
- e. Modul Pembayaran
- f. Modul Persediaan
- g. Modul Aset Tetap
- h. Modul Piutang
- i. Modul Akuntansi dan Pelaporan

SAKTI digunakan oleh seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan dalam menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Dalam penyusunan laporan keuangan tingkat lembaga, BPK sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh satuan kerja (satker) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di lingkungan BPK. Satker-satker tersebut bertanggungjawab dan berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran yang diterimanya kecuali satker konsolidasi yang merupakan satker tanpa DIPA.

Satker UAKPA penyusun laporan keuangan di lingkungan BPK berjumlah 42 satker, yaitu terdiri dari:

2. Approach to Develop Financial Statements (Continued)

The process of preparing this Financial Report has used the Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), this system integrates planning and budgeting processes, implementation, and accountability of the state revenue and expenditure budget in government agencies which are part of the state financial management system. SAKTI consists of the following modules:

- a. Administrator Module
- b. Budgeting Module
- c. Commitment Module
- d. Treasurer Module
- e. Payment Module
- f. Stock Module
- g. Fixed Assets Module
- h. Receivables Module
- i. Accounting and Reporting Module

SAKTI is used by all State Ministries/Institutions and Ministry of Finance in preparing Financial Reports for State Ministries/Institutions (LKKL) and preparation of Central Government Finance Report (LKPP).

In preparing institutional-level financial reports, BPK as the Budget User Accounting Unit (UAPA) consolidates the financial reports of all work units (satkers) of the Budget User Authority Accounting Unit (UAKPA) within BPK. These work units are responsible and obligated to prepare financial reports on the implementation of the budget they receive except for the consolidated work units which are work units without DIPA.

The Accounting Authorization of Budget User working unit of BPK consists of 42 working unit, consist of:

No.	Nama Satker/Name of Unit Works	ESELON V / ECHELONI		Jumlah Satker UAKPA / Total UAKPA unit works
		Kantor Pusat (KP)/ Headquarters	Kantor Daerah (KD)/Regional Office	
1.	Sekretariat Jenderal BPK/Sekretariat General of BPK	1	-	1
2.	Badan Pemeriksa Keuangan Pusat/BPK Headquarters	1	-	1
3.	Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN/Education and Training Center	1	-	1
4.	BPK Perwakilan Provinsi Aceh/BPK Representative of Aceh Province	-	1	1
5.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/BPK Representative of North Sumatera Province	-	1	1
6.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/BPK Representative of West Sumatera Province	-	1	1
7.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/BPK Representative of South Sumatera Province	-	1	1
8.	BPK Perwakilan Provinsi Riau/BPK Representative of Riau Province	-	1	1
9.	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau/BPK Representative of Riau Islands Province	-	1	1
10.	BPK Perwakilan Provinsi Jambi/BPK Representative of Jambi Province	-	1	1
11.	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu/BPK Representative of Bengkulu Province	-	1	1
12.	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/BPK Representative of Bangka Belitung Island Province	-	1	1
13.	BPK Perwakilan Provinsi Lampung/BPK Representative of Lampung Province	-	1	1
14.	BPK Perwakilan Provinsi Banten/BPK Representative of Banten Province	-	1	1
15.	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus ibu kota (DKI) Jakarta/BPK Representative of the Province of Jakarta Capital Special Region (DKI)	-	1	1
16.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat/BPK Representative of West Java Province	-	1	1
17.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/BPK Representative of Central Java Province	-	1	1
18.	BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta/BPK Representative of Special Province (D.I.) Yogyakarta	-	1	1
19.	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/BPK Representative of East Java Province	-	1	1
20.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/BPK Representative of South Kalimantan Province	-	1	1
21.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur/BPK Representative of East Kalimantan Province	-	1	1
22.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/BPK Representative of Central Kalimantan Province	-	1	1
23.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat/BPK Representative of West Kalimantan Province	-	1	1
24.	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara/BPK Representative of North Kalimantan Province	-	1	1
25.	BPK Perwakilan Provinsi Bali/BPK Representative of Bali Province	-	1	1
26.	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)/BPK Representative of West Nusa Tenggara (NTB) Province	-	1	1
27.	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)/BPK Representative of East Nusa Tenggara (NTT) Province	-	1	1
28.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara/BPK Representative of North Sulawesi Province	-	1	1
29.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah/BPK Representative of Central Sulawesi Province	-	1	1

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

2. Approach to Develop Financial Statements (Continued)

No.	Nama Satker/Name of Unit Works	Eselon I/Echelon I		Jumlah Satker UAKPA/Total UAKPA unit works
		Kantor Pusat (KP)/ Headquarters	Kantor Daerah (KD)/Regional Office	
30.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/BPK Representative of West Sulawesi Province	-	1	1
31.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/BPK Representative of South Sulawesi Province	-	1	1
32.	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/BPK Representative of Southeast Sulawesi Province	-	1	1
33.	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/BPK Representative of Gorontalo Province	-	1	1
34.	BPK Perwakilan Provinsi Maluku/BPK Representative of Maluku Province	-	1	1
35.	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara/BPK Representative of North Maluku Province	-	1	1
36.	BPK Perwakilan Provinsi Papua/BPK Representative Papua Province	-	1	1
37.	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat/BPK Representative West Papua Province	-	1	1
38.	Balai Diklat PKN Medan/Medan Training Center	-	1	1
39.	Balai Diklat PKN D.I. Yogyakarta/Yogyakarta Training Center	-	1	1
40.	Balai Diklat PKN Gowa/Gowa Training Center	-	1	1
41.	Museum BPK RI/BPK RI Museum	-	1	1
42.	Balai Diklat PKN Bali/Bali Training Center	-	1	1
43.	Konsolidasi BPK RI/BPK RI Consolidation	-	1	1
Jumlah/Total		3	39	42

3. Basis Akuntansi

Dalam menyusun laporan keuangan, BPK menerapkan basis akrual untuk penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan oleh BPK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Accounting Basic

In preparing the financial statements, BPK applies the accrual basis for the preparation and presentation of Balance Sheet, Statement of Operations, and Statement of Changes in Equity as well as cash basis for preparation and presentation of Statement of Budget Realization. The accrual basis is an accounting basis that recognizes the effect of transactions and other events at the time the transactions and events occur, regardless of when cash or cash equivalents are received or paid. While the cash basis is the basis of accounting that recognizes the effect of transactions or other events when cash or cash equivalents are received or paid. This is in accordance with Government Accounting Standards that has been established with Government Regulation No. 71 Year 2010 on Government Accounting Standards.

4. Basic of Measurement

Measurement is the process of determining the value of money to recognize and include each post in the financial statements. The measurement basis applied by BPK in the preparation and presentation of the Financial Statement is by use historical value.

Assets are recorded at the expense/use of economic resources or at fair value of the benefits provided for acquiring the asset. Liabilities are recorded at the fair value of economic resources used by the government to meet the obligations concerned.

Measurement of financial statement items using Indonesia rupiah currency. Transactions using foreign currencies are converted and denominated into Indonesia rupiah.

5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPK Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum LRA Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (TP/TGR) diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

5. Accounting Policies

Preparation and presentation of BPK Financial Statements Year 2022 have been referred to Government Accounting Standards. The accounting policies are the principles, basics, conventions, rules and specific practices chosen by a reporting entity in the preparation and presentation of financial statements. The accounting policies adopted in these financial statements are the policies established by BPK. In addition, in the preparation has been applied rules of good financial management in the government environment.

The significant accounting policies used in the preparation of the BPK Financial Statements are as follows:

1. Revenues-Statement of Budget Realization

Revenues-Statement of Budget Realization is all about General Statement of Budget Realization Cash Account receipts that add more Budget Balance within the relevant fiscal year period to which the government is entitled and is not required to be repaid by the government. Revenue-Statement of Budget Realization is recognized when the cash is received in the State Treasury.

The revenue-Statement of Budget Realization is executed on the basis of gross principle, by recording gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue-Statement of Budget Realization is presented according to the classification of revenue sources.

2. Revenues-Statement of Operational

Revenue-Statement of Operational is a recognized central government right as an equity enhancer within the period of the fiscal year concerned and does not need to be repaid. Revenues-Statement of Operational are recognized when the right to revenue and/or Revenue is realized, ie the inflow of economic resources. In particular the revenue-Statement of Operational recognition to BPK are as follows:

- Training Service Revenue is recognized after the training is completed;*
- Building Rent Revenue is recognized proportionally between the value and the rental period;*
- Fines Income is recognized at the time of issuance of fines or other equivalent documents;*
- Revenues from the alienation of State Property shall be recognized upon the issuance of a decree of abolition or other equivalent documents;*
- Revenue Reduction for Losses suffered by the State (Indemnification of Treasury/Claims Bills) is recognized upon the issuance of Indemnification of Treasury/Claims Bills decree or other equivalent documents.*

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

2. Pendapatan-Laporan Operasional (LO) (Lanjutan)

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

5. Accounting Policies (Continued)

2. *Revenues-Statement of Operational (Continued)*

The accounting revenue-Statement of Operational is carried out on a gross basis, by posting gross receipts, and not recording the net amount (after being offset). Revenue is presented according to the classification of revenue sources.

3. *Expenditure*

Expenditure is all spending from the State General Treasury Account which reduces the Budget Balance Over within the relevant fiscal year period that the government will not be repaid. Expenditures is recognized when a cash outflow is made from KUN. Specific expenditures through the expenditure treasurer, expenditure recognition occurs when the accountability of such expenditures is authorized by The Office of State Treasury Services. Expenditures are presented by economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function shall be disclosed in the Notes to the Financial Statements.

4. *Expenses*

Expenses are the decline in economic benefits or potential services in the reporting period that decrease the equity, which may be the expenditure or consumption of assets or the incurrence of liabilities. Expenses are recognized when an obligation arises; asset consumption occurring; the decline in economic benefits or potential services. Expenses are presented under the economic classification/type of expenditure and subsequent classifications by organization and function are disclosed in the Notes to the Financial Statements.

5. *Assets*

Assets are economic resources that are controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which future economic and/or social benefits are expected to be gained, either by the government or by society, and can be measured in units of money, including the non-financial resources necessary for the provision of services to the general public and resources maintained for historical and cultural reasons. In the sense of this asset does not include natural resources such as forests, wealth on the seabed, and mining content. Assets are recognized upon receipt or when ownership rights moved.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, Long-Term Receivables, and Other Assets.

a. *Current Assets*

Current Assets include cash and cash equivalents that are expected immediately to be realized, used or owned for sale within 12 (twelve) months from the date of reporting. These current assets, including:

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

1) Kas

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang Belum Disetor
 Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK, gaji), jasa giro, penerimaan PNB, dan lain-lain yang belum disetorkan.
 Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
 Utang pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

5. Accounting Policies (Continued)

a. Current Assets (Continued)

1) Cash

Cash is presented on the balance sheet using the nominal value. Cash in foreign currencies are presented on the balance sheet using the middle rate of BI at the balance sheet date. Cash consists of:

- a) Cash in the Spending Treasurer is cash that is controlled, managed and under the responsibility of the Spending Treasurer derived from the Remnant Advance from The Office of State Treasury Service which has not been accounted or reimbursed to the State Treasury as of the balance sheet date. Cash in the Spending Treasurer covers all account balances of treasurer of expenditures, coins, notes, and other cash whose source comes from Advance from The Office of State Treasury Service which has not been paid back to the State Treasury as of the balance sheet date.
- b) Other Cash and Cash Equivalents include Other Cash in the Spending Treasurer, which is cash which is under the responsibility of the treasurer of expenditures not originating from the Advance from the The Office of State Treasury Service, whether the account balance in the bank or cash balance.

Other Cash and Cash Equivalents come from:

- Unpaid Revenues
 State income received by the Expenditure Treasurer in a budget period but at the end of the fiscal year has not been deposited to the State Treasury, there are of taxes, returns on official travel expenses and personnel expenses (salaries, TKPK, salaries), demand deposits, Non-Tax Income receipts, and others that have not been deposited.
 Especially for the refund expenditures of the current year which has not been paid yet, pursuant to the Director General of Treasury Letter No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid Refunds Expenditures are recognized as a deduction for the related Expenses in the same period.
- Debt to Other Third Parties
 The third party's payable in the Spending Treasurer is in the form of honorarium, salary/TKPK, unpaid food allowance to the employee, and other unpaid money to other third parties at Balance Sheet period.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Lanjutan)
 Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.
- Utang Jangka Pendek Lainnya
 Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

2) Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

3) Piutang Bukan Pajak

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbu berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBPN dengan kebijakan yaitu:

- a) Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.
 Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

5. Accounting Policies (Continued)

a. Current Assets (Continued)

- *Debt to Other Third Parties (Continued)*
Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short Term Liability there is Debt to Other Third Parties.
- *Other Short-Term Debts*
Tax with held by the spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the date of reporting. Accounting Treatment is on the Asset Current side there are Other Cash and Cash Equivalents in the Spending Treasurer, while in the Short-Term Liabilities there is Unpaid Treasury Payable.

2) *Prepaid Expenditures*

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditures of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/enjoyed by the unit work.

Prepaid expenditures are derived from the realization of goods expenditures for lease of buildings with the lease term exceeding the reporting year.

Prepaid expenditures for more than one year do not need to be separated as individual accounts with maturities of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year entirely recorded as current assets.

The method of calculating Expenditures for Prepaid Goods is the rental value divided by the total number of days of the lease multiplied by the remaining amount of unused rental days.

3) *Non Tax - Receivables*

Accounts receivable are expressed in the balance sheet according to the value arising under the rights issued by the billing or equivalent letters which are expected to be returned within 12 (twelve) months after the date of reporting.

Receivables are from Non Taxes Received from non-tax state revenues up to the balance sheet date.

Non Tax Account Accounts should be identified whether they clasified into the Unearned Revenue category or Non-Tax Income Receivables with the following policies:

- a) *Unearned Revenue is the revenue of Non-Tax Income based on accounting calculation has become the right of the government but there is no right to collect because it is not yet time to be paid/collected.*

The accounting policies for Unearned Revenue are:

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- b) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- a. Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya. Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca. Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- b. Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi misalnya:

- Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta
- Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyeteroran ke Kas Negara.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

5. Accounting Policies (Continued)

a. Current Assets (Continued)

- *The basis for recognition is accounting or not through determination.*
- *A reverse journal is made at the beginning of the next period.*
- *Not calculated allowance for Uncollectible Receivable.*

BPK does not have an Unearned Revenue account.

- b) Non-Tax Receivables are receivables arising from non-tax state revenues that have not been paid until the end of the financial statement period.*

- a. Non-Tax Income Receivables are Non-Tax Income income for the current year that should have been paid by the obligatory payers and have been collected by the government (due dated) but have not yet received the payment. The accounting policies for Non-Tax Income Receivables are:*

- *The basis for recognition is the Bills/Letter of Establishment/ Equalization.*
- *No reverse journal was performed at the beginning of the next period.*
- *The allowance for uncollectible accounts is calculated.*

Non-Tax Income receivables are derived from the Office/Home Office Revenue Receipt, Building Revenue, Buildings and Warehouse Unpaid by the obligation to pay up to the balance sheet date, Excess payment of capital expenditures due to late settlement of work (paid by guarantee/Bank Guarantee).

- b. Other Receivables come from accounts receivable from non-taxable receivables and Current Portion of Claims on Compensation for example:*

- *The excess of official travel expenses that have been accounted for is completed, but at the balance sheet date has not been resolved by the official travel officer, and*
- *Overpaid salary payment/TKPK to employees.*

The accounting policies for Other Receivables are as follows:

- *No reverse journal was made at the beginning of the next period but at the time of deposit to the State Treasury.*
- *The allowance for uncollectible accounts is calculated.*

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- 4) Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang/ <i>Quality of Receivables</i>	Uraian/Descriptions	Penyisihan/ <i>Allowance</i>
Lancar/ <i>Current</i>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo/ <i>Not to be repaid until the maturity date</i>	0.50%
Kurang Lancar/ <i>Non Current</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the First Billing Letter not being repaid</i>	10%
Diragukan/ <i>Doubtful</i>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from date of the Second Receipt Letter is not repaid</i>	50%
Macet/ <i>Loss</i>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month commencing from the date of the Third Tax Return is not redeemed</i> 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/ <i>Receivables have been submitted to the State Receivables Management Committee/DJKN</i>	100%

- 5) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.
- 6) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KL-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan.

Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

5. Accounting Policies (Continued)

a. Current Assets (Continued)

In accordance with the Director General of Treasury Letter No. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that the unpaid refunds are recognized as a deduction for the related Expenses during the same period.

- 4) *Receivables are presented in the Balance Sheet at a realizable value. This is realized by establishing an allowance for doubtful accounts. The allowance is based on the quality of receivables determined on the basis of maturity and collection efforts by the government. The allowance are as follows:*

- 5) *Indemnification of Treasury/Claims which will mature 12 (twelve) months after the balance sheet date is presented as Current Section of Indemnification of Treasury/Claims Bills.*

- 6) *Inventories are current assets in the form of goods or equipment intended to support government operational activities, and goods intended to be sold and/or delivered in the context of services to the community.*

The inventory of operational goods for activities is not determined by the type of goods, but from the initial intention at the time of preparation of the activity planning and preparation of the RKA KL, so that goods that are planned to run out in one activity are not allocated from the Inventory Goods Expenditure and not in stock.

An item can be classified as an inventory item if the planning for the procurement of the item is continuous or continuous, not just for one activity in the short term.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

a. Aset Lancar (Lanjutan)

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan 3. Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:

- a) harga pembelian;
- b) biaya pengangkutan;
- c) biaya penanganan;
- d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

5. Accounting Policies (Continued)

a. Current Assets (Continued)

Based on the nature of their use, inventory items consist of: 1. Consumables; 2. Non Consumables; and 3. Used goods.

Inventories are stated at cost when purchased. The cost of inventories includes:

- a) purchase price;
- b) transportation costs;
- c) handling fees;
- d) other costs that can be directly charged to the acquisition of inventories.

In recording Inventories, the Government uses the Perpetual recording method. Inventories are valued using the First In First Out (FIFO) method, where the goods that come in first are considered the first goods out. With this method the balance of inventories is calculated based on the respective cost.

Inventories are presented on the balance sheet under current assets. In order to present inventories on the balance sheet, the work unit carries out a physical inventory (stock opname) of inventories which is carried out every semester. Furthermore, based on the results of the physical inventory, adjustments are made to the inventory value data.

b. Fixed Assets

Fixed assets include all tangible assets utilized by the government or for the benefit of the public with a useful life of more than one year. Fixed assets include land; equipment and machinery; properties and buliding; roads, irrigation, and networks; other fixed assets; as well as Construction in Progress. The value of Property and Equipment is presented at cost or fair value. In accordance with Minister of Finance Regulation No. 181/PMK.06/2016 concerning Administration of BMN, the recognition of acquisition of property, plant and equipment since 2018 is based on the value of the minimum capitalization unit as follows:

- *Expenditures of unit of equipment and machinery and sports equipment equal to or more than Rp1,000,000 (one million rupiah);*
- *Expenditures on Properties and Buliding equal to or more than Rp25,000,000 (twenty five million rupiah);*
- *Expenditures not covered by the minimum capitalization limits mentioned above are treated as expenses except land, road/irrigation/network expenditures and other fixed assets in the form of library and art-related collections.*

As a result of the implementation of the asset capitalization policy, as stated in Regulation of the Minister of Finance No. 181/PMK.06/2016, State Property data is divided into two categories:

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

1) Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

2) Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

5. Accounting Policies (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

1) *List of State Property Intracomptables, including State Property in the form of fixed assets that meet the capitalization criteria and all State Property acquired prior to the enactment of capitalization policies, and State Property obtained through Incoming/ Receipt Transfers from Exchange/Inbound Transfer as well as State of Property transferred from the List of State Property Ekstrakomptabel at the time of accumulated value the cost of acquisition and development value has reached the minimum limit of capitalization.*

2) *List of State Property Extracomptables, including State Property in the form of fixed assets that do not meet the criteria of capitalization.*

Equipment and machinery acquired prior to January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to Rp300,000, and obtained since January 1, 2018 with a minimum unit value of more than or equal to Rp1,000,000 and derived from the transfer are capitalized as property, plant and equipment. Tools and Machines of this category are recorded and reported in the State Property List and Intracomptable State Property Report.

Equipment and Machinery obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 but the unit value of less than Rp300,000 and obtained since January 1, 2018 but the unit value of less than Rp1,000,000 is not capitalized as fixed assets. Equipment and machines of this category are recorded in the State Property List and State Property Reports of Extracomptables.

Building and Properties acquired prior to January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 with a minimum unit value of more than or equal to Rp10,000,000, and obtained since January 1, 2018 with a minimum unit value of more than or equal to Rp25,000,000 and derived from the transfer are capitalized as property, plant and equipment. Building and Properties of this category are recorded and reported in the State Property List and Intracomptable State Property Report. Building and Properties obtained since January 1, 2002 to December 31, 2017 but the unit value of less than Rp10,000,000 and obtained since January 1, 2018 but the unit value of less than Rp25,000,000 is not capitalized as fixed assets. Building and Properties of this category are recorded in the State Property List and State Property Reports of Extracomptables.

Other fixed assets include fixed assets that can not be grouped into groups Land; Equipment and Engineering; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for the operations of government and in ready to use. The assets included in the category of Other Fixed Assets is a collection of libraries/book and non-book items patterned art/culture, animals, fish, and plants.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam suatu K/L (BPK).
 Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan/Badan Diklat PKN/Balai Diklat PKN/Museum BPK).

- 2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- 3) Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (Satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5. Accounting Policies (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

Included in the category Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Remodeling can be conducted on all belongings in a group of fixed assets. In the case of the fixed assets that meet the capitalization criteria remodeled and does not belong to a work unit, the renovations were recorded as fixed assets renovation.

Accounts Fixed Assets Renovation in BPK occur because of 3 (three) things:

- 1) *Renovation of fixed assets belonging to other work units in a K/L (BPK).*

Carrying out renovation work units (satker Secretariat) not recorded as additions to fixed assets related to the acquisition value of fixed assets such as ownership exist in other work unit (Representative BPK/PKN Training Agency/PKN Training Center/BPK Museum).

- 2) *Renovation of fixed assets belonging to the working unit K/L others.*

Carrying out renovation work units (satker BPK) did not record it as an addition to the value of acquisition of fixed assets related to the ownership of the fixed assets is on a working unit K/L others;

At points 1) and 2) when the renovation is complete the process before the reporting date, the assets will be recorded as Other Fixed-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovations are still in progress, or completed but not yet handed over the process (of a contractor to satker BPK), it will be recorded as Construction In Progress (CIP).

- 3) *Renovation of fixed assets belonging to other government agencies (local government) and the renovation of fixed assets owned by other parties other than the government (Private, State/Enterprises, Foundations, etc.).*

Unit works undertaking renovations (BPK unit works) do not record them as additions to the related fixed asset value due to the ownership of such fixed assets to others.

If the renovation has been completed prior to the reporting date it will be recorded as Other Fixed Assets-Renovations and Assets Renovated and presented on the balance sheet as a Group of Property Assets. Up to the date of reporting the renovation is still under construction, or has been completed but not yet handed over (from contractor to BPK), it will be recorded as Construction In Progress.

Fixed assets (including Renewal Assets) terminated from active use of the government do not meet the definition of fixed assets and must be transferred to Other Assets item at their carrying amount.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang melaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi di BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan. Secara umum akan terdapat tiga jurnal atas transaksi Penilaian Kembali BMN (kecuali atas tanah) yaitu:

5. Accounting Policies (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

The government revalues (revaluation) based on the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 75 of 2017 concerning Reassessment of State/Regional Property and Minister of Finance Regulation Number 118/PMK.06/2017 concerning Guidelines for Implementing the Reassessment of State Property. Revaluation is carried out on fixed assets in the form of Land, Buildings and Buildings, as well as Roads, Networks and Irrigation in the form of Bridge Roads and Water Buildings in State Ministries/Institutions according to the State Property codification obtained until December 31, 2015. Included in the scope of the revaluation object are fixed assets in the Ministries/Institutions that are being carried out Utilization.

The evaluation in the context of revaluation is carried out with a market data approach, cost approach, and/or income approach by the Government Appraiser within the Directorate General of State Wealth, Ministry of Finance. Revaluation was carried out in 2017 and 2018. At the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency the revaluation was carried out in 2017.

Based on consideration of budget efficiency and time of completion, the assessment was carried out by field surveys for valuation objects in the form of land and without field surveys for valuation objects other than land.

The value of fixed assets resulting from the revaluation is a new acquisition value and the accumulated value of depreciation is zero. In the event that the value of a fixed asset revalued is higher than the previous book value, the difference is recognized as an increase in equity in the Financial Report. However, if the value of a fixed asset revalued is lower than the previous book value, the difference is recognized as a reduction in equity in the Financial Statements.

Fixed Assets Unused in government operations caused by, among others, worn out, out of date with the needs of the growing organization, severely damaged, inconsistent with the General Spatial Plan, or their useful life has ended up reclassified to Assets Others on Other Assets post.

Fixed assets that are permanently discontinued, are removed from the balance sheet at the time of any proposed removal from the entity in accordance with the provisions of legislation in the management of State Property.

Presentation of BMN revaluation in the Balance Sheet Report (position report at BMN on the Balance Sheet) is presented with the fair value of the revaluation result without accumulated depreciation. In general, there will be three journals for BMN Revaluation transactions (except for land), which is:

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

b. Aset Tetap (Lanjutan)

- Jurnal untuk menghapus akumulasi penyusutan (kode 205).
- Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai perolehan menjadi nilai buku (kode 223).
- Jurnal untuk menyesuaikan nilai buku menjadi nilai hasil revaluasi (kode 205).

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- 1) Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 2) Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah;
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- 4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- 5) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- 6) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

5. Accounting Policies (Continued)

b. Fixed Assets (Continued)

- *Journal to delete accumulated depreciation (code 205).*
- *A quasi-correction journal to reduce the acquisition value to book value (code 223).*
- *A journal to adjust the book value becomes a revalued value (code 205).*

c. Depreciation of Fixed Assets

Depreciation of property and equipment is a value adjustment in relation to the decrease in the capacity and benefits of a fixed asset. Depreciation policy of fixed assets is based on Regulation of the Minister of Finance No. 65/PMK.06/2017 concerning Depreciation of State Property in the Form of Fixed Assets in Central Government Entities.

Depreciation of Fixed Assets is used for:

- 1) Present the value of the Property Equivalent Assets in accordance with the economic benefits of assets in the Central Government Financial Statements;*
- 2) Knowing the potential of State Property by reporting the remainder the expected benefits of a State Property can be obtained in the next few years;*
- 3) Provide a more systematic and logical approach to budgeting maintenance expenditures or capital expenditures to replace or add to existing fixed assets.*

Depreciation of fixed assets is not carried out against:

- 1) Land;*
- 2) Construction in Progress;*
- 3) Fixed Assets declared to be lost on the basis of valid source documents or in conditions of serious damage and/or obsolescence that have been proposed to the Goods Manager for removal;*
- 4) Fixed Assets in a heavily and/or obsolete condition that has been proposed to the Goods Manager or the Goods Users in accordance with their authority for alienation, destruction or removal;*
- 5) Fixed Assets Renovation of Land; and*
- 6) Fixed Assets Renovations that do not add to the Benefit Period.*

The calculation and recording of Depreciation of Fixed Assets shall be done at the end of each semester without taking into account the residual value.

Depreciation of Fixed Assets is done using the straight-line method by allocating depreciable value of fixed assets equally each semester during the Benefit Period.

The Useful Life of Fixed Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 59/KMK.06/2013 concerning Table of Benefit Period in the Framework of Depreciation of State Property in the form of Fixed Assets in Central Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

c. Penyusutan Aset Tetap (Lanjutan)

	<u>Taksiran Masa Manfaat/ Estimated Useful Life</u>
Peralatan dan Mesin	2 - 20 tahun/years
Gedung dan Bangunan	10-50 tahun/years
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5-40 tahun/years
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun/years

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya ini meliputi:

- 1) Aset Tak Berwujud meliputi *software*, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang diperoleh tahun 2016 menjadi beban amortisasi Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Amortisasi yang terjadi pada Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2016 dilakukan dengan mengkoreksi nilai Ekuitas tahun sebelumnya.

5. Accounting Policies (Continued)

c. Depreciation of Fixed Assets (Continued)

	<u>Taksiran Masa Manfaat/ Estimated Useful Life</u>	
	2 - 20 tahun/years	<i>Equipment and Machine</i>
	10-50 tahun/years	<i>Buildings and Properties</i>
	5-40 tahun/years	<i>Roads, Network and Irrigation</i>
	4 tahun/years	<i>Other Fixed Assets (Modern Musical Instruments)</i>

d. Long-Term Receivables

Long-term Receivables are receivable that will be due or will be realized more than 12 months from the date of reporting. Included in Long-term Receivables are Accounts Receivable Indemnification of Treasury/Claims Bills that are due for more than one year.

Treasury Demands shall be claims set by the State Audit Board to treasurers who due to negligence or unlawful acts result in losses of the State/region.

Indemnification Claims is a process done to a civil servant or not a treasurer of a treasurer in order to claim the replacement of a loss suffered by the state as a direct or indirect consequence of an act which is unlawful by the employee or the negligence in the execution the task.

Indemnification of Treasury/Claims receivables that have been submitted to the Ministry of Finance in this case DJKN, since the loss is recorded as Indemnification of Treasury/Claims bills.

e. Other Assets

Other Assets are government assets other than current assets, fixed assets, and long-term receivables. Other Assets include:

- 1) *Intangible assets include software, licenses, and other Intangible Assets. Intangible Assets are identifiable assets that have no physical form and are held for use in the production of goods or services or used for other purposes including intellectual property rights. Intangible Assets are stated at net carrying amount at cost less amortization.*

On Other Assets - Intangible Assets is amortized starting 2016 in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 251/PMK.06/2015 on Amortization Procedures of State Property in the form of Intangible Assets of Government Entities. Amortization occurring on Other Assets - Intangible Assets acquired in 2016 becomes the amortization expense of Other Assets - the Intangible Assets concerned. Amortization occurring on Other Assets - Intangible Assets acquired prior to 2016 is effected by adjustment the value of the previous year's Equity.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

e. Aset Lainnya (Lanjutan)

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

	<u>Taksiran Masa Manfaat/ Estimated Useful Life</u>	
Software Komputer	4 tahun/years	Computer Software
Franchise	5 tahun/years	Franchise
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun/years	License, Simple Patent, Brand, Industrial Design, Trade Secret, Layout Design of Integrated Circuit.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun/years	Economic Rights of Broadcasting Institution, Common Patents, Crop Variety Protection Annual.
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25 tahun/years	Copyright of Applied Art Works, Annual Plant Variety Protection.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram.	50 tahun/years	Copyright on Goal Creation. II, Economic Rights Performer Performance, Economic Rights Procedur Phonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun/years	Copyright on Gol Creation.I

- 2) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

1. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:

- Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

5. Accounting Policies (Continued)

e. Other Assets (Continued)

The amortization of Intangible Assets with a limited useful life is performed on a straight - line method and residual value of nil. While on Intangible Assets with unlimited period of utilization is not made amortization.

The useful life of Intangible Assets is determined by referring to Decree of the Minister of Finance No. 620/KMK.6/2015 on The Useful life for the Amortization of State Assets in the form of Intangible Assets in Government Entities. In general, the useful life table is as follows:

- 2) Other Assets in the form of government fixed assets that are discontinued from the operational use of the entity and are presented at book value at cost less accumulated depreciation.

6. Liabilities

Liability is a debt arising from past events whose settlement resulted in a flow of government economic resources. Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities.

1) Short-Term Liabilities

An liabilities are classified as a short-term liability if expected to be paid or due within twelve months after the date of reporting. Short-term liabilities in BPK financial management consist of:

1. Payable to Third Parties from:

- Accrued expenditures consisting of employee expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.
- Debt to Other Third Parties which is the contra-account counter from Other Cash in the Spending Treasurer.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

6. Kewajiban (Lanjutan)

1. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari: (Lanjutan)

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh.

Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban yang berasal dari transaksi tagihan yang telah diproses oleh PPK namun belum sampai menjadi Surat Perintah Pembayaran.

3. Utang Kelebihan Pembayaran

Utang Kelebihan Pembayaran adalah kewajiban yang berasal dari kelebihan pembayaran pegawai atau pihak ketiga ke kas negara/satker namun belum dikembalikan kembali ke yang berhak atas kelebihan tersebut.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan diterima dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek.

Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.

5. Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

5. Accounting Policies (Continued)

6. Liabilities (Continued)

1. Payable to Third Parties from: (Continued)

This liabilities accrued because the right to goods/services has been received and enjoyed and/or the commitment agreement has been made by the state ministries/Institutions/government, but until the end of the reporting period has not been paid/settlement/ realization of the rights/ agreements/commitments. Specifically for the accrued capital expenditures does not affect the burden of the operational report, but simultaneously with the recognition of the accrued capital expenditure an asset is recognized.

Thus, if any unearned assets are recognized as liabilities.

At the time of payment of expenditures accrued in the previous year, adjustments are made by debiting the accrued expense account and crediting the expense account on the same date. In the event that the adjustment can not be made on the date of the transaction, it must be calculated at the end of the year to determine the value of the adjusting entries.

2. Unbilled Debt

Unbilled Debt is an obligation originating from a billing transaction that has been processed by the PPK but has not yet become a Payment Order.

3.

Overpayment Debt is an obligation originating from overpayment by employees or third parties to the state treasury/work unit but has not been returned to those entitled to the excess.

4. Deferred Revenues

Revenue received in advance are tax revenues and/or non-tax revenues already received in the state treasury account but are not yet entirely entitled to the government because they are still inherent in the government's obligation to provide future goods/services to third parties or any excess payment by third parties but not been restored. Revenue received in advance at the BPK is in the form of Rental Income Received Upfront. Rental Income Accepted Advance for more than one year is not separated as a separate account whose terms of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year are all recorded as short-term liabilities.

The method of calculating the Rent Revenue received in advance is the amount of remaining days of rental period not used yet by the Third Party divided by the total number of days multiplied by the rent paid by the third party.

5. Advance from The Office of State Treasury Service

The Advance Payment Account of The Office of State Treasury Service is the amount of cash in the Spending Treasurer derived from the Inventory money and Additional Inventory Money used to pay personnel expenditures, goods and capital expenditures.

5. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

6. Kewajiban (Lanjutan)

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari pajak yang sudah dipotong oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Sampai saat ini BPK tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Kebijakan Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian/Descriptions	Estimasi dan Anggaran/ Estimation and Budget	Realisasi (Netto)/ Realization (Neto)	Selisih/ Difference	% Realisasi/ % Realization
Pendapatan/Revenues	16,143,752,000	29,362,424,206	13,218,672,206	181.88
- Penerimaan Negara Bukan Pajak/ Non-Tax Income	16,143,752,000	29,362,424,206	13,218,672,206	181.88

Selama periode Tahun Anggaran 2022, BPK telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awalnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

5. Accounting Policies (Continued)

6. Liabilities (Continued)

6. *Other Short-Term Payable*

Other Short Term payable contra-account is the counter of other Cash and Cash Equivalents account derived from taxes already withheld by the Spending Treasurer but not yet paid to the State Treasury up to the Balance Sheet date.

2) *Long-Term Liabilities*

Liabilities are classified as long-term liabilities if expected to be paid or matured more than twelve months after the date of reporting. Liabilities are recorded at nominal value, which is the value of the government's liabilities at the first transaction. To date, BPK has no Long-Term Liabilities.

7. Equity

Equity represents the difference between assets and liabilities in a period. Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the End of the previous year.

Further disclosures of equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

6. Specific Policy For the Preparation of The 2022 Financial Statement

The preparation of this Financial Statement FY 2022 refers to the Director General of the Treasury Number S-54/PB/PB.6/2022 dated December 29, 2022 regarding the Schedule for Reconciliation, Preparation and Submission of Financial Statements of State Ministries/Institutions (LKKL) FY 2022 and Accounting Treatment for Year-End Transactions.

7. Budget and Realization of Revenues

The budget and realization of revenues TA 2022 are as follows:

During the period of Fiscal Year 2022, BPK has revised the Budget Implementation List (DIPA) from its initial determination. This is due to the government budget refocusing program related to changes in activities according to the needs and situations and conditions at the time of implementation.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

Perubahan estimasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Changes in estimated revenue budget for Fiscal Year 2022 based on revenue sources and types of expenditure are as follows:

No.	Uraian / Description	Estimasi dan Anggaran Awal / Estimates and Budgets in the Beginning	Estimasi dan Anggaran Setelah Revisi / Estimates and Initial Budgets After Revision
1.	Pendapatan / Revenue	16,143,752,000	16,143,752,000
	Penerimaan Negara Bukan Pajak / Non Tax Income	16,143,752,000	16,143,752,000

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada TA 2022 adalah sebesar Rp29.362.424.206 atau mencapai 181,88% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp16.143.752.000. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain.

Actual Revenues and Grants in FY 2022 amounted Rp29,362,424,206 or 181.88% of the estimated revenue of Rp16,143,752,000. This income consists of Revenues from State Property Management, Education Income, Other Service Revenue, Interest Income, Fine Income, and Other Income.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan TA 2022 adalah sebagai berikut:

The details of the estimated and realized revenues of FY 2022 are as follows:

No.	Uraian Pendapatan dan Hibah/ Descriptions Revenues and Grants	Estimasi Pendapatan/ Revenues Estimation	Realisasi Pendapatan/ Revenues Realization	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN/Income from Transfer of State Property (42512)	1,037,887,000	3,007,635,427	289.78
2.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN/Income from Utilization of State Property (42513)	755,713,000	1,150,531,842	152.24
3.	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi/ Income from the Use of Facilities and Infrastructure according to Task and Functions (42515)	1,219,760,000	1,809,587,500	148.36
4.	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi/Accreditation, Testing, Certification, Calibration and Standardization Income (42528)	38,715,000	-	0.00
5.	Pendapatan Pendidikan/Education Income (42541)	50,000,000	-	0.00
6.	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Human Resource Development Revenue (42542)	7,035,600,000	10,152,500,002	144.30
7.	Pendapatan Jasa Lainnya/Other Service Revenues (42569)	6,006,077,000	6,266,868,999	104.34
8.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/National Indemnity Settlement Income (42579)	-	47,930,700	-
9.	Pendapatan Denda/Fine Income (42581)	-	390,033,004	-
10.	Pendapatan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu/Income Return Expenditures of Last Fiscal Year (42591)	-	6,145,673,415	-
11.	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan /Remaining Debt Deposit Income from Pensioners (42593)	-	9,363,290	-
12.	Pendapatan Lain-lain (4259)/Other Income (4259)	-	382,300,027	-
	Jumlah/Total	16,143,752,000	29,362,424,206	181.88

Realisasi pendapatan mencapai 181,88% dari estimasinya yang antara lain berasal dari:

- Adanya pendapatan dari pemindahtanganan BMN dan penjualan peralatan mesin;
- Adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Adanya pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi;
- Adanya pendapatan layanan Pendidikan dan/ atau pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lainnya;
- Adanya pendapatan jasa pengawasan/ pemeriksaan dan jasa lainnya;
- Adanya pendapatan dari penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Pegawai dan Bendahara yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan;

Realized revenue reached 181.88% of the estimate which, among other things, came from:

- There is income from the transfer of State Property, sales of machine tools;
- There is land, building and building rental reviews as well as Use of Facilities and Infrastructure;
- There is income from the use of appropriate facilities and infrastructure with Task and Functions;
- There is income from Education and/or training services and other human resource development;
- There is income from supervision/ inspection services and other services;
- There is income from the state compensation settlement against Officers and Treasurers who are not designated as receiving targets;

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

7. Adanya pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan;
8. Adanya pendapatan dari penyelesaian ganti kerugian negara dan pendapatan denda yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan;
9. Adanya pendapatan setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan;
10. Adanya pendapatan anggaran lain-lain yang tidak ditetapkan sebagai target penerimaan.

Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp181.770.791 atau sebesar 0,62% dari realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.180.653.415.

Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

7. There is income from the state compensation settlement against Officers and Treasurers who are not designated as receiving targets;
8. There is income from the settlement of state compensation and income from fines that are not set as revenue targets;
9. There is income from the settlement of state compensation and income from fines that are not set as revenue targets;
10. There are other budget revenues that are not set as revenue targets.

Revenue for the 2022 Fiscal Year increased by Rp181,770,791 or 0.62% of the realization of Fiscal Year 2021 revenue of Rp29,180,653,415.

Comparison of revenue realization for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 in detail can be seen in the following table:

No.	Uraian Pendapatan dan Hibah/Descriptions of Revenues & Grants	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
a.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN/Income from Transfer of BMN (42512)	3,007,635,427	4,089,971,749	(1,082,336,322)	(26.46)
b.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN/Income from Utilization of BMN (42513)	1,150,531,842	1,091,113,043	59,418,799	5.45
c.	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi/Income from the Use of Facilities and Infrastructure according to Task and Functions (42515)	1,809,587,500	258,565,000	1,551,022,500	599.86
d.	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Human Resource Development Revenue (42542)	10,152,500,002	5,452,075,004	4,700,424,998	86.21
e.	Pendapatan Jasa Lainnya/Other Service Revenues (42569)	6,266,868,999	6,251,830,919	15,038,080	0.24
f.	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/National Indemnity Settlement Income (42579)	47,930,700	74,976,996	(27,046,296)	(36.07)
g.	Pendapatan Denda/Fine Income (42581)	390,033,004	10,359,061	379,673,943	3665.14
h.	Pendapatan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu/Income Return Expenditures of Last Fiscal Year (42591)	6,145,673,415	11,903,371,752	(5,757,698,337)	(48.37)
i.	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan /Remaining Debt Deposit Income from Pensioners (42593)	9,363,290	18,928,240	(9,564,950)	(50.53)
j.	Pendapatan Lain-lain/Other Income (42599)	382,300,027	29,461,651	352,838,376	1,197.62
Jumlah/Total		29,362,424,206	29,180,653,415	181,770,791	0.62

a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

Realisasi Pendapatan Pemindahtanganan BMN pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.007.635.427,00 atau 289,78% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.037.887.000,00. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp1.082.336.322,00 atau 26,46% dari realisasi Pendapatan Pemindahtanganan BMN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.089.971.749,00.

Penurunan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya penurunan pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin;
2. Adanya penurunan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Rincian perbandingan realisasi dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Income from Transfer of BMN

Realization of BMN Transfer Revenue in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp3,007,635,427 or 289.78% of the estimated revenue of Rp1,037,887,000. The realization of this income decreased by Rp1,082,336,322 or 26.46% from the realization of BMN Transfer Revenue for the 2021 Fiscal Year of Rp4,089,971,749.

The decrease in realization of revenues was partly due to:

1. There is a decrease in revenue from the sale of Equipment and Machinery;
2. There is a decrease in Income from Transfer of Other State Property.

The details of the comparison of realization of Sales, Management of State Property, Business Entity Contributions and Receipt of State Property Insurance Claims for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (Lanjutan)

a. Income from Transfer of BMN (Continued)

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin / Revenues from Sales of Tools and Machines	889,567,773	1,069,729,921	(180,162,148)	(16.84)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya / Revenues from Transfer of Other State-Owned Property	2,118,067,654	3,020,241,828	(902,174,174)	(29.87)
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		3,007,635,427	4,089,971,749	(1,082,336,322)	(26.46)
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		3,007,635,427	4,089,971,749	(1,082,336,322)	(26.46)

b. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

b. Income from Utilization of BMN

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.150.531.842 atau 152,24% dari estimasi pendapatan sebesar Rp755.713.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp59.418.799 atau 5,45% dari realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.091.113.043.

Realization of BMN Utilization Revenue in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp1,150,531,842 or 152.24% of the estimated income of Rp755,713,000. The realization of this income has increased by Rp59,418,799 or 5.45% from the realization of BMN Utilization Revenue for the 2021 Fiscal Year of Rp1,091,113,043.

Kenaikan realisasi pendapatan tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan.

The increase in realized revenue was occurred due to an increase in land, building and building rental income.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

The detailed comparison of the realization of BMN Utilization Revenue for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 is as follows:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan/Land, Building and Building Rental Income	1,150,531,842	1,092,333,920	58,197,922	5.33
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		1,150,531,842	1,092,333,920	58,197,922	5.33
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	1,220,877	(1,220,877)	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		1,150,531,842	1,091,113,043	59,418,799	5.45

c. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi

c. Income from the Use of Facilities and Infrastructure according to Task and Functions

Realisasi Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.809.587.500 atau 148,36% dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.219.760.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.551.022.500 atau 599,86% dari realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp258.565.000.

Revenue realization from the use of facilities and infrastructure in accordance with Task and Functions in the 2022 Fiscal Year is Rp1,809,587,500 or 148.36% of the estimated revenue of Rp1,219,760,000. The realization of this income has increased by Rp1,551,022,500 or 599.86% from the realization of BMN Utilization Revenue for the 2021 Fiscal Year of Rp258,565,000.

Kenaikan realisasi pendapatan tersebut disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi.

The increase in realized revenue was due to an increase in Revenue from the Use of Facilities and Infrastructure in accordance with Task and Function.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Details of the comparison of the realization of Revenue from the Use of Facilities and Infrastructure in accordance with Task and Function for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi/Revenue from the Use of Facilities and Infrastructure in accordance with Task and Functions	1,813,177,500	258,565,000	1,554,612,500	601.25
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		1,813,177,500	258,565,000	1,554,612,500	601.25
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		3,590,000	-	3,590,000	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		1,809,587,500	258,565,000	1,551,022,500	599.86

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

d. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Realisasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.152.500.002 atau 144,30% dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.035.600.000 Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.700.424.998 atau 86,21% dari realisasi pendapatan sejenis Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.452.075.004.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya realisasi atas pendapatan pengembangan sumber daya manusia lainnya melalui pelaksanaan Penilaian Administrator, Pengawas Assessment Center, Penilaian kompetensi individu serta Tes Potensi.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan/Revenue from Education and/or Training Services	8,924,345,002	5,452,075,004	3,472,269,998	63.69
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya/Other Human Resources Development Income	1,236,700,000	-	1,236,700,000	-
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		10,161,045,002	5,452,075,004	4,708,969,998	86.37
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		8,545,000	-	8,545,000	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		10,152,500,002	5,452,075,004	4,700,424,998	86.21

e. Pendapatan Jasa Lainnya

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.266.868.999 atau 104,34% dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.006.077.000. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp15.038.080 atau 0,24% dari realisasi pendapatan jasa lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.251.830.919.

Kenaikan ini karena adanya realisasinya pendapatan jasa lainnya yang berasal dari audit fee atas pemeriksaan International Maritime Organization (IMO) dan International Atomic Energy Agency (IAEA) serta pendapatan jasa catering di Badiklat PKN.

Penyetoran *Audit Fee* tersebut dalam valuta Euro dan disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia dengan nomor rekening 600.502991980.

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

d. Human Resource Development Revenue

Realization of Human Resource Development Revenue in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp10,152,500,002 or 144.30% of the estimated revenue of Rp7,035,600,000 This revenue realization increased by Rp4,700,424,998 or 86.21% of the realization similar income for the 2021 Fiscal Year of Rp5,452,075,004.

This is due, among other things, to the realization of other human resource development revenues through the implementation of Administrator Assessments, Assessment Center Supervisors, Individual Competency Assessments and Potential Tests.

Comparison details of Human Resource Development Revenue realization for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

e. Other Service Revenues

Realization of Other Services Revenue in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp6,266,868,999 or 104.34% of the estimated revenue of Rp6,006,077,000. This revenue realization increased by Rp15,038,080 or 0.24% from the realization of other service revenue for the 2021 Fiscal Year of Rp6,251,830,919.

This increase was due to the realization of other service revenues originating from audit fees for inspections by the International Maritime Organization (IMO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) as well as catering service revenue at the PKN Education and Training Center.

The audit fee is deposited in Euro currency and transferred directly into the State General Treasury Account at Bank Indonesia with account number 600.502991980.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

e. Pendapatan Jasa Lainnya (Lanjutan)

Rincian perbandingan realisasi dari Pendapatan Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2021	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan (Pemeriksaan) / Supervision (Inspection) Service Revenue	6,254,958,999	-	6,254,958,999	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya / Other Service Revenue	11,910,000	6,251,830,919	(6,239,920,919)	(99.81)
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		6,266,868,999	6,251,830,919	15,038,080	0.24
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		6,266,868,999	6,251,830,919	15,038,080	0.24

f. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Realisasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp47.930.700, tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp27.046.296 atau 36,07% dari realisasi pendapatan sejenis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp74.976.996.

Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara atau Pejabat Lain/ Settlement Income for State Compensation for Civil Servants who are not Treasurers or Other Officials	33,530,700	60,576,996	(27,046,296)	(44.65)
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara/ State Compensation Settlement Income to the Treasurer	14,400,000	14,400,000	-	-
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		47,930,700	74,976,996	(27,046,296)	(36.07)
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		47,930,700	74,976,996	(27,046,296)	(36.07)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara ini merupakan penerimaan dari PNS sebagai berikut:

- Sebanyak 1 PNS bukan Bendahara yang keluar dari BPK berasal dari Biro SDM sebesar Rp33.530.700.
- Sebanyak 1 PNS Bendahara pada BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp14.400.000.

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

e. Other Service Revenues (Continued)

The details of the comparison of realization of Other Service Revenue for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

f. National Indemnity Settlement Income

The realization of State Compensation Compensation Revenue in the 2022 Fiscal Year is Rp47,930,700, there is no estimated income for this income. The realization of this income decreased by Rp27,046,296 or 36.07% from the realization of similar income for the 2022 Fiscal Year of Rp74,976,996.

This declining was due to a decrease in income from the settlement of state compensation for non-treasurer civil servants or other officials.

Comparison details of the realization of State Compensation Compensation Income for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Realization of State Compensation Settlement Revenues for Civil Servants are receipts from Civil Servants as follows:

- A total of 1 non-treasury civil servants who left the BPK came from the HR Bureau amounting to Rp33,530,700.
- A total of 1 Civil Servants Treasurer at the Representative Office of North Sulawesi Province amounting to Rp14,400,000.

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

g. Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp390.033.004, tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp379.673.943 atau 3.665,14% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.359.061.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Denda Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan / <i>Income of Fines Delayed Completion</i>	390,033,004	10,359,061	379,673,943	3,665.14
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>		390,033,004	10,359,061	379,673,943	3,665.14
Pengembalian Pendapatan / <i>Revenue Returns</i>		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>		390,033,004	10,359,061	379,673,943	3,665.14

Pendapatan Denda ini merupakan kegiatan pekerjaan:

- Adanya denda keterlambatan pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BPK Perwakilan Maluku sebesar Rp366.603.136;
- Adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK di Perwakilan Sulawesi Barat sebesar Rp4.010.625;
- Adanya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah atas kontrak KAP di BPK Perwakilan Sulawesi Utara sebesar Rp14.361.525;
- Adanya denda keterlambatan penyelesaian kontrak jasa tenaga ahli pemeriksaan dan jasa KAP untuk dan atas nama BPK di BPK Perwakilan Gorontalo sebesar Rp4.519.880;
- Adanya denda keterlambatan pengadaan meubleair untuk Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan anggaran dari satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK RI sebesar Rp537.838.

h. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.145.673.415, tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp5.757.698.337 atau 48,37% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.903.371.752.

Penurunan ini diantaranya disebabkan karena penurunan pendapatan sebagai berikut:

- Penurunan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912).
- Penurunan yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913).

Rincian perbandingan realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

g. Fine Income

The realization of fine income in the 2022 Fiscal Year is Rp390,033,004, there is no estimated income for this income. The realization of this income has increased by Rp379,673,943 or 3,665.14% from the realization of similar income in the 2021 Fiscal Year of Rp10,359,061.

The details of the comparison of the realization of Fines Revenue for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

This Fine Income is a work activity:

- There is a fine for delays in the work of the Maluku BPK Representative Office Building Renovation in the amount of Rp366,603,136;
- There is a fine for late completion of KAP which is working for and on behalf of the BPK at the West Sulawesi Representative in the amount of Rp4,010,625;
- There is a fine for late completion of the Government's work on the KAP contract at the BPK North Sulawesi Representative in the amount of Rp14,361,525;
- There is a fine for late completion of the audit expert service contract and KAP services for and on behalf of the BPK at the Gorontalo Representative Office amounting to Rp4,519,880;
- There is a fine for late procurement of furniture for the Southeast Sulawesi Provincial Representative with a budget from the BPK RI Secretariat General work unit of Rp537,838.

h. Income Return Expenditures of Last Fiscal Year

Realization of Income Return Expenditures of Last Fiscal Year in a Fiscal Year 2022 amounted to Rp6,145,673,415, there is no estimated income for this income. The realization of this income decreased by Rp5,757,698,337 or 48.37% from the realization of similar income in the 2021 Fiscal Year of Rp11,903,371,752.

This decrease was partly due to the decrease in income as follows:

- Decrease originating from Goods Expenditure Receipts of Last Fiscal Year (425912).
- Decrease originating from Capital Expenditure Receipts of Last Fiscal Year (425913).

The detailed comparison of the realization of Income Return Expenditures Receipt of Last Fiscal Year for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 is as follows:

7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (Lanjutan)

7. Budget and Realization of Revenues (Continued)

h. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (Lanjutan)

h. Income Return Expenditures of Last Fiscal Year (Continued)

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL / Employee Expenditure Acceptance of Last Fiscal Year	1,647,674,769	817,175,218	830,499,551	101.63
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL / Goods Expenditure Acceptance of Last Fiscal Year	4,497,998,646	6,258,058,934	(1,760,060,288)	(28.12)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL / Capital Expenditure Acceptance of Last Fiscal Year	-	4,828,137,600	(4,828,137,600)	100.00
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		6,145,673,415	11,903,371,752	(5,757,698,337)	(48.37)
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		6,145,673,415	11,903,371,752	(5,757,698,337)	(48.37)

i. Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan

i. Remaining Debt Deposit Income from Pensioners

Realisasi Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.363.290, tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp9.564.950 atau 50,53% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.928.240.

The realization of Remaining Debt Deposit Income from Pensioners in the 2022 Fiscal Year is Rp9,363,290, there is no estimated income for this income. The realization of this income decreased by Rp9,564,950 or 50.53% from the realization of similar income in the 2021 Fiscal Year of Rp18,928,240.

Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan setoran sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS pada Satker Sekretariat Jenderal.

This declining was due to a decrease in income from depositing the remaining non-TP/TGR debt of retired civil servants at the Secretariat General Working Unit.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

The detailed comparison of the realization of Remaining Debt Deposit Income from Pensioners for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 is as follows:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan / Deposit Income from Retired Non TP/TGR Debt	9,363,290	18,928,240	(9,564,950)	(50.53)
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		9,363,290	18,928,240	(9,564,950)	(50.53)
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		9,363,290	18,928,240	(9,564,950)	(50.53)

j. Pendapatan Lain-lain

j. Other Income

Realisasi Pendapatan Lain-lain pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp382.300.027,00, tidak ada estimasi pendapatan untuk pendapatan ini. Realisasi pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp352.838.376,00 atau 1.197,62% dari realisasi pendapatan sejenis pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.461.651,00. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan pendapatan anggaran lain-lain pada Satker BPK Pusat.

Realization of Other Income in the 2022 Fiscal Year is Rp 382,300,027.00, there is no estimated income for this income. The realization of this income increased by Rp 352,838,376.00 or 1,197.62% from the realization of similar income in the 2021 Fiscal Year of Rp 29,461,651.00. This increase was due to an increase in other budget revenues at the Central BPK Work Unit.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Comparison details of the realization of Other Income for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
425999	Pendapatan Anggaran Lain/ Other Budget Income	382,300,027	29,461,651	352,838,376	1,197.62
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		382,300,027	29,461,651	352,838,376	1,197.62
Pengembalian Pendapatan / Revenue Returns		-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		382,300,027	29,461,651	352,838,376	1,197.62

8. Anggaran dan Realisasi Belanja

8. Budget and Realization of Expenditures

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

The budget and realization of expenditure FY 2022 are as follows:

Kode/ Code	Uraian / Descriptions	Estimasi dan Anggaran /	Realisasi (Neto)/	% Realisasi /
		Estimation and Budget	Realization (Neto)	% Realization
51	Belanja Pegawai / Employee Expenditure	2,482,829,359,000	2,482,009,259,987	99.97%
52	Belanja Barang / Goods Expenditure	1,389,286,524,000	1,384,569,349,796	99.66%
53	Belanja Modal / Capital Expenditure	130,227,620,000	130,052,787,381	99.87%
	Total Belanja Bruto / Total of Gross Expenditure	4,002,343,503,000	3,996,631,397,164	99.86%
	Pengembalian Belanja / Returns of Expenditure	-	8,052,805,785	100.00%
	Total Belanja Neto / Total of Net Expenditure	4,002,343,503,000	3,988,578,591,379	99.66%

Perubahan estimasi belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan sumber belanja dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Changes in estimated expenditure budget for Fiscal Year 2022 based on expenditure sources and types of expenditure are as follows:

No	Uraian / Descriptions	Estimasi dan Anggaran Awal / Estimation and Initial Budgets	Estimasi dan Anggaran Setelah Revisi/Estimation and Budget After Revision
1	Belanja / Expenditure	3,729,970,350,000	4,002,343,503,000
	Belanja Pegawai / Employee Expenditure	2,318,754,799,000	2,482,829,359,000
	Belanja Barang / Goods Expenditure	1,314,515,043,000	1,389,286,524,000
	Belanja Modal / Capital Expenditure	96,700,508,000	130,227,620,000

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.988.578.591.379 atau 99,66% dari anggaran belanja sebesar Rp4.002.343.503.000.

Expenditure realization in the 2022 Fiscal Year is Rp3,988,578,591,379 or 99.66% of the spending budget of Rp4,002,343,503,000.

Penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2022, penyerapan anggaran ini mendapat nilai 96,47.

Assessment based on the Budget Implementation Performance Indicator (IKPA) for Fiscal Year 2022, the absorption of this budget received a score of 96.47.

Rincian anggaran dan realisasi belanja serta pengembalian belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

The details of the budget and realization of expenditures and the return of the 2022 fiscal year are as follows:

Kode / Code	Uraian / Descriptions	Tahun Anggaran / Fiscal Year 2022		
		Anggaran / Budget	Realisasi/Realization	%
51	Belanja Pegawai / Employee Expenditure	2,482,829,359,000	2,482,009,259,987	99.97%
52	Belanja Barang / Goods Expenditure	1,389,286,524,000	1,384,569,349,796	99.66%
53	Belanja Modal / Capital Expenditure	130,227,620,000	130,052,787,381	99.87%
	Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue	4,002,343,503,000	3,996,631,397,164	99.86%
	Pengembalian Belanja / Expenditure Returns	-	8,052,805,785	100.00%
	Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue	4,002,343,503,000	3,988,578,591,379	99.66%

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Details of the budget and expenditures realization by program type shown in the following table:

Kode / Code	Uraian / Descriptions	Anggaran / Budget	Realisasi/Realization (Neto)	%
C1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara / State Financial Audit Program	3,342,975,298,000	3,330,060,759,623	99.61%
WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis / Management Support Program and Technical Task Execution	659,368,205,000	658,517,831,756	99.87%
	Jumlah / Total	4,002,343,503,000	3,988,578,591,379	99.66%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp320.863.741.342 atau 8,75% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.667.714.850.037 dengan rincian sebagai berikut:

Expenditure realization for the 2022 Fiscal Year increased by Rp320,863,741,342 or 8.75% of the realized expenditure for the 2021 Fiscal Year of Rp3,667,714,850,037 with the following details:

No.	Uraian Jenis Belanja/Descriptions of Expenditures	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
1.	Belanja Pegawai/Employee Expenditures	2,480,883,932,348	2,092,217,889,692	388,666,042,656	18.58
2.	Belanja Barang/Goods Expenditures	1,377,641,871,650	1,404,354,916,271	(26,713,044,621)	(1.90)
3.	Belanja Modal/Capital Expenditures	130,052,787,381	171,142,044,074	(41,089,256,693)	(24.01)
	Jumlah/Total	3,988,578,591,379	3,667,714,850,037	320,863,741,342	8.75

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

Kenaikan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja barang karena terdapat penyesuaian grade jabatan serta perjalanan dinas pemeriksaan dalam rangka tugas dan fungsi pokok BPK.

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.480.883.932.348 atau 99,97% dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.482.829.359.000.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp388.666.042.656 atau 18,58% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.092.217.889.692.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja gaji & tunjangan PNS serta belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transit karena terdapat penyesuaian grade jabatan sebagai dampak peralihan dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional, pengangkatan CPNS, dan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS / <i>Expenditures for salaries & allowances for civil servants</i>	505,954,240,853	434,198,776,456	71,755,464,397	16.53
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara / <i>Expenditures for salaries & allowances for state officials</i>	3,393,875,514	3,587,694,187	(193,818,673)	(5.40)
5122	Belanja Lembur / <i>Overtime Expenditure</i>	6,010,840,000	7,070,315,000	(1,059,475,000)	(14.98)
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transit / <i>Special Allowance Expenditures & Transit Employee Expenditures</i>	1,966,650,303,620	1,648,951,025,780	317,699,277,840	19.27
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		2,482,009,259,987	2,093,807,811,423	388,201,448,564	18.54
Pengembalian Belanja / <i>Expenditure Returns</i>		1,125,327,639	1,589,921,731	(464,594,092)	(29.22)
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		2,480,883,932,348	2,092,217,889,692	388,666,042,656	18.58

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp1.125.327.639 terdiri dari:

- 1) Pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp420.085.088;
- 1) Pengembalian belanja uang lembur sebesar Rp10.541.700;
- 2) Pengembalian belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transit sebesar Rp694.700.851.

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2022 adalah sebesar Rp1.377.641.871.650 atau 99,66% dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp1.389.286.524.000. Realisasi Belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp26.713.044.621 atau 1,90% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.404.354.916.271.

Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya:

- 1) Penurunan realisasi belanja operasional untuk mendukung kegiatan pemeriksaan;
- 2) Penurunan realisasi belanja non operasional untuk mendukung pemeriksaan;
- 3) Penurunan realisasi belanja persediaan untuk mendukung pemeriksaan
- 4) Penurunan realisasi belanja jasa untuk mendukung pemeriksaan;
- 5) Penurunan realisasi belanja pemeliharaan untuk mendukung pemeriksaan.

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

The increase in actual spending for the 2022 Fiscal Year compared to actual spending for the 2021 Fiscal Year was partly due to an increase in actual spending on personnel and goods spending due to adjustments to position grades and inspection official travel within the framework of BPK's main duties and functions.

a. Employee Expenditures

Realization of Personnel Expenditure in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp2,480,883,932,348 or 99.97% of the Employee Expenditure budget of Rp2,482,829,359,000.

The realization of Personnel Expenditures for the 2022 Fiscal Year has increased by Rp388,666,042,656 or 18.58% of the actual Personnel Expenditures for the 2021 Fiscal Year in the amount of Rp2,092,217,889,692.00

This was due to an increase in the realization of civil servant salary & allowance expenditure as well as special allowance spending & transit employee expenditure due to an adjustment in position grade as a result of the transition from Executive Position to Functional Position, civil servant appointment, and civil servant candidates appointment to become civil servant.

The details of the comparison of realization of employee Expenditure for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Realization of Employee Expenditure Returns for 2022 amounting to Rp1,125,327,639 consisting of:

- 1) Returns on civil servant salary and allowance expenditure of Rp218,298,551;
- 1) Refunds for spending overtime of Rp10,541,700;
- 2) Returns on special allowances and personnel expenditure for Rp694,700,851.

b. Goods Expenditures

Realization of Goods Expenditures in 2022 amounted to Rp1,377,641,871,650 or 99.66% of the Goods Expenditures budget of Rp1,389,286,524,000. The realization of this expenditure decreased by Rp26,713,044,621 or 1.90% compared to the realization in 2021 of Rp1,404,354,916,271.

This is due, among other things, to:

- 1) Decrease in the realization of operational expenditure to support audit activities;
- 2) Decrease in the realization of non-operational spending to support audits;
- 3) Decrease in actual inventory spending to support audits;
- 4) Decrease in actual spending on services to support audits;
- 5) Decrease in realization of maintenance spending to support audits.

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

b. Belanja Barang (Lanjutan)

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
5211	Belanja Barang Operasional/ <i>Operational Goods Expenditure</i>	138,216,457,139	145,651,918,266	(7,435,461,127)	(5.10)
5212	Belanja Barang Non Operasional/ <i>Non-Operational Goods Expenditure</i>	260,935,568,961	273,026,925,531	(12,091,356,570)	(4.43)
5218	Belanja Barang Persediaan/ <i>Inventory Expenditure</i>	26,478,106,370	39,685,358,276	(13,207,251,906)	(33.28)
5221	Belanja Jasa/ <i>Service Expenditure</i>	188,346,681,280	216,277,978,304	(27,931,297,024)	(12.91)
5231	Belanja Pemeliharaan/ <i>Maintenance Expenditure</i>	148,530,697,474	151,787,298,065	(3,256,600,591)	(2.15)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri/ <i>Domestic Travel Expenditures</i>	571,981,095,060	559,583,024,750	12,398,070,310	2.22
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri/ <i>Overseas Travel</i>	50,080,743,512	25,773,853,768	24,306,889,744	94.31
Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue		1,384,569,349,796	1,411,786,356,960	(27,217,007,164)	(1.93)
Pengembalian Belanja / <i>Expenditure Returns</i>		6,927,478,146	7,431,440,689	(503,962,543)	(6.78)
Realisasi Pendapatan Neto / Realized Net Revenue		1,377,641,871,650	1,404,354,916,271	(26,713,044,621)	(1.90)

Realisasi Pengembalian Belanja Barang TA 2022 adalah sebesar Rp6.927.478.146 terdiri dari:

- 1) Pengembalian Belanja Barang Operasional sebesar Rp409.180.100;
- 2) Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp280.827.325;
- 3) Pengembalian Belanja Barang Persediaan sebesar Rp6;
- 4) Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp21.971.166;
- 5) Pengembalian Belanja Pemeliharaan sebesar Rp43.593.866;
- 6) Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp5.591.045.130;
- 7) Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp580.860.553;

Pada Tahun Anggaran 2022 BPK mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp14.290.679.000 dengan realisasi sebesar Rp14.065.744.289 atau 98,43%, yang terdiri dari:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	Anggaran / Budget	Realisasi/ Realization	%
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Expenditure on Operational Goods-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	2,747,735,000	2,738,079,737	99.65
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Expenditure on Non Operational Goods-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	2,682,254,000	2,621,581,662	97.74
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Expenditure for Supplies-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	5,330,868,000	5,323,623,301	99.86
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Expenditure for Services-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	3,031,440,000	2,884,232,589	95.14
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Expenditure for Building and Properties Maintenance-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	35,192,000	35,187,000	99.99
524115	Belanja Perjalanan Dalam Negeri-Penanganan Pandemi COVID-19/ <i>Domestic Travel Expenditures-Handling the COVID-19 Pandemic</i>	463,190,000	463,040,000	99.97
Jumlah / Total		14,290,679,000	14,065,744,289	98.43

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

b. Goods Expenditures (Continued)

The details of the comparison of realization of Goods Spending for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Realization of Return on Expenditures for Goods in 2022 amounting to Rp6,927,478,146 consists of:

- 1) Return of Operational Goods Expenditure of Rp409,180,100;
- 2) Returns on Non-Operational Goods Expenditure of Rp280,827,325;
- 3) Return of Supplies Expenditure of Rp6;
- 4) Return of Service Expenditures of Rp21,971,166;
- 5) Return of Maintenance Expenditures of Rp43,593,866;
- 6) Refunds for Domestic Travel Expenditure of Rp5,591,045,130;
- 7) Refunds for Overseas Travel Expenditure of Rp580,860,553;

In the 2022 Fiscal Year, BPK allocated goods expenditure for handling the COVID-19 pandemic in the amount of Rp14,290,679,000 with a realization of Rp14,065,744,289 or 98.43%, which consists of:

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

b. Belanja Barang (Lanjutan)

Realisasi Belanja Barang (52) yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp1.591.007.261 terdiri dari:

1) Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	39,416,100
2) Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	384,805,765
3) Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	993,144,896
4) Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan Ekstrakomtabel	19,702,500
5) Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya Ekstrakomtabel	153,938,000
	1,591,007,261

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp130.052.787.381 atau 99,87% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp130.227.620.000. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp41.089.256.693 atau 24,01% dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp171.142.044.074.

Hal ini antara lain disebabkan pada tahun 2022 terdapat pelaksanaan pekerjaan fisik berupa renovasi ruangan kerja pada Kantor Pusat untuk menunjang tugas dan fungsi pokok BPK.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
				Rp	%
5311	Belanja Modal Tanah / <i>Land Capital Expenditure</i>	443,578,781	-	443,578,781	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin / <i>Capital Expenditure for Equipment and Machinery</i>	108,729,164,673	120,622,708,117	(11,893,543,444)	(9.86)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan / <i>Properties and Building Capital Expenditure</i>	10,029,096,955	40,997,478,618	(30,968,381,663)	(75.54)
5361	Belanja Modal Lainnya/ <i>Other Capital Expenditures</i>	10,850,946,972	9,590,057,339	1,260,889,633	13.15
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>		130,052,787,381	171,210,244,074	(41,157,456,693)	(24.04)
<i>Pengembalian Belanja / Expenditure Returns</i>		-	68,200,000	(68,200,000)	100.00
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>		130,052,787,381	171,142,044,074	(41,089,256,693)	(24.01)

1) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp443.578.781 atau 100,00% dari anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp443.579.000. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp443.578.781 dari realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 tidak dianggarkan belanja modal tanah. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah / <i>Capital Expenditures for Backfill and Land Development</i>	443,578,781	-	443,578,781	-
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>	443,578,781	-	443,578,781	-
<i>Pengembalian Belanja / Expenditure Returns</i>	-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>	443,578,781	-	443,578,781	-

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

b. Goods Expenditures (Continued)

Realization of Goods Expenditures (52) capitalized to property and equipment amounting to Rp1,591,007,261 consists of:

Capitalization of Equipment and Machinery	39,416,100
Capitalization of Properties and Buildings	384,805,765
Capitalization of Equipment and Machinery Extracomptables	993,144,896
Capitalization of Properties and Buildings Extracomptables	19,702,500
Capitalization of Other Fixed Assets Extracomptables	153,938,000
	1,591,007,261

c. Capital Expenditures

Realization of Capital Expenditure in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp130,052,787,381 or 99.87% of the Capital Expenditure budget of Rp130,227,620,000. The realization of Capital Expenditures for Fiscal Year 2022 experienced a decrease of Rp41,089,256,693 or 24.01% of the realization of Capital Expenditures for Fiscal Year 2021 of Rp171,142,044,074.

This is partly due to the fact that in 2022 there will be physical work carried out in the form of renovation of work rooms at the Head Office to support BPK's main tasks and functions.

The details of the comparison of realization of Capital Expenditure for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

1) *Land Capital Expenditure*

Realization of Land Capital Expenditure in Fiscal Year 2022 is Rp443,578,781 or 100.00% of the Land Capital Expenditure budget of Rp443,579,000. Realization of Land Capital Expenditure for Fiscal Year 2022 increased by Rp443,578,781 from realization of Capital Expenditure on Land for Fiscal Year 2021 of Rp0. This is because in 2021 land capital expenditures are not budgeted. The details of the comparison of the realization of Capital Expenditures for Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp108.729.164.673 atau 99,88% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp108.865.026.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp11.825.343.444 atau 9,81% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp120.554.508.117. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat pengadaan belanja modal kendaraan dinas dan inventaris kantor untuk mendukung kegiatan operasional BPK.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin / <i>Capital Expenditures for Equipment and Machinery</i>	98,888,351,874	111,973,670,621	(13,085,318,747)	(11.69)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 / <i>Capital Expenditures for Equipment and Machinery Handling the COVID-19 Pandemic</i>	21,000,000	1,235,462,200	(1,214,462,200)	(98.30)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin / <i>Value Added Expenditures for Equipment and Machinery</i>	9,819,812,799	7,413,575,296	2,406,237,503	32.46
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>	108,729,164,673	120,622,708,117	(11,893,543,444)	(9.86)
Pengembalian Belanja / <i>Expenditure Returns</i>	-	68,200,000	(68,200,000)	100.00
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>	108,729,164,673	120,554,508,117	(11,825,343,444)	(9.81)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.729.164.673 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

1 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	108,467,867,964	<i>Capitalization of Equipment and Machinery</i>
2 Kapitalisasi pada Jaringan	178,630,000	<i>Capitalization of the Networks</i>
3 Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	39,722,840	<i>Capitalization of the Fixed Asset - Others</i>
4 Kapitalisasi pada KDP	17,500,000	<i>Capitalization of Construction on Progress</i>
5 Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	32,694,700	<i>Capitalization of Equipment and Machinery - Extracomptable</i>
6 Kelebihan pendetilan PM	(7,250,831)	<i>Advantages of PM detailing</i>
Jumlah	108,729,164,673	Total

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.029.096.955 atau 99,65% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.064.370.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 ini mengalami penurunan sebesar Rp30.968.381.663 atau 75,54% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.997.478.618,

Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat pelaksanaan pekerjaan fisik berupa renovasi ruangan kerja pada Kantor Pusat untuk menunjang tugas dan fungsi pokok BPK.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

c. Capital Expenditures (Continued)

2) *Capital Expenditures for Equipment and Machinery*

Realization of Equipment and Machinery Capital Expenditure in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp108,729,164,673 or 99.88% of the Equipment and Machinery Capital Expenditure budget of Rp108,865,026,000. The realization of Capital Expenditure for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2022 decreased by Rp11,825,343,444 or 9.81% from the realization for Capital Expenditure for Equipment and Machinery for Fiscal Year 2021 amounting to Rp120,554,508,117. This is because in year 2021 there was a procurement of capital expenditure for official vehicles and office inventory to support BPK's operational activities.

The details of the comparison of realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

Realization of Capital Expenditure for Equipment and Machinery in Fiscal Year 2022 amounting to Rp108,729,164,673 is capitalized on the following assets:

3) *Capital Expenditures for Buildings and Properties*

Realization of Capital Expenditures for Buildings and Buildings in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp10,029,096,955 or 99.65% of the Capital Expenditures for Buildings and Buildings budget of Rp10,064,370,000. Realization of Capital Expenditures for Buildings and Buildings for the 2022 Fiscal Year decreased by Rp30,968,381,663 or 75.54% of the realization for Capital Expenditures for Buildings and Buildings for Fiscal Year 2022 amounting to Rp40,997,478,618.

This is due to the fact that in 2021 there will be physical work carried out in the form of renovating work rooms at the Head Office to support BPK's main tasks and functions.

The details of the comparison of realization of Capital Expenditures for Buildings and Properties Fiscal Year 2022 and Fiscal Year 2021 are as follows:

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

c. Capital Expenditures (Continued)

Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan / <i>Capital Expenditures for Buildings and Properties</i>	380,056,750	11,584,936,810	(11,204,880,060)	(96.72)
Belanja Modal Peralatan dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 / <i>Capital Expenditures for Buildings and Properties Handling the COVID-19 Pandemic</i>	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan / <i>Value Added Expenditures for Buildings and Properties</i>	9,649,040,205	29,412,541,808	(19,763,501,603)	(67.19)
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>	10,029,096,955	40,997,478,618	(30,968,381,663)	(75.54)
Pengembalian Belanja / <i>Expenditure Returns</i>	-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>	10,029,096,955	40,997,478,618	(30,968,381,663)	(75.54)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.029,096.955 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

1 Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	8,523,312,165
2 Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	484,501,902
3 Kapitalisasi pada KDP	1,021,282,888
Jumlah	10,029,096,955

Realization of Capital Expenditure for Buildings and Properties in Fiscal Year 2022 amounting to Rp10,029,096,955 is capitalized on the following assets:

<i>Capitalization of Buildings and Properties</i>	8,523,312,165
<i>Capitalization of Renovation Assets</i>	484,501,902
<i>Capitalization of Construction on Progress</i>	1,021,282,888
<i>Total</i>	10,029,096,955

4) Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp10.850.946.972 atau 99,97% dari anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar Rp10.854.645.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2022 ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.260.889.633 atau 13,15% dari realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.590.057.339.

4) *Other Capital Expenditures*

Realization of Other Capital Expenditure in the 2022 Fiscal Year amounted to Rp10,850,946,972 or 99.97% of the Other Capital Expenditure budget of Rp10,854,645,000. The realization of Other Capital Expenditure for the 2022 Fiscal Year experienced an increase of Rp1,260,889,633 or 13.15% of the realization of Other Capital Expenditure for the 2021 Fiscal Year of Rp9,590,057,339.

Hal ini disebabkan adanya peningkatan kebutuhan aset lainnya di tahun 2022.

This is due to an increase in the need for other assets in 2022.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

The details of the comparison of realization of Other Capital Expenditures of the 2022 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year are as follows:

Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	
			Rp	%
Belanja Modal Lainnya / <i>Other Capital Expenditures</i>	4,603,843,357	5,641,420,339	(1,037,576,982)	(18.39)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / <i>Value Added Expenditures for Other Fixed Assets</i>	6,247,103,615	3,948,637,000	2,298,466,615	58.21
Realisasi Pendapatan Bruto / <i>Realized Gross Revenue</i>	10,850,946,972	9,590,057,339	1,260,889,633	13.15
Pengembalian Belanja / <i>Expenditure Returns</i>	-	-	-	-
Realisasi Pendapatan Neto / <i>Realized Net Revenue</i>	10,850,946,972	9,590,057,339	1,260,889,633	13.15

8. Anggaran dan Realisasi Belanja (Lanjutan)

c. Belanja Modal (Lanjutan)

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.850.946.972 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	533,285,424
2	Kapitalisasi pada ATR	2,591,171,115
3	Kapitalisasi pada Software	4,089,217,800
4	Kapitalisasi pada Lisensi	3,377,282,896
5	Kapitalisasi pada Aset Tak Berwujud Lainnya	259,989,737
	Jumlah	10,850,946,972

Pada Tahun Anggaran 2022 BPK mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp21.450.000 dengan realisasi sebesar Rp21.000.000 atau 97,90%.

Kode Akun	Uraian / Descriptions	Anggaran/Budget	Realisasi/Realization	%
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 / Capital Expenditure for Equipment and Machinery - Handling the COVID-19 Pandemic	21,450,000	21,000,000	97.90
	Jumlah / Total	21,450,000	21,000,000	97.90

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp450 dan Rp0 terjadi kenaikan sebesar Rp450.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kode/Code	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)
01	Badan Pemeriksa Keuangan/Audit board of the Republic of Indonesia	450	-	450
	Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue	450	-	450

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp450 disebabkan kesalahan penulisan nominal pada billing penyetoran sisa Uang Persediaan TA 2022 yang seharusnya sebesar Rp47.241.834 namun tertulis sebesar Rp47.241.384. Atas sisa saldo Kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan NTPN FF6200JSRC3AHKFI tanggal 04 Januari 2023.

10. Kas Lainnya dan Setara Kas

	31 Desember/December 31, 2022	2021
Pendapatan yang Belum Disetorkan ke Kas Negara	633,663,770	1,315,151,956
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	113,195,720	142,144,654
Dana Pihak Ketiga	881,036,980	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	11,621,773	88,839,290
Jumlah	1,639,518,243	1,546,135,900

8. Budget and Realization of Expenditures (Continued)

c. Capital Expenditures (Continued)

Realization of Other Capital Expenditure in 2022 Fiscal Year amounting to Rp10.850,946,972 is capitalized on the following assets:

	533,285,424	Capitalization of Other Fixed Asset
	2,591,171,115	Capitalization of ATR
	4,089,217,800	Capitalization of Software
	3,377,282,896	Capitalization of License
	259,989,737	Capitalization of Other Intangible Asset
	10,850,946,972	Jumlah

In the 2022 Fiscal Year, BPK allocated capital expenditures for handling the COVID-19 pandemic amounting to Rp21.450.000 with a realization of Rp21,000,000 or 97.90%.

9. Cash in the Spending Treasurer

Cash Balance in the Spending Treasurer as of December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively Rp. 450 and Rp. 0, there was an increase of Rp. 450.

Cash in the Spending Treasurer is cash controlled, managed, and under the responsibility of the Spending Treasurer originating from the remaining UP/TUP that has not been accounted for or deposited back into the State Treasury as of the balance sheet date.

The cash balance at the Spending Treasurer was Rp 450 due to an error in writing the nominal in the billing for depositing the remaining 2022 FY Supplies which should have been Rp47,241,834 but was written Rp 47,241,384. The remaining cash balance has been deposited into the State Treasury with NTPN FF6200JSRC3AHKFI on January 4, 2023.

10. Other Cash and Cash Equivalent

Unpaid Revenue to the State Treasury
 Payable to Other Third Parties
 Third Party Funds
 Other Short-Term Payables
Total

10. Kas Lainnya dan Setara Kas (Lanjutan)

10. Other Cash and Cash Equivalent (Continued)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.639.518.243 dan Rp1.546.135.900 terjadi kenaikan sebesar Rp93.382.343 atau 6,04%.

Balance of Other Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2022 and December 31, 2021, amounting to Rp1,639,518,243 and Rp1,546,135,900, respectively, an increase of Rp93,382,343 or 6.04%.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Other Cash and Cash Equivalents are cash which are under the responsibility of the expenditure treasurer that are not derived from the UP/TUP, whether bank account balances or cash.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan telah dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya adalah sebagai berikut:

Other Cash Balances and Cash Equivalents that have been deposited into the State Treasury and have been paid to other third parties are as follows:

- a. Pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2022

- a. Income that has been paid to the State Treasury until December 31, 2022

Kode/ Code	Uraian Eselon I / Echelon I Description	Saldo Kas/ Cash Balance	Mutasi/ Mutation	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara/Remaining Cash Not Paid to the State Treasury
01	Badan Pemeriksa Keuangan / Audit board of the Republic of Indonesia	1,315,151,656	681,487,886	633,663,770
Jumlah / Total		1,315,151,656	681,487,886	633,663,770

Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara setelah tanggal neraca sebesar Rp633.663.770 berasal dari :

The remaining cash that has not been deposited into the State Treasury after the balance sheet date amounting to Rp633,663,770 comes from:

- 1) Satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp75.326.334;
 2) Satuan kerja BPK Pusat sebesar Rp558.337.436.

- 1) Secretariat General work unit of Rp75,326,334;
 2) Central BPK work unit of Rp558,337,436.

- b. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022:

- b. Payment of Debts to Other Third Parties up to December 31, 2022:

Kode/ Code	Uraian Eselon I / Echelon I Description	Saldo Kas/ Cash Balance	Mutasi/ Mutation	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara/Remaining Cash Not Paid to the State Treasury
01	Badan Pemeriksa Keuangan / Audit board of the Republic of Indonesia	142,389,444	29,193,724	113,195,720
Jumlah / Total		142,389,444	29,193,724	113,195,720

Sisa kas yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga setelah tanggal neraca sebesar Rp113.195.720 berasal dari:

The remaining cash that has not been paid to third parties after the balance sheet date amounting to Rp113,195,720 comes from:

- 1) Satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.375.000;
 2) Satuan kerja BPK Pusat sebesar Rp9.836.020;
 3) Satuan kerja Badan Diklat PKN BPK RI sebesar Rp97.984.700.

- 1) Secretariat General work unit of Rp5,375,000;
 2) Central BPK work unit of Rp9,836,020;
 3) The work unit of the BPK RI PKN Training Agency is Rp97,984,700.

- c. Pembayaran Dana Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2022:

- c. Payment of Third Party Funds until 31 December 2022:

Kode/ Code	Uraian Eselon I / Echelon I Description	Saldo Kas/ Cash Balance	Mutasi/ Mutation	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara/Remaining Cash Not Paid to the State Treasury
01	Badan Pemeriksa Keuangan / Audit board of the Republic of Indonesia	-	881,036,980	881,036,980
Jumlah / Total		-	881,036,980	881,036,980

Sisa kas yang belum dibayarkan setelah tanggal neraca sebesar Rp881.036.980 berasal dari:

The remaining unpaid cash after the balance sheet date of Rp881,036,980 came from:

- 1) Satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp77.357.801;
 2) Satuan kerja BPK Pusat sebesar Rp803.679.179.

- 1) Secretariat General work unit of Rp77,357,801;
 2) Central BPK work unit of Rp803,679,179.

10. Kas Lainnya dan Setara Kas (Lanjutan)

10. Other Cash and Cash Equivalent (Continued)

- c. Penyetoran Utang Jangka Pendek Lainnya ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2022

- c. *Deposit of Other Short Term Debt to the State Treasury until 31 December 2022*

Kode/ Code	Uraian Eselon I / Echelon I Description	Saldo Kas/ Cash Balance	Mutasi/ Mutation	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara/Remaining Cash Not Paid to the State Treasury
01	Badan Pemeriksa Keuangan / <i>Audit board of the Republic of Indonesia</i>	88,839,290	77,217,517	11,621,773
Jumlah / Total		88,839,290	77,217,517	11,621,773

Sisa kas yang belum disetor ke Kas Negara setelah tanggal neraca sebesar Rp11.621.773 berasal dari satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

The remaining cash that has not been deposited into the State Treasury after the balance sheet date amounting to Rp11,621,773 comes from the BPK Representative for Gorontalo Province work unit.

11. Belanja Dibayar Dimuka

11. Prepaid Expenditure

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Belanja Barang Dibayar Dimuka	1,350,294,826	971,350,946	<i>Prepaid Goods Expenditure</i>
Belanja Modal Dibayar Dimuka	-	759,927,568	<i>Prepaid Capital Expenditure</i>
Jumlah	1,350,294,826	1,731,278,514	Total

Saldo Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.350.294.826 dan Rp1.731.278.514, terjadi penurunan sebesar Rp380.983.688 atau 22,01%.

The balance of Prepaid Expenditures as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp1,350,294,826 and Rp1,731,278,514, respectively, an decrease of Rp380,983,688 or 22.01%.

Belanja Dibayar di muka berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Prepaid Expenditures are derived from the actual expenditure of the reporting year, but goods/services/facilities from third parties have not been fully received/used by the working unit.

- a. Belanja Barang Dibayar di Muka

- a. *Prepaid Goods Expenditures*

Saldo Belanja Barang Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.350.294.826 dan Rp971.350.946, terjadi kenaikan sebesar Rp378.943.880 atau 39,01%.

The balance of Prepaid Goods Expenditure as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp1,350,294,826 and Rp971,350,946, respectively, an increase of Rp378,943,880 or 39.01%.

Rincian penambahan dan pengurangan Belanja Barang Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Details of the addition and subtraction of Prepaid Goods Expenditure are as follows:

11. Belanja Dibayar Dimuka (lanjutan)

11. Prepaid Expenditure (continued)

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	971,350,946	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Mutation Add
Nilai biaya perpanjangan lisensi dibawah satu tahun yang belum digunakan pada Satker Sekretariat Jenderal BPK RI	981,325,128	The value of the license renewal fee for under one year that has not been used at the Secretariat General's Working Unit BPK RI
Nilai sewa domain bpk-ri.com yang belum digunakan pada Satker Sekretariat Jenderal BPK RI	1,049,098	Unused bpk-ri.com domain rental value at the Secretariat General's Working Unit BPK RI
Nilai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum digunakan pada Satker Sekretariat Jenderal BPK RI	5,901,218	Value of fees for unused radio frequency spectrum at the Secretariat General Satker BPK RI
Nilai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang belum digunakan pada Satker BPK Perwakilan Sumatera Utara	543,604	Value of fees for unused radio frequency spectrum at the North Sumatera Province
Nilai sewa frekuensi handy talky yang belum digunakan pada Satker BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1,162,009	The rental value of handy talky frequencies that have not been used at the BPK Representative of the Riau Archipelago Province
Nilai sewa rumah dinas yang belum digunakan pada Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	20,794,521	The rental value of the official house that has not been used at the BPK Representative of North Kalimantan
Nilai sisa kontrak sesuai Surat Perjanjian Nomor 10/SP/PPK-AT/XIX.TER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah dibayarkan per 31 Desember 2022 pada satker BPK Perwakilan Maluku Utara	339,519,248	The remaining value of the contract is in accordance with the Letter of Agreement Number 10/SP/PPK-AT/XIX.TER/XI/2022 dated 16 November 2022 which was paid as of 31 December 2022 to the North Maluku Representative BPK
Total Mutasi Tambah	1,350,294,826	Total Mutation Add
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Jurnal balik 2 Januari 2022 nilai biaya perpanjangan lisensi dibawah satu tahun yang belum digunakan per 31 Desember 2021 pada Satker Sekretariat Jenderal	733,639,186	Journal return January 2, 2022 the value of the license renewal fee under one year that has not been used as of December 31, 2021 at the Secretariat General
Jurnal balik 2 Januari 2022 nilai sewa domain bpk-ri.com yang belum digunakan per 31 Des 2021 pada Satker Sekretariat Jenderal	1,343,199	Journal return January 2, 2022 unused bpk-ri.com domain lease value as of December 31, 2021 at the Secretariat General
Jurnal balik 2 Januari 2022 nilai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio/handy talkie yang belum digunakan per 31 Des 2021 pada Satker Sekretariat Jenderal, BPK Perwakilan Sumatera Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	7,617,662	Journal return January 2, 2022 the value of the right to use the radio frequency spectrum/handy talkie that has not been used as of December 31, 2021 at the Secretariat General, North Sumatra BPK Representative and Riau Archipelago Province Representative BPK
Jurnal balik 2 Januari 2022 nilai sewa rumah dinas yang belum digunakan pada per 31 Desember 2021 pada Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat	108,955,399	Journal return January 2, 2022 value of official housing rental that has not been used as of December 31, 2021 at the BPK Representative of the Provinces of North Kalimantan and West Sulawesi
Jurnal balik 2 Januari 2022 nilai biaya repatriasi (karantina) atas pegawai yang melakukan pemeriksaan interim LKPP Kemenag dan Kemenlu yang belum digunakan per 31 Desember 2021 pada Satker BPK Pusat	119,795,500	Journal return January 2, 2022 the value of repatriation (quarantine) costs for employees who carry out interim inspections of the Ministry of Religion and Ministry of Foreign Affairs' LKPP that have not been used as of December 31, 2021 at the Central BPK
Total Mutasi Kurang	971,350,946	Total Less Mutation
Total Mutasi	378,943,880	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	1,350,294,826	Balance as of December 31, 2022

11. Belanja Dibayar Dimuka (lanjutan)

- b. Belanja Modal Dibayar di Muka
 Saldo Belanja Modal Dibayar di Muka (Prepaid) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp759.927.568, terjadi penurunan sebesar Rp759.927.568 atau 100,00%.

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	759,927,568	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah	-	Mutation Add
Total Mutasi Tambah	-	Total Mutation Add
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Nilai renovasi gedung kantor yang belum selesai pengerjaannya per 31 Desember 2021 yang berasal dari transaksi tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku	759,927,568	The value of office building renovations that have not been completed as of December 31, 2021 originating from transactions in 2021 at BPK Representative Maluku Province
Total Mutasi Kurang	759,927,568	Total Less Mutation
Total Mutasi	(759,927,568)	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	-	Balance as of December 31, 2022

Mutasi kurang sebesar Rp759.927.568,00 berasal dari Jurnal balik per 2 Januari 2022 atas nilai renovasi gedung kantor yang belum selesai pengerjaannya per 31 Desember 2021 yang berasal dari transaksi tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

11. Prepaid Expenditure (continued)

- b. *Prepaid Capital Expenditures*
The balance of Prepaid Capital Expenditures as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp0 and Rp759,927,568, an decrease of Rp759,927,568 or 100.00%, respectively.

Less movement of Rp759,927,568.00 came from a reverse journal as of January 2, 2022 for the value of office building renovations that had not been completed as of December 31, 2021 originating from transactions in 2021 at the BPK Representative for Maluku Province.

12. Piutang Bukan Pajak

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,281,818	402,732,136	Non Tax Receivable
Piutang Lainnya	812,218,236	725,804,343	Other Receivable
Jumlah	816,500,054	1,128,536,479	Total

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp816.500.054 dan Rp1.128.536.479 terjadi penurunan sebesar Rp312.036.425 atau 27,65%.

The balance of Non-Tax Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp816,500,054 and Rp1,128,536,479, respectively, a decrease of Rp312,036,425 or 27.65%.

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Non-tax receivables are receivables arising from non-tax state revenues outstanding until the end of the financial statements period.

- a. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.281.818 dan Rp402.732.136 terjadi penurunan sebesar Rp398.450.318 atau 98,94%.

- a. *Non Tax State Revenue Receivables (PNBP)*
The balance of PNBP Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp4,281,818 and Rp402,732,136, respectively, a increase of Rp398,450,318 or 98.94%.

Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo) namun belum diterima pembayarannya.

PNBP receivables are PNBP income for the current year that should have been paid by the payer and the government has earned the right to collect (overdue) but the payment has not been received.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

Details of the addition and subtraction of PNBP Receivables are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	402,732,136	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Mutation Add:
Denda keterlambatan pekerjaan	4,281,818	Late work fines
Total Mutasi Tambah	4,281,818	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Pelunasan atas saldo s.d 31 Desember 2022	402,732,136	Full payment until December 31, 2022
Total Mutasi Kurang	402,732,136	Total Less Mutation:
Total Mutasi	(398,450,318)	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	4,281,818	Balance as of December 31, 2022

12. Piutang Bukan Pajak (Lanjutan)

Mutasi tambah sebesar Rp4.281.818 berasal dari denda keterlambatan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor 10/SP/PPK-AT/XIX.TER/XI/2022 tanggal 16 November 2022 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Mutasi kurang sebesar Rp402.732.136 berasal dari:

- 1 Pelunasan denda keterlambatan sebesar Rp366.603.136,00 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- 2 Pelunasan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.129.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

b. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp812.218.236 dan Rp725.804.343 terjadi kenaikan sebesar Rp86.413.893 atau 11,91%.

Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang PNBPN, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang lainnya berasal dari kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas serta kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	725,804,343	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Kelebihan pembayaran tunjangan dan perjalanan dinas, belanja barang operasional dan jasa	486,135,802	Excess payment of allowances and official travel, spending on operational goods and services
Total Mutasi Tambah	486,135,802	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Pelunasan atas saldo s.d 31 Desember 2022	399,721,909	Full payment until December 31, 2022
Total Mutasi Kurang	399,721,909	Total Less Mutation:
Total Mutasi	86,413,893	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	812,218,236	Balance as of December 31, 2022

Mutasi tambah sebesar Rp486.135.802 berasal dari kelebihan pembayaran belanja pegawai yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2022 yaitu:

- 1 Gaji Pokok dan Tunjangan Lainnya sebesar Rp292.623.468 pada satuan kerja BPK Pusat, Sekretariat Jenderal, BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Banten, Badan Diklat PKN.

12. Non Tax Receivable (Continued)

The additional movement of Rp4,281,818 came from fines for late work in accordance with the Letter of Agreement Number 10/SP/PPK-AT/XIX.TER/XI/2022 dated 16 November 2022 at the BPK Representative Office for North Maluku Province.

Less mutations amounting to Rp402,732,136 came from:

- 1 Payment of late fines of Rp 366,603,136 to the Maluku Province Representative BPK work unit.
- 2 Settlement of Land, Building and Building Leases in the amount of Rp36,129,000 for the West Sulawesi Province BPK Representative.

b. Other Receivables

The balance of Other Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp812,218,236 and Rp725,804,343, respectively, an increase of Rp86,413,893 or 11.91%.

Other Receivables originate from receivables originating from other than PNBPN Receivables, the Current Part of Installment Sales Receipts, and the Current Part of Claims for Compensation. Other receivables come from excess expenditure on official travel which has been accounted for in full, but at the balance sheet date it has not been completed by the executor of official travel as well as overpayment of salaries/TKPK to employees.

Details of the addition and subtraction of Other Receivables are as follows:

The additional transfer of Rp486,135,802 came from over payments for personnel expenditures that had not been deposited to the state treasury as of December 31, 2022, namely:

- 1 Basic Salary and Other Allowances of Rp292,623,468 for Central BPK work units, Secretariat General, BPK Representative for DI Yogyakarta Province, BPK Representative for East Kalimantan Province, BPK Representative for Southeast Sulawesi Province, BPK Representative for West Sulawesi Province, BPK Representative for Central Sulawesi Province, BPK Representative Central Java Province, BPK Representative for Lampung Province, BPK Representative for West Java Province, BPK Representative for DI Yogyakarta Province, BPK Representative for Jambi Province, BPK Representative for DKI Jakarta Province, BPK Representative for Riau Province, BPK Representative for West Kalimantan Province, BPK Representative for South Sumatra Province, BPK Representative of Banten Province, PKN Education and Training Agency.

12. Piutang Bukan Pajak (Lanjutan)

- 2 Perjalanan Dinas sebesar Rp187.856.834 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 3 Jasa lainnya sebesar Rp3.400.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
- 4 Belanja Barang Operasional sebesar Rp2.255.500 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Mutasi kurang sebesar Rp399.721.909 berasal dari:

- 1 Pelunasan atas kelebihan pembayaran belanja pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp267.501.648 yaitu:
 - a. Pelunasan kelebihan pembayaran TPT sebesar Rp155.305.930 pada satuan kerja BPK Pusat dan Setjen.
 - b. Uang makan sebesar Rp77.234.300 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Propinsi DI Yogyakarta, BPK Perwakilan DKI Jakarta, BPK Perwakilan Jawa Barat dan Diklat PKN.
 - c. Gaji pokok dan tunjangan lainnya sebesar Rp19.665.994 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK Perwakilan Provinsi Yogyakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPK Perwakilan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
 - d. Pelunasan Kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS sebesar Rp3.860.224 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

12. Non Tax Receivable (Continued)

- 2 Official travel of Rp187,856,834 for the BPK Representative for West Sumatra Province, BPK for DKI Jakarta Province, BPK for East Kalimantan Province, BPK for West Kalimantan Province, BPK for North Sulawesi Province, BPK for Southeast Sulawesi Province, BPK for Central Sulawesi Province, BPK Representative for Maluku Province, BPK Representative for West Java Province, BPK Representative for Lampung Province.
- 3 Other services in the amount of Rp3,400,000 for the West Java Province Representative BPK Working Unit.
- 4 Expenditure on Operational Goods of Rp2,255,500.00 for the BPK West Java Province Representative Office working unit.

Less mutations amounting to Rp399,721,909 came from:

- 1 The settlement of the overpayment of personnel expenditures as of December 31, 2022 amounted to Rp267,501,648 namely:
 - a. Repayment of the overpayment of TPT amounting to Rp155,305,930 at the Central BPK work unit and the Secretariat General.
 - b. Meal allowance of Rp 77,234,300 for the BPK Representative for East Kalimantan Province, BPK for Southeast Sulawesi Representative, BPK for West Sulawesi, BPK for Maluku, BPK for Lampung Province, BPK for DI Yogyakarta Province, BPK for DKI Jakarta, BPK for West Java working units and PKN Training centre.
 - c. Basic salary and other allowances of Rp19,665,994 for the Secretariat General work unit, BPK Representative for Maluku Province, BPK Representative for North Maluku Province, BPK Representative for West Java Province, BPK Representative for Yogyakarta Province, BPK Representative for Central Java Province, BPK Representative for DKI Jakarta Province, BPK Jambi Province Representative, BPK Representative for Bangka Belitung Province, BPK Representative for North Sumatra Province, BPK Representative for Riau, BPK Representative for Riau Islands Province, BPK Representative for South Kalimantan Province, and BPK Representative for West Kalimantan Province.
 - d. Repayment of overpayment of civil servant general allowance of Rp3,860,224 to the BPK Representative Office for Riau Islands Province, BPK Representative for Maluku Province and BPK Representative for Banten Province working units.

12. Piutang Bukan Pajak (Lanjutan)

- e. Pelunasan Kelebihan Honor Output sebesar Rp5.232.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Bali.
 - f. Pelunasan Pembayaran Honor Operasional sebesar Rp4.943.200 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, Badan Diklat PKN dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
 - g. Pelunasan Kelebihan Tunjangan Struktural sebesar Rp1.260.000 pada satuan kerja Badan Diklat PKN.
- 2 Pelunasan atas kelebihan belanja barang per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.220.261 yaitu:
- a. Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.623.958 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Diklat PKN.
 - b. Kelebihan Biaya jasa lainnya sebesar Rp936.000 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Operasional sebesar Rp1.660.303 pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

12. Non Tax Receivable (Continued)

- e. Repayment of Excess Honor Output of Rp5,232,000 to the BPK Representative for Bali Province working unit.
 - f. Settlement of Operational Honor Payments of Rp4,943,200 to the working units of the Secretariat General, PKN Training Centre and BPK Representative for Jambi Province.
 - g. Repayment of Structural Allowance Excess of Rp1,260,000 to the work unit of the PKN Education and Training Agency.
- 2 Repayment of excess spending on goods as of December 31, 2022 amounting to Rp 132,220,261, namely:
- a. Official travel as of 31 December 2021 amounted to Rp129,623,958 for the BPK West Kalimantan Province Representative, BPK Representative for North Sulawesi Province, BPK Representative for Central Sulawesi, BPK Representative for Southeast Sulawesi Province, BPK Representative, BPK Representative for Maluku Province, BPK Representative for West Java Province, BPK Representative for East Nusa Tenggara Province, working units and PKN Education and Training Centre.
 - b. Excess Other service fees of Rp936,000 for the BPK Representative for Southeast Sulawesi Province and BPK Representative for DKI Jakarta Province working units.
 - c. Excess payment for Operational Goods Expenditure of Rp1,660,303 for the BPK Representative for West Java Province and BPK Representative for DKI Jakarta Province working units.

13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	(21,409)	(2,013,662)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(146,581,321)	(80,139,549)
Jumlah	(146,602,730)	(82,153,211)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp146.602.730 dan Rp82.153.211 terjadi kenaikan sebesar Rp64.449.519 atau 78,45%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

13. Allowance for Doubtful Accounts-Non Taxes Accounts

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Allowance for Doubtful Accounts - Non Tax Receivable	(21,409)	(2,013,662)
Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivable	(146,581,321)	(80,139,549)
Total	(146,602,730)	(82,153,211)

The balance of Allowance for Doubtful Accounts – Non-Tax Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp146,602,730 and Rp82,153,211 increased by Rp64,449,519 or 78.45%, respectively.

Allowance for Doubtful Accounts Receivables is reserves that must be established for a certain percentage of accounts receivable based on the classification of receivable qualities. The classification of the quality of receivables is one of the basis for determining the amount of allowance for receivables. Assessment of receivables quality is done by considering the maturity and development of collection efforts conducted by the government.

The quality of receivables is based on the condition of each receivable at the reporting date in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 207/PMK.06/2019 concerning amendments to the Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.06/2014 concerning Determination of the Quality of Receivables and the Establishment of Allowance for Uncollectibles at the Ministry State/Agency and State General Treasurer.

13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
(Lanjutan)

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.409 dan Rp2.013.662 terjadi penurunan sebesar Rp1.992.253 atau 98,94%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Piutang PNBPN sebesar Rp4.281.818 dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp4.281.818 x 5% atau sebesar Rp21.409.

- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp146.581.321 dan Rp80.139.549 terjadi kenaikan sebesar Rp66.441.772 atau 82,91%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya sebesar Rp146.581.321 berasal dari:

- 1 Piutang Lainnya yang dikategorikan dalam kualitas lancar sebesar Rp607.403.936 sehingga penyisihan piutang tidak tertagih adalah Rp607.403.936 x 5% atau sebesar Rp3.037.021.
- 2 Piutang Lainnya yang dikategorikan dalam kualitas diragukan sebesar Rp122.540.000 sehingga penyisihan piutang tidak tertagih adalah Rp122.540.000 x 50% atau sebesar Rp61.270.000.
- 3 Piutang Lainnya yang dikategorikan dalam kualitas macet sebesar Rp82.274.300, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih adalah Rp82.274.300 x 100% atau sebesar Rp82.274.300.

14. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	14,400,000	14,400,000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	58,530,700	58,530,700
Jumlah	72,930,700	72,930,700

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp72.930.700 dan Rp72.930.700 tidak terdapat kenaikan dan penurunan.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa pada awal periode pelaporan harus dilakukan jurnal balik (*reversing entries*) atas reklasifikasi bagian lancar atas piutang jangka panjang.

13. Allowance for Doubtful Accounts-Non Taxes Accounts (Continued)

- a. Allowance for Doubtful Accounts Receivable - Non Tax State Receivables
 The balance of Allowance for Doubtful Accounts - Non-Tax State Revenue Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp21,409 and Rp2,013,662, respectively, a increase of Rp1,992,253 or 98.94%.

The balance of Allowance for Doubtful Accounts - Non-Tax State Revenue Receivable comes from PNBPN Receivables amounting to Rp4,281,818 which is categorized as current, so that Allowance for Doubtful Accounts - Non-Tax State Revenue Receivables is Rp 4,281,818 x 5% or Rp 21,409.

- b. Allowance for Doubtful Accounts Receivable - Other Receivables

The balance of Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp146,581,321 and Rp80,139,549 increased by Rp66,441,772 or 82.91%.

The balance of Allowance for Doubtful Accounts - Other Receivables amounting to Rp146,581,321 came from:

- 1 Other Receivables categorized as current quality amounted to Rp607,403,936 so that the allowance for uncollectible accounts was Rp607,403,936 x 5% or Rp3,037,021.
- 2 Other Receivables categorized as current is Rp122,540,000 so that the allowance for bad debts is Rp122,540,000 x 50% or Rp61,270,000.
- 3 Other Receivables categorized as bad debts amounted to Rp82,274,300, so the allowance for bad debts was Rp82,274,300 x 100% or Rp82,274,300.

14. Current Portion Indemnification of Treasury/Claims Bills-Net

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Current Portion Indemnification of Treasury Bill	14,400,000	14,400,000
Current Portion Indemnification of Claims Bill	58,530,700	58,530,700
Total	72,930,700	72,930,700

The balance of the Current Part of TP/TGR Bills as of December 31, 2022 and December 31, 2021, amounted to Rp72,930,700 and Rp72,930,700, respectively, no increase and decrease.

Current Section Indemnification of Treasury/Claims Bills is an outstanding Indemnification of Treasury/Claims Bills on the balance sheet date due in 12 months or less.

In accordance with the Regulation of the Director General of the Treasury Number PER-43/PB/2015 concerning Guidelines for Accounting for Allowance for Uncollectible Accounts at State Ministries/Institutions it is stated that at the beginning of the reporting period, reversing entries must be made for the reclassification of the current portion of long-term receivables.

14. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Lanjutan)

- a. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)
 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp14.400.000 dan Rp14.400.000. Tidak terjadi perubahan atas saldo tersebut.
- b. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 Saldo Bagian Lancar Tagihan TGR Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp58.530.700 dan Rp58.530.700. Tidak terjadi perubahan atas saldo tersebut.

14. Current Portion Indemnification of Treasury/Claims Bills-Net (Continued)

- a. *Current Portion of Treasury Claims (TP)*
The balance of the Current Portion of Treasury Claims (TP) as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp14,400,000 and Rp14,400,000, respectively. There is no change to the balance.
- b. *Current Portion of Claims for Indemnity (TGR)*
The balance of the Current Part of TGR Bills as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp58,530,700 and Rp58,530,700, respectively. There is no change to the balance.

15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

15. Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill

	31 Desember/December 31,	2022	2021	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	(72,000)	(72,000)		<i>Current Portion Indemnification of Treasury Bill</i>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(292,654)	(292,654)		<i>Current Portion Indemnification of Claims Bill</i>
Jumlah	(364,654)	(364,654)		Total

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp364.654 dan Rp364.654, tidak terdapat perubahan atas saldo tersebut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

The balance of Allowance for Doubtful Accounts-Current Part of TP/TGR Claims as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp364,654 and Rp364,654, respectively. There is no change to the balance.

Allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims Bill is an estimate of the Current Portion of Indemnification of Treasury/Claims determined by the quality of each receivable.

16. Persediaan

16. Inventories

	31 Desember/December 31,	2022	2021	
Barang Konsumsi	7,471,374,679	11,330,181,107		<i>Consumer Goods</i>
Bahan Untuk Pemeliharaan	562,841,080	930,893,300		<i>Materials for Maintenance</i>
Suku Cadang	50,759,873	70,087,985		<i>Spare Parts</i>
Persediaan Lainnya	3,096,347,454	2,899,339,969		<i>Others Inventory</i>
Jumlah	11,181,323,086	15,230,502,361		Total

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.181.323.086 dan Rp15.230.502.361, terjadi penurunan sebesar Rp4.049.179.275 atau 26,59%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja dalam kondisi baik.

Inventory balances as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to amount to Rp11,181,323,086 and Rp15,230,502,361, a decrease of Rp4,049,179,275 or 26.59%. Inventory is a type of asset in the form of goods or supplies (supplies) at the balance sheet date obtained with the intention of supporting operational activities and to be submitted in the context of services to the community.

The above inventory is used for operating activities of the unit work in good condition.

17. Aset Tetap**17. Fixed Assets**

		2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan					Acquisition Cost	
Tanah	5,954,117,599,963	292,098,011,781	121,393,391,000	6,124,822,220,744	Land	
Peralatan dan Mesin	2,228,452,577,791	126,749,015,872	59,229,710,966	2,295,971,882,697	Machinery and Equipments	
Gedung dan Bangunan	2,586,655,009,353	69,769,652,809	35,664,223,262	2,620,760,438,900	Buildings and Properties	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	396,232,320,663	1,586,905,000	1,232,326,240	396,586,899,423	Road, Irrigation and Network	
Aset Tetap Lainnya	17,878,342,009	4,153,485,374	1,249,378,028	20,782,449,355	Other Fixed Assets	
Konstruksi dalam Pengerjaan	8,560,897,430	2,068,208,939	10,580,306,369	48,800,000	Construction in Progress	
	11,191,896,747,209	496,425,279,775	229,349,335,865	11,458,972,691,119		
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation	
Peralatan dan Mesin	1,902,154,625,787	97,700,056,924	-	1,999,854,682,711	Machinery and Equipments	
Gedung dan Bangunan	319,807,493,988	63,616,190,982	-	383,423,684,970	Buildings and Properties	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	252,870,195,342	8,042,047,458	-	260,912,242,800	Road, Irrigation and Network	
Aset Tetap Lainnya	955,261,071	145,673,183	-	1,100,934,254	Other Fixed Assets	
	2,475,787,576,188	169,503,968,547	-	2,645,291,544,735		
Nilai Buku Bersih	8,716,109,171,021			8,813,681,146,384	Net Book Value	
		2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Disposals/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Harga Perolehan					Acquisition Cost	
Tanah	5,920,800,077,963	83,103,214,000	49,785,692,000	5,954,117,599,963	Land	
Peralatan dan Mesin	2,159,391,106,309	151,218,016,173	82,156,544,691	2,228,452,577,791	Machinery and Equipments	
Gedung dan Bangunan	2,544,150,887,350	108,920,584,909	66,416,462,906	2,586,655,009,353	Buildings and Properties	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	394,002,898,853	5,979,173,410	3,749,751,600	396,232,320,663	Road, Irrigation and Network	
Aset Tetap Lainnya	19,964,084,075	23,673,716,900	25,759,458,966	17,878,342,009	Other Fixed Assets	
Konstruksi dalam Pengerjaan	148,295,000	27,249,756,448	18,837,154,018	8,560,897,430	Construction in Progress	
	11,038,457,349,550	400,144,461,840	246,705,064,181	11,191,896,747,209		
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation	
Peralatan dan Mesin	1,817,029,175,629	85,264,116,683	138,666,525	1,902,154,625,787	Machinery and Equipments	
Gedung dan Bangunan	242,031,198,294	80,192,302,100	2,416,006,406	319,807,493,988	Buildings and Properties	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	240,618,361,372	12,288,408,969	36,574,999	252,870,195,342	Road, Irrigation and Network	
Aset Tetap Lainnya	762,695,664	192,565,407	-	955,261,071	Other Fixed Assets	
	2,300,441,430,959	177,937,393,159	2,591,247,930	2,475,787,576,188		
Nilai Buku Bersih	8,738,015,918,591			8,716,109,171,021	Net Book Value	

a. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.124.822.220.744 dan Rp5.954.117.599.963 terjadi kenaikan sebesar Rp170.704.620.781 atau 2,87%.

Nilai perolehan Tanah per Eselon I adalah sebagai berikut:

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease) %	
01	Badan Pemeriksa Keuangan	6,124,822,220,744	5,954,117,599,963	170,704,620,781	2.87

a Land

Land value as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp6,124,822,220,744 and Rp5,954,117,599,963, respectively, an increase of Rp170,704,620,781 or 2.87%.

Land acquisition value per Echelon I is as follows:

Rincian Mutasi Tanah Per 31 Desember 2022
Land Movement Details As of December 31, 2022

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	5,954,117,599,963	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Addition:
Pengembangan Nilai Aset	443,578,781	Asset Development
Saldo Awal	246,346,802,000	Beginning Balance
Reklasifikasi Masuk	25,839,000,000	Incoming Reclassification
Koreksi Pencatatan Nilai	19,468,631,000	Revised amount
Total Mutasi Tambah	292,098,011,781	Total Addition
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Koreksi Pencatatan Nilai	73,639,840,000	Revised amount
Reklasifikasi Keluar	25,839,000,000	Outgoing Reclassification
Koreksi Pencatatan	21,914,551,000	Correction of Recording
Total Mutasi Kurang	121,393,391,000	Total Less Mutation:
Total Mutasi	170,704,620,781	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	6,124,822,220,744	Balance as of December 31, 2022

17. Aset Tetap (Lanjutan)

a. Tanah (Lanjutan)

Mutasi Tambah Tanah sebesar Rp292.098.011.781 berasal dari:

- 1) Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp443.578.781 yang berasal dari Pengurukan dan Pematangan tanah rumah dinas Jabatan dari Satker BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- 2) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp246.346.802.000 berasal dari:
 - a) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp1.737.160.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang berlokasi di Komplek BPK III (Lahan ruang serbaguna), Jakarta seluas 137 m² sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp4.193.620.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III yang berlokasi di Komplek BPK VI, Jakarta seluas 307 m² sesuai Memo Penyesuaian No.01/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - c) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp4.193.620.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III yang berlokasi di Komplek BPK VI, Jakarta seluas 307 m² sesuai Memo Penyesuaian No.01/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - d) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp3.131.960.000 merupakan Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya yang berlokasi di Komplek BPK II (Lahan Mushola), Jakarta sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - e) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp1.204.600.000 merupakan Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya yang berlokasi di Komplek BPK II (Lahan Parkir), Jakarta sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - f) Penambahan Saldo Awal sebesar Rp231.885.842.000 merupakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang berlokasi di Kantor Pusat BPK Jakarta sesuai Memo Penyesuaian No.03/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.
- 3) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp25.839.000.000 berasal dari:
 - a) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp24.091.300.000 dari Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.747.700.000 dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
- 4) Koreksi Pencatatan sebesar Rp19.468.631.000 berasal dari:
 - a) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp4.660.567.000 merupakan Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek sesuai Memo Penyesuaian No.01/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Koreksi pencatatan nilai sebesar Rp3.495.400.000 pada pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Lampung.
 - c) Koreksi pencatatan nilai sebesar Rp11.312.664.000 pada pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Aceh.

17. Fixed Assets (Continued)

a. Land (Continued)

Land Added Movements of Rp292,098,011,781 came from:

- 1) Development of Asset Value of Rp 443,578,781 originating from backfilling and development of official house land Position from BPK Work Unit Representative of Aceh Province.
- 2) The addition of the Initial Balance of Rp 246,346,802,000 comes from:
 - a) Additional Initial Balance of Rp1,737,160,000 represents Land for a State House Building Class II located in the BPK III Complex (Multipurpose room land), Jakarta with an area of 137 m² according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated 31 January 2022 at the Secretariat General Work Unit,
 - b) The addition of the Initial Balance of Rp 4,193,620,000 is a Class III State House Building Land located at the BPK VI Complex, Jakarta with an area of 307 m² according to the Adjustment Memo No.01/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit Secretariat General,
 - c) The addition of the Initial Balance of Rp 4,193,620,000 is a Class III State House Building Land located at the BPK VI Residences, Jakarta with an area of 307 m² according to the Adjustment Memo No.01/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit Secretariat General,
 - d) The addition of the Initial Balance of Rp 3,131,960,000 represents Land for Other Residential Facility Buildings located at the BPK II Complex (Mushola Land), Jakarta according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Unit Secretariat General Work,
 - e) The addition of the Initial Balance of Rp 1,204,600,000 represents Land for Other Residential Facility Buildings located at the BPK II Complex (Parking Land), Jakarta according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Unit Secretariat General Working Unit.,
 - f) The addition of the Initial Balance of Rp 231,885,842,000 represents Government Office Building Land located at the BPK Jakarta Head Office according to the Adjustment Memo No.03/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Working Unit of the Secretariat General.
- 3) Entry reclassification of Rp 25,839,000,000 comes from:

Reclassification of Entry of Rp 24,091,300,000 from the Secretariat General Work Unit,

Reclassification of Entry of Rp 1,747,700,000 from the Lampung Province Representative BPK Work Unit.
- 4) Revised amount of Rp 19,468,631,000 came from:
 - a) Revised amount of Rp 4,660,567,000 is Land for Special/Complex Roads according to the Adjustment Memo No.01/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - b) Revised amount of Rp 3,495,400,000 in the Lampung Representative Province BPK work unit.
 - c) Revised amount of Rp 11,312,664,000 in the BPK Aceh Representative Province work unit.

17. Aset Tetap (Lanjutan)

a. Tanah (Lanjutan)

Mutasi Kurang sebesar Rp121.393.391.000 berasal dari:

- 1) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp73.639.840.000, terdiri dari:
 - a) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp1.737.160.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp22.494.320.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - c) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp39.130.480.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - d) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp4.193.620.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sesuai Memo Penyesuaian No.01/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - e) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp4.336.560.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sesuai Memo Penyesuaian No.02/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - f) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp1.747.700.000 pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Lampung.
- 2) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp25.839.000.000, terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp24.091.300.000 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.747.700.000 pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Lampung.
- 3) Koreksi Pencatatan sebesar Rp21.914.551.000, terdiri dari:
 - a) Koreksi Pencatatan sebesar Rp4.193.620.000 merupakan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III sesuai Memo Penyesuaian No.04A/MP/X.6/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - b) Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp4.660.567.000 merupakan Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek sesuai Memo Penyesuaian No.01/MP/X.6/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal,
 - c) Koreksi pencatatan sebesar Rp1.747.700.000 pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Lampung.
 - d) Koreksi pencatatan sebesar Rp11.312.664.000 pada satuan kerja BPK Provinsi Perwakilan Aceh.

17. Fixed Assets (Continued)

a. Land (Continued)

Less Movements of Rp121,393,391,000 originating from:

- 1) Revised amount of Rp 73,639,840,000, consisting of:
 - a) Revised amount of Rp 1,737,160,000 is Class II State House Building Land according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated 31 January 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - b) Revised amount of Rp 22,494,320,000 is Class III Country House Building Land according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - c) Revised amount of Rp 39,130,480,000 is Land for Buildings of State Houses Class III according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated 31 January 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - d) Revised amount of Rp 4,193,620,000 is Class III Country House Building Land according to the Adjustment Memo No.01/MP/X.6/01/2022 dated 31 January 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - e) Revised amount of Rp 4,336,560,000 is Class III Country House Building Land according to the Adjustment Memo No.02/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - f) Revised amount of Rp 1,747,700,000 in the Lampung Representative Province BPK work unit.
- 2) Outgoing reclassification of Rp 25,839,000,000, consisting of:
 - a) Outgoing Reclassification of Rp 24,091,300,000 in the Secretariat General work unit,
 - b) Outgoing reclassification of Rp 1,747,700,000 in the Lampung Representative Province BPK work unit.
- 2) Recording Correction of Rp 21,914,551,000, consisting of:
 - a) Recording correction of Rp 4,193,620,000 is Class III State House Building Land according to the Adjustment Memo No.04A/MP/X.6/06/2022 dated 29 June 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - b) Correction of Recording Value of Rp 4,660,567,000 is Land for Special/Complex Roads according to the Adjustment Memo No.01/MP/X.6/01/2022 dated January 31, 2022 in the Work Unit of the Secretariat General,
 - c) Recording correction of Rp 1,747,700,000 in the Lampung Representative Province BPK work unit.
 - d) Recording correction of Rp 11,312,664,000 in the BPK Lampung Representative Province work unit.

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

a. Tanah (Lanjutan)

Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)	Item
	/Quantity (M2)	Amount (Rp)	
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	121,022	651,416,074,781	Class I . State House Building Land
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	46,903	189,097,165,250	Class II . State House Building Land
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	478	6,529,480,000	Class III . State House Building Land
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	86,999	156,969,177,000	Land & Building Mess / Guesthouse / Dormitory
Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	2,337	15,886,902,500	Land & Building Other Residential Facilities
Tanah Bangunan Gudang	4,120	16,711,750,000	Land & Building for Warehouse
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	351,595	4,308,377,855,247	Land & Building for Government Office
Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	61,385	603,551,967,216	Land & Building for Education and Training
Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1,350	5,475,937,500	Land & Building for Convention/Meeting Hall
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	202	819,362,500	Land & Building for Health Center/Posyandu
Tanah Untuk Bangunan Masjid	3,035	11,325,050,000	Land & Building for Mosque
Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	475	1,926,718,750	Badminton Court Ground
Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	18,501	109,103,547,000	Land For Special Roads/ Residences
Tanah Untuk bangunan Museum	3,880	47,518,360,000	Land for Museum building
Tanah Untuk Taman Lainnya	48	112,873,000	Land For Other Gardens
Total	702,330	6,124,822,220,744	Total

a. Land (Continued)

Details of Land balance per type of goods are as follows:

b. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.295.971.882.697 dan Rp2.228.452.577.791, terjadi kenaikan sebesar Rp67.519.304.906 atau 3,03%.

b. Equipment and Machinery

Cost of Equipment and Machinery as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp2,295,953,789,697 and Rp2,295,971,882,697, respectively, an increase of Rp67,519,304,906 or 3.03%.

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	2,295,971,882,697	2,228,452,577,791	67,519,304,906	3.03

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022
Equipment and Machinery Movement Details As of December 31, 2022

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	2,228,452,577,791	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Additional:
Penambahan Saldo Awal	448,161,069	Beginning Balance Correction
Koreksi Susulan	8,521,000	Revised
Pembelian	98,588,500,676	Purchase
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	9,852,990,630	Asset Value Development (Direct)
Transfer Masuk	14,387,461,652	Incoming Transfer
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	519,700,000	Re-use of BMN that has been discontinued in active use
Reklasifikasi Masuk	2,090,396,229	Incoming Reclassification
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	206,082,308	Correction of Recording Value/Quantity
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	191,974,500	Assets Renovation
Pengembangan Melalui KDP	17,500,000	Development Through CIP
Hibah Masuk	40,080,000	Incoming Grant
Perolehan Lainnya	397,647,808	Other Assets
Total Mutasi Tambah	126,749,015,872	Total Additional
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Transfer Keluar	13,140,422,220	Transfer Out
Hibah Keluar	37,059,000	Ongoing Grant
Reklasifikasi Keluar	1,872,043,389	Outgoing Reclassification
Penghentian Aset dari Penggunaan	44,066,008,238	Assets Termination
Koreksi Pencatatan	99,601,288	Correction
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	14,576,831	Reduction
Total Mutasi Kurang	59,229,710,966	Total Less Mutation
Total Mutasi	67,519,304,906	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	2,295,971,882,697	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d Desember 2022	1,999,854,682,711	Accumulation Depreciation
Nilai Buku per 31 Desember 2022	296,117,199,986	Book Value as of December 31, 2022

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

b. Peralatan dan Mesin (Lanjutan)

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

b. Equipment and Machinery (Continued)

The addition of Equipment and Machinery generated by Expenditure is as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Pembelian	98,588,500,676	Purchase
Pengembangan Nilai Aset	9,852,990,630	Asset Value Development
Total	108,441,491,306	Total

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

The realization of Capital Expenditures for Equipment and Machinery as of December 31, 2022 are as follows:

Uraian	Kode Akun / Account Code	Nilai / Amount (Rp)	Description
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532111	98,888,351,874	Equipment and Machinery Capital Expenditure
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pandemi Covid	532119	21,000,000	Capital Expenditure on Equipment and Machinery - Covid Pandemic
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	532121	9,819,812,799	Purchase for Value Added Equipment and Machinery
Total		108,729,164,673	Total

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja tidak sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan selisih sebesar Rp287.673.367 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

The addition of Equipment and Machinery generated by the Expenditure is not tied up with the realization of Capital Expenditure on Equipment and Machinery with difference of amount is Rp287.673.367 caused by the following:

Uraian	Nilai /Amount	Description
Penambahan Aset Selain Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (1):		Addition of Assets Other Than Equipment and Machinery from the Realization of Capital Expenditure on Equipment and Machinery (1):
Penambahan pada Jaringan	178,630,000	Additions to Network
Penambahan pada ATR	-	Additions to ATR
Penambahan pada Aset Tetap Lainnya	39,722,840	Additions to Other Fixed Assets
Penambahan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,500,000	Additions to Construction In Progress
Penambahan pada Software	-	Additions to Software
Total (1)	235,852,840	Total (1)
Tidak menambah nilai aset pada Neraca (2):		No additional value to assets on the Balance Sheet (2):
Penambahan Pada Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	32,694,700	Additions to Extracomptable Equipment and Machinery Assets
Total (2)	32,694,700	Total (2)
Penambahan Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja selain Belanja Peralatan dan Mesin (3):		Addition of Assets Other Than Equipment and Machinery from the Realization of Capital Expenditure on Equipment and Machinery
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diinput dalam menu perolehan lainnya	26,376,658	Equipment and Machinery Capital Expenditure which is inputted in the other acquisition menu
Total (3)	26,376,658	Total (3)
Belanja Modal yang Dikembalikan (4):		Refunded Capital Expenditures (4):
Penambahan dari realisasi Belanja namun belum keluar SP2D nya	-	Additions from realized Expenditures but the SP2D has not yet been issued
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,250,831	Return on Capital Expenditure Equipment and Machinery
Total (4)	7,250,831	Total (4)
Total Penjelasan Selisih (1+2-3-4)	287,673,367	Total Explanation of Differences (1+2-3-4)

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

b. Peralatan dan Mesin (Lanjutan)

Rincian nilai perolehan Peralatan dan Mesin per kelompok barang adalah sebagai berikut:

b. Equipment and Machinery (Continued)

The breakdown of the acquisition value of Equipment and Machinery per group of goods is as follows:

Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)	Item
	/Quantity (M2)	Amount (Rp)	
Alat Rumah Tangga	100,129	539,200,668,100	Household appliance
Peralatan Komputer	18,983	538,751,374,257	Computer equipment
Komputer Unit	15,100	349,015,430,231	Computer Unit
Alat Kantor	32,807	322,114,190,158	Office tools
Alat Angkutan Darat Bermotor	859	183,666,622,458	Motorized Land Transport
Alat Bantu	623	144,358,931,241	Equipment Device
Alat Studio	8,619	84,480,465,017	Studio Tools
Alat Komunikasi	3,445	32,891,409,385	Communication Tool
Alat Kedokteran	2,146	16,910,941,836	Medical Device
Unit Peralatan Proses/Produksi	565	16,895,023,973	Process/Production Equipment Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya	5,225	67,686,826,041	Other Equipment and Machinery
Total	188,501	2,295,971,882,697	Total

c. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.620.760.438.900 dan Rp2.586.655.009.353 terjadi kenaikan sebesar Rp34.105.429.547 atau 1,32%.

c. Buildings and Properties

The value of Buildings and Buildings as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp2,620,760,438,900 and Rp2,586,655,009,353 respectively, an increase of Rp34,105,429,547 or 1.32%.

Kode/	Uraian/	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
Code	Description	December 31, 2022	December 31, 2021	Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/ <i>The Audit Board of the Republic of Indonesia</i>	2,620,760,438,900	2,586,655,009,353	34,105,429,547	1.32

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Details of adding and subtracting the value of Buildings and Properties are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/Value	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	2,586,655,009,353	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Saldo Awal	592,686,585	Beginning Balance
Pembelian	1,864,487,741	Purchase
Transfer Masuk	42,170,678,624	Incoming Transfer
Hibah Masuk	564,500,000	Incoming Grant
Reklasifikasi Masuk	4,011,771,900	Admission Reclassification
Perolehan Lainnya	197,333,023	Other gains
Penyelesaian Pembangunan Langsung	39,757,472	Direct Construction Completion
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	386,956,000	Admission Reclassification from Inventories
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	6,910,888,017	Asset Value Development (Direct)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2,112,493,628	Addition correction
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	140,345,000	Admissions of Renovation Fixed Assets
Penyelesaian Pengembangan dengan KDP	10,550,866,369	Completion of Development with CIP
Koreksi Susulan	226,888,450	Follow-up Corrections
Total Mutasi Tambah	69,769,652,809	Total Additional
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1,582,631,237	Reduction Correction
Transfer Keluar	21,562,713,992	Transfer Out
Reklasifikasi Keluar	4,011,771,900	Reclassification Out
Koreksi Pencatatan	462,795,133	Correction
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	386,956,000	Reclassification Out to Inventories
Penghentian Aset dari Penggunaan	7,657,355,000	Asset Termination from Use
Total Mutasi Kurang	35,664,223,262	Total Less Mutation
Total Mutasi	34,105,429,547	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	2,620,760,438,900	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	383,423,684,970	Accumulation Depreciation as of December 31, 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2,237,336,753,930	Book Value as of December 31, 2022

17. Aset Tetap (Lanjutan)

c. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.769.652.809 berasal dari:

- 1) Penambahan saldo awal sebesar Rp592.686.585 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Pembelian sebesar Rp1.864.487.741 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dan BPK Perwakilan Provinsi Papua serta satker Balai Diklat PKN Medan, Balai Diklat PKN Yogyakarta, Balai Diklat PKN Gowa dan Balai Diklat PKN Bali.
- 3) Transfer masuk sebesar Rp42.170.678.624 pada satker Sekretariat Jenderal, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara serta Balai Diklat PKN Bali.
- 4) Hibah Masuk sebesar Rp564.500.000 hanya ada pada satker Sekretariat Jenderal.
- 5) Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.011.771.900 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku serta Balai Diklat PKN Yogyakarta dan Balai Diklat PKN Medan.
- 6) Perolehan Lainnya sebesar Rp197.333.023 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Mutasi tambah ini berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang di input menggunakan menu perolehan lainnya di modul aset.
- 7) Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp39.757.472 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/
- 8) Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp386.956.000 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- 9) Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp6.910.888.017 terdapat pada satker Sekretariat Jenderal, Badan Diklat PKN, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Barat dan Papua serta Balai Diklat PKN Medan, Yogyakarta dan Bali.
- 10) Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp2.112.493.628 terdapat pada satker Badan Diklat PKN, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku serta Balai Diklat PKN Medan, Gowa dan Bali.
- 11) Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp140.345.000 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kalimantan Timur dan Papua Barat.
- 12) Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp10.550.866.369 pada satker Sekretariat Jenderal dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

17. Fixed Assets (Continued)

c. Buildings and Properties (Continued)

Transfer of Added Buildings and Buildings of Rp69,769,652,809 comes from:

- 1) *Additional initial balance of Rp 592,686,585 for BPK Representative Office of North Kalimantan Province.*
- 2) *Purchases amounting to Rp 1,864,487,741 from the BPK Representative Office for Riau Islands Province, BPK Representative for Bangka Belitung Province, BPK Representative for DKI Jakarta Province, BPK Representative for Central Sulawesi Province, BPK Representative for Southeast Sulawesi Province, BPK Representative Gorontalo Province and BPK Representatives of Papua Province as well as the work units of the PKN Medan Training Center, Yogyakarta PKN Training Center, Gowa PKN Training Center and Bali PKN Training Center.*
- 3) *Incoming transfers amounted to Rp 42,170,678,624 to the Secretariat General work unit, the BPK West Sumatra Province Representative and the North Kalimantan Province Representative BPK and the Bali PKN Training Center.*
- 4) *The Incoming of Grant of Rp 564,500,000 is only available to the Secretariat General work unit.*
- 5) *Entry reclassification of Rp 4,011,771,900 for the BPK Satker Representative for South Sumatra Province, BPK Representative for East Kalimantan Province and BPK Representative for Maluku Province as well as Yogyakarta PKN Training Center and Medan PKN Training Center.*
- 6) *Other Acquisition of Rp 197,333,023 for the West Papua Province Representative BPK satker. This added movement comes from Building and Building Maintenance Expenditure which is input using the other acquisition menu in the asset module.*
- 7) *Completion of Direct Construction of Rp 39,757,472 for the BPK Representative Office of West Sulawesi Province.*
- 8) *Reclassification of Inventory in the amount of Rp 386,956,000 for the Maluku Province Representative BPK work unit.*
- 9) *Development of Asset Value (Direct) of Rp6,910,888,017 was found in the Secretariat General work unit, PKN Training Agency, BPK Representatives for DKI Jakarta, Central Java, DI Yogyakarta, Central Kalimantan, NTT, West Sulawesi and Papua as well as Medan, Yogyakarta and Bali PKN Training Centers.*
- 10) *Corrections for the Recording of Added Value of IDR 2,112,493,628 were found in the work units of the PKN Education and Training Agency, BPK Representatives for the Provinces of North Sumatra, West Sumatra, Bangka Belitung, West Java, West Kalimantan, NTT, Central Sulawesi, West Sulawesi, Southeast Sulawesi and Maluku and the Training Center PKN Medan, Gowa and Bali.*
- 11) *Receipt of Fixed Assets Renovation of Rp 140,345,000 to BPK work units Representatives of Lampung, East Kalimantan and West Papua Provinces.*
- 12) *Development through KDP of Rp 10,550,866,369 for the Secretariat General and BPK Representative Office of Maluku Province.*

17. Aset Tetap (Lanjutan)

c. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

13) Koreksi Susulan sebesar Rp226.888.450 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Mutasi tambah ini pada satker BPK Perwakilan Provinsi Riau dan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebesar Rp171.377.350 berasal dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang di input menggunakan menu koreksi susulan di modul aset.

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.664.223.262 berasal dari:

- 1) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.582.631.237 pada satker Sekretariat Jenderal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Transfer Keluar sebesar Rp21.562.713.992 pada satker Sekretariat Jenderal dan BPK Perwakilan Provinsi Bali
- 3) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.011.771.900 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku serta Balai Diklat PKN Medan dan Yogyakarta.
- 4) Koreksi Pencatatan sebesar Rp462.795.133 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Balai Diklat PKN Medan.
- 5) Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp386.956.000 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- 6) Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp7.657.355.000 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Aceh, BPK Perwakilan Provinsi NTT dan BPK Perwakilan Provinsi Papua.

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Transaksi	Nilai/ Amount (Rp)	Transaction
Pembelian	1,864,487,741	Purchase
Penyelesaian Pembangunan Langsung	39,757,472	Direct Construction Completion
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	6,910,888,017	Asset Value Development (Direct)
Total	8,815,133,230	Total

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Kode Akun	Nilai (Rp)	Description
	/Account Code	Amount (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	533111	380,056,750	Buildings and Properties Capital Expenditure
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	533121	9,649,040,205	Buildings and Properties Value Added Expenditure
Total		10,029,096,955	Total

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak sama dengan realisasi belanja modal dengan selisih sebesar Rp1.213.963.725 karena dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

17. Fixed Assets (Continued)

c. Buildings and Properties (Continued)

13) Follow-up corrections of Rp 226,888,450 for the BPK Representative Office for Riau Province, BPK Representative for Southeast Sulawesi Province and BPK Representative for West Papua Province. This added mutation to the Riau Province Representative BPK satker and West Papua Province Representative BPK of Rp 171,377,350 came from Building and Building Maintenance Expenditure which was input using the follow-up correction menu in the asset module.

Movement of Deduction Buildings amounting of Rp35,664,223,262 comes from:

- 1) Correction of Recording of Decreased Value of Rp 1,582,631,237 for the Secretariat General work unit, BPK Representative for Southeast Sulawesi Province and BPK Representative for North Kalimantan Province.
- 2) Outgoing Transfers of Rp 21,562,713,992 to the BPK Representative for Bali Province and Secretariat General work unit.
- 3) Outgoing reclassification of Rp 4,011,771,900 for the BPK Satker Representative for South Sumatra Province, BPK Representative for East Kalimantan Province and BPK Representative for Maluku Province and the Medan and Yogyakarta PKN Training Center.
- 4) Corrections of Rp 462,795,133 for the BPK Bangka Belitung Province Representative BPK work units, the BPK Representative for Central Sulawesi Province and the BPK Representative for Southeast Sulawesi Province and the PKN Medan Training Center.
- 5) Outgoing Reclassification with Inventory of Rp 386,956,000 at the BPK Representative Office of Maluku Province.
- 6) Termination of Assets From Use of Rp. 7,657,355,000 for the BPK Representative for Aceh Province, BPK for NTT Province and BPK for Papua Province.

Additional Buildings and Properties generated by expenditure are as follows:

The realization of Capital Expenditure on Buildings and Properties as of December 31, 2022 is as follows:

The addition of Buildings and Properties generated by Capital Expenditure on Buildings and Property is not the same as the realization of capital expenditure with a difference of Rp1,213,963,725 caused by the following:

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

c. Gedung dan Bangunan (Lanjutan)

c. Buildings and Properties (Continued)

Keterangan	Nilai/Value	Description
Penambahan Aset Selain Gedung dan Bangunan Dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (1):		Addition of assets other than Buildings and Buildings from the realization of Capital Expenditure on Buildings and Buildings (1):
Penambahan pada Konstruksi dalam Pengerjaan	1,021,282,888	Additions to Construction in Progress
Penambahan pada Aset Tetap dalam Renovasi	484,501,902	Addition to Fixed Assets Under Renovation
Total (1)	1,505,784,790	Total (1)
Penambahan Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja selain Belanja Modal Gedung dan Bangunan (2):		Addition of Buildings and Properties from Realized Expenditures other than Capital Expenditures for Buildings and Buildings (2):
Penambahan dari realisasi Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	291,821,065	Addition to the realization of Building and Property Maintenance Goods Expenditure
Total (2)	291,821,065	Total (2)
Total Penjelasan Selisih (1+2-3)	1,213,963,725	Total Explanation of Differences (1+2-3)

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per kelompok barang adalah sebagai berikut:

Details of Building and Properties balance per item group are as follows:

No.	Jenis Barang	Kuantitas/ Quantity (Unit)	Nilai/Value (Rp)	Types of Goods
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	598	2,166,651,816,279	Workplace Building
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	493	409,923,498,012	Residential Building
3.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2	316,704,000	Temple/Memorial/Inscription
4.	Tugu/Tanda Batas	123	43,868,420,609	Boundary Monument/Sign
	Total	1,216	2,620,760,438,900	Total

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp396.586.899.423 dan Rp396.232.320.663, terjadi kenaikan sebesar Rp354.578.760 atau 0,09%.

d. Road, Irrigation and Network

The acquisition cost of Roads, Irrigation and Networks as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp396,586,899,423 and Rp396,232,320,663, respectively, an increase of Rp354,578,760 or 0.09%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/Description	31 Desember 2022/ December 31, 2022	31 Desember 2021/ December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan)/ Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	396,586,899,423	396,232,320,663	354,578,760	0.09
	Total	396,586,899,423	396,232,320,663	354,578,760	0.09

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Details of Road, Irrigation, and Network as of December 31, 2022 are as follows:

Keterangan	Nilai / Amount	Description
Jalan dan Jembatan	28,124,808,824	Road and Bridges
Irigasi	36,291,707,402	Irrigations
Jaringan	332,170,383,197	Networks
Total	396,586,899,423	Total

1) Jalan dan Jembatan

Nilai perolehan Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp28.124.808.824 dan Rp28.124.808.824, tidak terjadi kenaikan atau penurunan saldo jalan dan jembatan.

1) Road and Bridge

The acquisition value of Roads and Bridges as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp28,124,808,824 and Rp28,124,808,824, respectively, there was no increase or decrease in the balance of roads and bridges.

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	28,124,808,824	28,124,808,824	-

17. Aset Tetap (Lanjutan)**17. Fixed Assets (Continued)****d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Lanjutan)****d. Road, Irrigation and Network**

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

The details of adding and deducting the amount of Roads and Bridges are as follows:

Jenis Transaksi	Jumlah / Total	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	28,124,808,824	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Pembelian	-	Purchase
Transfer Masuk	714,025,700	Incoming Transferred
Total Mutasi Tambah	714,025,700	Add Mutation Total
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Transfer Keluar	714,025,700	Transfer Out
Total Mutasi Kurang	714,025,700	Total Mutation Less
Total Mutasi	-	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	28,124,808,824	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	24,092,097,961	Accumulated Depreciation until December 31, 2022
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	4,032,710,863	Book Value As of December 31, 2022

Rincian saldo Jalan dan Jembatan per jenis barang adalah sebagai berikut:

Details of the balance of Roads and Bridges per type of goods are as follows:

Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)	Item
	/Quantity (M2)	Amount (Rp)	
Jalan	205,137	28,124,808,824	Road
Jembatan	-	-	Bridge
Total	205,137	28,124,808,824	Total

2) Irigasi

Nilai perolehan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp36.291.707.402 dan Rp36.333.840.402 terjadi kenaikan saldo sebesar Rp42.133.000 atau 0,12%.

2) Irrigation

The acquisition value of irrigation as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp36.291.707.402 and Rp36.333.840.402, respectively. an increase in the balance of Rp42.133.000 or 0.12%.

Kode/	Uraian Eselon I/	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
Code	Description Echelon I	December 31, 2022	December 31, 2021	Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	36,291,707,402	36,333,840,402	(42,133,000)	0.12

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Irigasi adalah sebagai berikut:

Details of adding and subtracting irrigation values are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai / Amount (Rp)	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	36,333,840,402	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Pembelian		Purchase
Transfer Masuk	96,131,000	Transfer In
Total Mutasi Tambah	96,131,000	Add Mutation Total
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Transfer Keluar	96,131,000	Transfer Out
Penghentian Aset Dari Penggunaan	42,133,000	
Total Mutasi Kurang	138,264,000	Total Mutation Less
Total Mutasi	-42,133,000	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	36,291,707,402	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	8,041,246,201	Accumulated Depreciation until December 31, 2022
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	28,250,461,201	Book Value As of December 31, 2022

Penambahan Irigasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Details of adding and subtracting irrigation values are as follows: □

Transaksi	Nilai / Amount (Rp)	Transaction
Pembelian	-	Purchase
Pengembalian Nilai Aset	-	Return on Asset Value
Total	-	Total

17. Aset Tetap (Lanjutan)**17. Fixed Assets (Continued)****d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Lanjutan)****d. Road, Irrigation and Network**

Rincian saldo Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

Details of Irrigation balance per type of goods are as follows:

Jenis Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)	Item
	/Quantity (M2)	Amount (Rp)	
Bangunan Air Irigasi	10	21,116,639,034	Irrigation Water Building
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	27	6,511,068,500	River/Beach Protection Buildings and Natural Disaster Management
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	57	3,496,355,900	Groundwater Resources Development Building
Bangunan Air Bersih/Air Baku	38	2,070,589,000	Clean Water Building/Raw Water
Bangunan Air Kotor	15	3,097,054,968	Dirty Water Building
Total	147	36,291,707,402	Total

3) Jaringan**3) Network**

Nilai perolehan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp332.170.383.197 dan Rp331.773.671.437 terjadi kenaikan sebesar Rp396.711.760 atau 0,12%.

Network acquisition value as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp332,170,383,197 and Rp331,773,671,437 respectively, an increase of Rp396,711,760 or 0.12%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	332,170,383,197	331,773,671,437	396,711,760	0.12

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jaringan adalah sebagai berikut:

The details of adding and subtracting Network values are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai / Amount (Rp)	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	331,773,671,437	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Pembelian	178,630,000	Purchase
Perolehan Lainnya	122,982,500	Other acquisition
Koreksi Saldo Awal	162,118,500	Correction of Beginning balance
Koreksi Susulan	163,962,500	Correction
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	149,054,800	Additional correction
Total Mutasi Tambah	776,748,300	Add Mutation Total
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Reklasifikasi Keluar	178,630,000	Reclassification Out
Penghentian Aset dari Penggunaan	39,288,040	Asset Termination from Use
Koreksi Pencatatan	162,118,500	Correction
Total Mutasi Kurang	380,036,540	Total Mutation Less
Total Mutasi	396,711,760	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	332,170,383,197	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	228,778,898,638	Accumulated Depreciation until December 31, 2022
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	103,391,484,559	Book Value As of December 31, 2022

Penambahan Jaringan yg dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut :

The addition of the network produced by expenditure is as follows:

Transaksi	Nilai / Amount (Rp)	Transaction
Pembelian	178,630,000	Purchase
Pengembangan Nilai Aset	0	Asset value development
Jumlah	178,630,000	Total

Penambahan Jaringan sebesar Rp178.630.000 tersebut bersumber dari realisasi Belanja sebagai berikut:

The additional network of Rp178,630,000 is sourced from the realization of spending as follows:

Uraian	Kode Akun	Nilai (Rp)	Description
	/Account Code	Amount (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5321	178,630,000	Equipment and Machinery Capital Expenditure
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5331	-	Capital Expenditure on Building and Properties
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5231	-	Purchase for Maintenance of Building and Properties
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5231	-	Purchase for Maintenance of Equipment and Machinery
Total		178,630,000	Total

17. Aset Tetap (Lanjutan)**17. Fixed Assets (Continued)****d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Lanjutan)****d. Road, Irrigation and Network**

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut :

Details of network balances per type of goods are as follows:

No	Jenis Barang	Kuantitas/Quantity	Nilai/Value	Types of goods
1	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	109	18,018,185,466	Clean water installation/ raw water
2	Instalasi Air Kotor	39	6,994,713,616	Dirty water installation
3	Instalasi Pengolahan Sampah	12	562,771,625	Waste treatment installation
4	Instalasi Pembangkit Listrik	3	244,250,568	Power plant installation
5	Instalasi Gardu Listrik	23	14,527,364,799	Electric substation installation
6	Instalasi Pertahanan	7	34,541,000	Defense installation
7	Instalasi Pengamanan	21	1,368,168,705	Security installation
8	Instalasi Lain	2,223	192,057,361,912	Other installation
9	Jaringan Air Minum	7	143,341,500	Drinking water network
10	Jaringan Listrik	175	96,616,801,999	Electric network
11	Jaringan Telepon	25	1,602,882,007	Phone network
Jumlah		2,644	332,170,383,197	Amount

e. Aset Tetap Lainnya**e. Other fixed assets**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20.782.449.355 dan Rp17.878.342.009 terjadi kenaikan sebesar Rp2.904.107.346 atau 16.24%.

The value of Other Fixed Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp20,782,449,355 and Rp17,878,342,009, respectively, a increase of Rp2,904,107,346 or 16.24%.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Other Fixed Assets are fixed assets that cannot be grouped into Land, Equipment and Machinery, Buildings and Buildings, Roads, Irrigation, and Networks.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	20,782,449,355	17,878,342,009	2,904,107,346	16.24

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Details of other fixed asset balances as of December 31, 2022 are as follows:

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Aset Tetap Renovasi	3,709,444,517	Fixed Asset Renovations
Aset Tetap Lainnya	17,073,004,838	Other Fixed Assets
Jumlah	20,782,449,355	Total

1) Aset Tetap Renovasi**1) Fixed Assets Renovation**

Nilai Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.709.444.517 dan Rp1.165.377.855 terjadi peningkatan sebesar Rp2.544.066.662 atau 218,30%.

The value of Renovated Fixed Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp3,709,444,517 and Rp1,165,377,855, respectively a increase of Rp2,544,066,662 or 218.30%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	3,709,444,517	1,165,377,855	2,544,066,662	218.30

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Renovasi adalah sebagai berikut:

Details of adding and reducing the value of fixed assets of renovations are as follows:

Jenis Transaksi	Jumlah / Total	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	1,165,377,855	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Pembelian	3,075,673,017	Purchase
Total Mutasi Tambah	3,075,673,017	Total mutations added
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Tranfer Keluar	332,319,500	Transfer out
Koreksi Pencatatan	120,004,855	Correction
Hibah Keluar	79,282,000	Grant Out
Total Mutasi Kurang	531,606,355	Total Mutation Less
Total Mutasi	2,544,066,662	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	3,709,444,517	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-	Accumulated Depreciation until December 31, 2022
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	3,709,444,517	Book Value As of December 31, 2022

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

e. Aset Tetap Lainnya (Lanjutan)

Penambahan Aset Tetap Renovasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Pembelian	3,075,673,017	Purchase
Pengembangan Nilai Aset	-	Asset value development
Jumlah	3,075,673,017	Total

e. Other Fixed Assets (Continued)

The addition of fixed assets of renovations produced by expenditure is as follows:

Penambahan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp3.075.673.017 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

The addition of fixed renovation assets of Rp3,075,673,017 is sourced from the realization of spending as follows:

Uraian	Kode Akun	Nilai (Rp)	Description
	/Account Code	Amount (Rp)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5331	484,501,902	Capital Expenditure on Building
Belanja Modal Lainnya	5361	2,591,171,115	Other Capital Expenditure
Total		3,075,673,017	Total

Rincian saldo Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.709.444.517 tersebut terdiri dari:

Details of the balance of fixed assets of renovation as of December 31, 2022 amounting to Rp3,709,444,517 consist of:

No	Pekerjaan/Profession	Keterangan/Information	Jumlah/Total
1	Renovasi Rumah Jabatan/ <i>Renovation of the Home Office</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	131,634,000
2	Pergantian Plumbing Kamar Mandi/ <i>Bathroom Plumbing Change</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	47,190,000
3	Pemasangan Vini/ <i>Vinyl Installation</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,830,000
4	Pemasangan Sanitari Rujab Ketua/ <i>Sanitary Installation house of chairman</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	25,421,000
5	Kanopi Lantai I/ <i>Floor Canopy I</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,744,000
6	Pemasangan Keramik Lantai II/ <i>Floor Ceramic Installation II</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,623,000
7	Pemasangan Keramik Lantai II/ <i>Floor Ceramic Installation II</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,390,000
8	Pemasangan Keramik Teras Lantai II/ <i>Floor Terrace Ceramic Installation II</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,273,000
9	Kanopi Lantai II/ <i>Second Floor Canopy</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,469,000
10	Renovasi Kamar Utama/ <i>Master Room Renovation</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	43,510,000
11	Renovasi Ruang Tamu Utama/ <i>Main Living Room Renovation</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,433,000
12	Renovasi Ruang Tamu/ <i>Living Room Remodeling</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	49,346,000
13	Renovasi Ruang Keluarga/ <i>Family Room Remodeling</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	42,166,000
14	Renovasi rumah jabatan wakil ketua/ <i>Renovation of the house of the deputy chairman</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	39,073,000
15	Pembuatan Kolam Ikan/ <i>Fish Pond Making</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	25,850,000
16	Shower Box Rujab Ketua/ <i>Shower Box chairman's house</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	39,737,000
17	Pemasangan Railing Balkon Rujab Ketua/ <i>Balcony Railing Installation chairman's house</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	42,418,000
18	Kolam Ikan Rujab Ketua/ <i>Fish pond chairman's house</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	48,444,000
19	Kanopi dan Penutup Pagar Rujab Ketua/ <i>Canopy and Fence Cover chairman's house</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	84,540,000
20	Renovasi Toilet dan Teras Rujab Jl Denpasar Jakarta/ <i>Renovation of toilets and terraces of Chairman's House held on Jl. Denpasar, Jakarta</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	184,722,000
21	Renovasi Gudang dan Area Jemur Rumdin Jl Denpasar Jakarta/ <i>Warehouse Renovation and Drying Area official residence Jl Denpasar Jakarta</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	195,082,000
22	Renovasi Kamar Mandi Lt 1 Rumdin Jl Denpasar Jakarta/ <i>Bathroom Renovation 1st floor of official residence Jl Denpasar Jakarta</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	164,101,000
23	Renovasi Area Jemur Utama Rumdin Jl Denpasar Jakarta/ <i>Renovation of the Main Drying Area of official residence Jl Denpasar Jakarta</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	134,730,000
24	Renovasi Ruang Kerja Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi Riau/ <i>Renovation of the Sub-auditorate Workspace at BPK Representative of Riau Province</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	175,037,898
25	Renovasi Ruang Kerja Lt 3 Tahap 2 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau/ <i>Renovation of Workspace Floor 3 Phase 2 at BPK Riau Province</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	83,290,959
26	Pemasangan Partisi HPL Ruang Auditor Lt 3 pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo/ <i>Installation of HPL Partition Auditor Room Floor 3 at BPK Representative for Gorontalo Province</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	128,200,000
27	Renovasi Ruang Aula Lt 4 Gedung B pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat/ <i>Renovation of Hall 4th Floor Building B at BPK Representative of West Sumatera Province</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	105,958,000
28	Renovasi Ruang Cash pada BPK Perwakilan Provinsi Papua/ <i>Renovation of Cash Room at BPK Papua Province Representative</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	67,900,000
29	Renovasi Ruang Kerja Staf dan Kasub Auditor Lt 3 pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu/ <i>Renovation of Staff Workspace and Head of Sub-Auditor Lt 3 at BPK Bengkulu Province Representative</i>	Sekretariat Jenderal/ <i>General Secretariat</i>	134,269,600

17. Aset Tetap (Lanjutan)**17. Fixed Assets (Continued)****e. Aset Tetap Lainnya (Lanjutan)****e. Other Fixed Assets (Continued)**

No	Pekerjaan/Profession	Keterangan/Information	Jumlah/Total
30	Renovasi Ruang Kerja Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung /Renovation of the Sub-auditorate Workspace at BPK Representative of the Bangka Belitung Islands Province	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	40,084,000
31	Renovasi Ruang Kerja Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi NTT /Renovation of the Sub-auditorate Workspace at the BPK Representative for the Province of NTT	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	44,746,320
32	Renovasi Ruang Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTB /Renovation of Examiner's Room at BPK Representative of NTB Province	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	63,841,000
33	Renovasi Ruang Kerja Subauditorat pada Gedung Eks Balai Diklat Makassar pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan /Renovation of the Sub-auditorate Workspace in the Former Makassar Training Center Building at the BPK Representative for South Sulawesi Province	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	133,053,000
34	Renovasi Ruang Kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Bali /Renovation of Workspaces at BPK Representative of Bali Province	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	192,700,000
35	Rehab Ruangan Cash pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara /Cash Room Rehab at BPK North Sulawesi Province Representative	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	77,810,778
36	Renovasi Kamar Mandi Lt 2 Rumdin Jl Denpasar Jakarta /Bathroom Renovation 2nd floor of Official Residence Jl Denpasar Jakarta	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	167,641,000
37	Renovasi Teras Lt 2 Rumdin Jl Denpasar Jakarta /Terrace Renovation 2nd floor of Official Residence Jl Denpasar Jakarta	Sekretariat Jenderal/General Secretariat	165,684,000
38	Renovasi Toilet Lt 2 Tahap 2 Balai Diklat PKN Bali /Toilet Renovation 2nd Floor Phase 2 Bali PKN Training Center	Badan Diklat PKN/PKN Training Board	167,633,976
39	Renovasi Toilet Wisma Lt 1 Balai Diklat PKN Bali /Renovation of Wisma 1st Floor Toilet, Bali PKN Training Center	Badan Diklat PKN/PKN Training Board	122,192,352
40	Renovasi Auditorium Lt 3 Balai Diklat PKN Yogyakarta /Renovation of the PKN Renovation of the 3rd Floor Auditorium of Yogyakarta PKN Training Center	Badan Diklat PKN/PKN Training Board	194,675,574
Jumlah / Total			3,709,444,517

2) Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.073.004.838 dan Rp16.712.964.154 terjadi kenaikan sebesar Rp360.040.684 atau 2,15%.

2) Other Fixed Assets

The value of Other Fixed Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp17,073,004,838 and Rp16,712,964,154, respectively, an increase of Rp360,040,684 or 2.15%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon 1	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	17,073,004,838	16,712,964,154	360,040,684	2.15

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Details of addition and reduction of other fixed asset values are as follows:

Jenis Transaksi	Jumlah / Total	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	16,712,964,154	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Pembelian	573,008,264	Purchase
Perolehan Lainnya	43,483,000	Other acquisition
Koreksi Pencatatan Nilai Tambah	28,333,943	Added correction
Transfer Masuk	345,587,150	Incoming Transfer
Reklasifikasi Masuk	87,400,000	Incoming Reclassification
Total Mutasi Tambah	1,077,812,357	Total mutations added
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	120,416,943	Reduction correction
Reklasifikasi Keluar	127,122,840	Reclassification Out
Transfer Keluar	345,587,150	Transfer out
Penghentian Aset dari Penggunaan	124,644,740	Asset Termination from Use
Total Mutasi Kurang	717,771,673	Total Mutation Less
Total Mutasi	360,040,684	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	17,073,004,838	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	1,100,934,254	Accumulated Depreciation until December 31, 2022
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	15,972,070,584	Book Value As of December 31, 2022

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

The addition of Other Fixed Assets generated by Expenditure is as follows:

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

e. Aset Tetap Lainnya (Lanjutan)

e. Other Fixed Assets (Continued)

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Pembelian	573,008,264	Purchase
Pengembangan Nilai Aset	-	Asset value development
Jumlah	573,008,264	Total

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp573.008.264 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

The addition of Other Fixed Assets of Rp573,008,264 is sourced from the realization of the following expenditures:

Uraian	Kode Akun /Account Code	Nilai (Rp) Amount (Rp)	Description
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5321	43,551,840	Equipment and Machinery Capital Expenditure
Belanja Modal Lainnya	5361	529,456,424	Other Capital Expenditure
Belanja Barang	52	-	Goods Expenditure
Total		573,008,264	Total

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

The balance of other Fixed Assets per type of goods is as follows:

N	Jenis Barang	Kuantitas/Quantity	Nilai/Value	Types of goods
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	114,087	12,789,307,768	Clean water installation/ raw water
2	Bahan Perpustakaan Terekam	7	741,926	Dirty water installation
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2,450	799,287,509	Waste treatment installation
4	Barang Bercorak Kesenian	848	3,209,680,635	Power plant installation
5	Alat Bercorak Kebudayaan	22	247,740,000	Electric substation installation
6	Barang Koleksi Non Budaya	1	26,247,000	Defense installation
	Jumlah	117,415	17,073,004,838	Amount

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

f. Construction in Progress(CIP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.800.000 dan Rp8.560.897.430 terjadi penurunan sebesar Rp8.512.097.430 atau 99,43%.

The Balance of Construction in Progress as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp8,560,897,430 and Rp8,800,000 respectively, there was an increase of Rp8,512,097,430 or 99.43%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	48,800,000	8,560,897,430	(8,512,097,430)	99.43

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

The details of the addition and reduction of the value of Construction In Progress are as follows:

Jenis Transaksi	Jumlah / Total	Transaction Type
Saldo per 31 Desember 2021	8,560,897,430	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah :		Add Mutation:
Perolehan/Penambahan KDP	404,081,233	CIP Acquisition/ Addition
Pengembangan KDP	634,701,655	CIP Development
Koreksi Nilai KDP Bertambah	1,029,426,051	CIP Correction
Total Mutasi Tambah	2,068,208,939	Total mutations added
Mutasi Kurang :		Less Mutation:
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	11,940,000	Completion of Development with CIP
Pengembangan Melalui KDP	10,568,366,369	CIP Development
Total Mutasi Kurang	10,580,306,369	Total Mutation Less
Total Mutasi	(8,512,097,430)	Total Mutation
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	48,800,000	Book Value As of December 31, 2022

Mutasi Tambah KDP sebesar Rp2.068.208.939 berasal dari:

Changes in Add CIP of Rp2,068,208,939 came from:

- 1) Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp404.081.233 pada satker Sekretariat Jenderal dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- 2) Pengembangan KDP sebesar Rp634.701.655 pada satker Sekretariat Jenderal.
- 3) Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp1.029.426.051 pada satker Sekretariat Jenderal dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

- 1) Acquisition/ Addition of CIP of Rp 404,081,233 for the Secretariat General and BPK Representative Office of North Maluku Province.
- 2) CIP development of Rp634,701,655 for the Secretariat General work unit.
- 3) Correction of CIP is Rp1,029,426,051 at the Secretariat General and BPK Representative Office of Maluku Province.

17. Aset Tetap (Lanjutan)

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (Lanjutan)

Mutasi Kurang KDP sebesar Rp10.580.306.369 berasal dari:

- 1) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp11.940.000 pada satker BPK Perwakilan Provinsi Maluku.
- 2) Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp10.568.366.369 pada satker Sekretariat Jenderal dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Penambahan nilai KDP merupakan hasil dari Belanja Modal senilai Rp1.038.782.888 terdiri dari:

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Pengembangan KDP	404,081,233	KDP Development
Perolehan/Penambahan KDP	634,701,655	KDP Acquisition/Addition
Jumlah	1,038,782,888	Total

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan KDP/KDP Description	Jenis Pekerjaan / Types of Jobs	Nilai Kontrak / Contract Value	Realisasi Belanja Modal Pembentuk KDP / Realization of Capital Expenditures Forming CIP	Nilai Buku KDP/ Book Value	CIP
1	Pembangunan Mess Perwakilan Provinsi Jawa Barat / Construction of Representative Mess of West Java Province	Perencanaan/ Planning	48,800,000	48,800,000	48,800,000	
Konstruksi/ Construction		-	-	-		
Pengawasan/ Supervision		-	-	-		
Jumlah / Total			48,800,000	48,800,000	48,800,000	

Realisasi belanja pembentuk KDP terdiri dari rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai/Value	Description
Penambahan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2014	48,800,000	Addition to the realization of Capital Expenditures of Building and Properties in 2014
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020	99,495,000	Addition to the realization of Capital Expenditures of Building and Properties in 2020
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021	9,172,529,998	Addition to the realization of Capital Expenditures of Equipment and Machinery in 2021
Penambahan dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022	1,021,282,888	Addition to the realization of Capital Expenditures of Building in 2022
Penambahan dari realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022	17,500,000	Addition to the realization of Building and Properties Maintenance Expenditure in 2022
Jumlah	10,359,607,886	Total

Realisasi belanja modal pembentuk KDP berbeda dengan nilai buku KDP sebesar Rp10.310.807.886 karena telah selesai dan menjadi aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.500.000 dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.562.806.369.

17. Fixed Assets (Continued)

f. Construction in Progress(CIP) (Continued)

Reduction Correction is Rp10,580,306,369 came from:

- 1) Completion of Development With CIP of Rp11,940,000 for the BPK Representative Office of Maluku Province.
- 2) Development through CIP of Rp 10,568,366,369 for the Secretariat General and BPK Maluku Province Representative and North Maluku Province Representative BPK work units.

The additional value of CIP is generated from Capital Expenditure of Rp 1,038,782,888 consisting of:

The amount of Construction in Progress as of December 31, 2022 is as follows:

The realization of expenditure for forming CIP consists of the following details:

The realization of CIP's capital expenditure is different from CIP's book value of Rp10,310,807,886 because it has been completed and has become Equipment and Machinery assets of Rp17,500,000 and Buildings and Properties of Rp10,562,806,369.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.645.291.544.735 dan Rp2.475.787.576.188 terjadi kenaikan sebesar Rp169.503.968.547 atau 6,85%.

g. Accumulated Depreciation of Fixed Assets

The Accumulated Depreciation Value of Fixed Assets as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp2,645,291,544,735 and Rp2,475,787,576,188, respectively, an increase of Rp169,503,968,547 or 6.85%.

17. Aset Tetap (Lanjutan)

17. Fixed Assets (Continued)

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Lanjutan)

g. Accumulated Depreciation of Fixed Assets (Continued)

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	2,645,291,544,735	2,475,787,576,188	169,503,968,547	6.85

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Accumulated Depreciation of Fixed Assets is a contra account of Fixed Assets which is presented based on the accumulated value adjustment regarding with the decrease in the capacity and benefit of Fixed Assets other than Land and Construction in Progress (CIP).

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

The summary of Accumulated Depreciation of Fixed Assets as of December 31, 2022 is as follows:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan/ Acquisition value	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai Buku/Book value	Fixed Asset
1	Tanah	6,124,822,220,744	-	6,124,822,220,744	land
2	Peralatan dan Mesin	2,295,971,882,697	1,999,854,682,711	296,117,199,986	Equipment and Machinery
3	Gedung dan Bangunan	2,620,760,438,900	383,423,684,970	2,237,336,753,930	Building
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	396,586,899,423	260,912,242,800	135,674,656,623	Roads, Irrigation and Networks
5	Aset Tetap Lainnya	20,782,449,355	1,100,934,254	19,681,515,101	Other Fixed Asset
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	48,800,000	-	48,800,000	Construction In Progress
	Jumlah	11,458,972,691,119	2,645,291,544,735	8,813,681,146,384	Total

18. Piutang Jangka Panjang

18. Long - Term Receivable

	31 Desember/December 31, 2022	2021	
Piutang Tagihan TP/TGR	3,274,971,321	3,052,875,377	Receivables of Indemnification of Treasury/Claims Bills
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(2,926,290,062)	(2,656,503,072)	Allowance for Doubtful Accounts - Indemnification of Treasury/Claims Bills
Jumlah	348,681,259	396,372,305	Total

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp348.681.259 dan Rp396.372.305. Terjadi penurunan sebesar Rp47.691.046 atau 12,03%.

The balance of Long-Term Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp348,681,259 and Rp396,372,305, respectively. There was a decrease of Rp47,691,046 or 12.03%.

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Long-Term Receivables are receivables that will be due or will be realized more than 12 months from the reporting date.

a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.274.971.321 dan Rp3.052.875.377 terjadi kenaikan sebesar Rp222.095.994 atau 7,27%.

a. Receivable Claims Treasury Claims / Claims for Compensation

The balance of Receivables Claims Treasury/ Claims for Compensation as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp3,274,971,321 and Rp3,052,875,377, respectively, there was a decrease of Rp222,095,994 or 7.27%.

18. Piutang Jangka Panjang (Lanjutan)

a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Lanjutan)

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 berasal dari Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	3,052,875,377	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Mutation Add:
Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Tagihan TP	14,400,000	Reclassification of Incoming from Current Section of TP Bills
Reklasifikasi Masuk dari Bagian Lancar Tagihan TGR	58,530,700	Reclassification of Incoming from Current Section of TGR Bills
Penyesuaian Kurs s.d. per 30 Juni 2022	106,938,301	Exchange Rate Adjustment as of June 30, 2022
Penyesuaian Kurs s.d. per 30 September 2022	73,694,506	Exchange Rate Adjustment as of September 30, 2022
Penyesuaian Kurs s.d. per 31 Desember 2022	89,393,837	Exchange Rate Adjustment as of December 31, 2022
Total Mutasi Tambah	342,957,344	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Pelunasan TGR	-	Payment of TGR
Pembayaran TP	14,400,000	TP Payment
Pembayaran TGR	33,530,700	TGR Payment
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar Tagihan TP	14,400,000	Reclassification Out to Current Section of TP Bills
Reklasifikasi Keluar ke Bagian Lancar Tagihan TGR	58,530,700	Reclassification Out to Current Section of TGR Bills
Total Mutasi Kurang	120,861,400	Total Less Mutation:
Total Mutasi	222,095,944	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	3,274,971,321	Balance as of December 31, 2022

Mutasi tambah sebesar Rp342.957.344 berasal dari:

- Adanya reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Tagihan TP ke Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp14.400.000;
- Adanya reklasifikasi masuk dari Bagian Lancar Tagihan TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR pada tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp58.530.700;
- Penyesuaian selisih kenaikan kurs US Dollar ke mata uang Rupiah atas piutang TGR yang telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp106.938.301;
- Penyesuaian selisih kenaikan kurs US Dollar ke mata uang Rupiah atas piutang TGR yang telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Per 30 September 2022 dibandingkan dengan saldo 30 Juni 2022 sebesar Rp73.694.506;

18. Long - Term Receivable (Continued)

a. Receivable Claims Treasury Claims / Claims for Compensation (Continued)

Treasury Claims are claims set by the State Audit Board to the treasurer due to negligence or unlawful acts resulting in state/regional losses.

Meanwhile, a claim for compensation is a process carried out against a civil servant or non-civil servant who is not a treasurer with the aim of demanding compensation for a loss suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by the employee or negligence in carrying out his duties. execution of their duties.

The balance of Receivable Claims for Treasury Claims/Claims for Compensation as of December 31, 2022 came from Treasury Claims and Claims for Compensation.

The details of adding and subtracting the value of the Treasury Claims Claims/Indemnity Claims are as follows:

Added mutations amounting to Rp342,957,344 came from:

- There is a reclassification of entry from the Current Section of TP Bills to Accounts Receivable TP/TGR on January 2, 2022 in the amount of Rp. 14,400,000.00;
- There is an incoming reclassification from the Current Section of TGR Bills to TP/TGR Receivables on January 2, 2022 in the amount of Rp58,530,700;
- Adjustment of the difference in the increase in the US Dollar exchange rate to the Rupiah currency on TGR receivables that have been transferred to the Ministry of Finance cq. Directorate General of State Assets (DJKN) as of June 30, 2022 compared to December 31, 2021 balance of Rp 106,938,301;
- Adjustment of the difference in the increase in the US Dollar exchange rate to the Rupiah currency on TGR receivables that have been transferred to the Ministry of Finance cq. Directorate General of State Assets (DJKN) as of September 30 2022 compared to the balance of June 30 2022 of Rp 73,694,506;

18. Piutang Jangka Panjang (Lanjutan)

a. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Lanjutan)

- 5) Penyesuaian selisih kenaikan kurs US Dollar ke mata uang Rupiah atas piutang TGR yang telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan saldo 30 September 2022 sebesar Rp89.393.837.

Mutasi kurang sebesar Rp120.861.400 berasal dari:

- 1) Pelunasan TP seorang pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.400.000;
- 2) Pelunasan TP seorang pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.530.700;
- 3) Adanya reklasifikasi keluar dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TP pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.400.000;
- 4) Adanya reklasifikasi keluar dari Piutang Tagihan TP/TGR ke Bagian Lancar Tagihan TGR pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp58.530.700.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.274.971.321 terdiri dari:

- 1) Piutang TGR atas 2 (dua) orang pegawai masing-masing sebesar Rp1.433.741.903 dan Rp1.490.795.993 karena wanprestasi wajib kerja dan telah dialihkan penagihannya ke Kementerian Keuangan;
- 2) Piutang TGR atas 2 (dua) orang pegawai sebesar Rp35.559.575 karena wanprestasi wajib kerja;
- 3) Piutang TP atas seorang pegawai sebesar Rp314.873.850 karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan.

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.926.290.062 dan Rp2.656.503.072. Terdapat kenaikan sebesar Rp30.050.820 atau sebesar 1,14%.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR sebesar Rp2.926.290.062 terdiri dari:

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR sebesar Rp1.433.741.903 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp1.433.741.903 dikategorikan ke dalam kualitas macet, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.433.741.903 x 100%);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR sebesar Rp1.490.795.993 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp1.490.795.993 dikategorikan ke dalam kualitas macet, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1.490.795.993 x 100%);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP sebesar Rp1.574.369 (berasal dari kerugian wajib kerja seorang pegawai sebesar Rp314.873.850 dikategorikan ke dalam kualitas lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp314.873.850 x 5%);

18. Long - Term Receivable (Continued)

a. Receivable Claims Treasury Claims / Claims for Compensation (Continued)

- 5) Adjustment of the difference in the increase in the US Dollar exchange rate to the Rupiah currency on TGR receivables that have been transferred to the Ministry of Finance cq. The Directorate General of State Assets (DJKN) as of December 31, 2022 compared to the September 30, 2022 balance of Rp 89,393,837.

Less mutations amounting to Rp120,861,400 came from:

- 1) Payment of the TGR of an employee from January 1 2022 until December 31, 2022 in the amount of Rp14,400,000;
- 2) Payment of the TGR of an employee from January 1 2022 until December 31, 2022 in the amount of Rp33,530,700;
- 3) There is an outgoing reclassification of TP/TGR Claims Receivable to the Current Section of TP Receivables on December 31, 2022 in the amount of Rp 14,400,000;
- 4) There is an outgoing reclassification of TP/TGR Receivables to the Current Section of TGR Receivables on December 31, 2022 in the amount of Rp 58,530,700.

The balance of TP/TGR Accounts Receivable as of December 31, 2022 amounted to Rp3,274,971,321 consisting of:

- 1) TGR receivables from 2 (two) employees amounting to Rp1,433,741,903 and Rp1,490,795,993 respectively due to statutory default and the collection has been transferred to the Ministry of Finance;
- 2) TGR receivables for 2 (two) employees amounting to Rp35,559,575 due to default on mandatory work;
- 3) TP receivables from an employee amounting to Rp314,873,850 due to negligence in carrying out treasury duties.

b. Allowance for Doubtful Accounts - Claims for Treasury Claims / Claims for Compensation (TP/TGR)

Allowance for Doubtful Accounts Balance - TP/TGR receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp2.926.290.062 and Rp2.626.452.252, respectively There was an increase of Rp 30,050,820 or 1.14%.

Allowance for Uncollectible Accounts - Treasury Claims/Claims for Compensation (TP/TGR) is an estimate of uncollectible Treasury Claims/Claims for Compensation (TP/TGR) which is determined by the quality of each TP/TGR receivable.

Allowance for Doubtful Accounts Balance - TP/TGR receivables of Rp2,926,290,062 consists of:

- 1) Allowance for Uncollectible Accounts TP/TGR amounting to Rp1,433,741,903 (derived from the loss of an employee's mandatory work of Rp1,433,741,903 categorized into bad quality, so the allowance for bad debts is Rp1,433,741,903 x 100%);
- 2) Allowance for Doubtful Accounts - TP/TGR receivables amounting to Rp1,490,795,993 (derived from the loss of an employee's mandatory employment of Rp1,490,795,993 categorized into bad quality, so the allowance for bad debts is Rp1,490,795,993 x 100%);
- 3) Allowance for Doubtful Accounts - TP receivables amounting to Rp1,574,369 (derived from an employee's mandatory employment loss of Rp314,873,850 categorized into current quality, so the allowance for bad debts is Rp314,873,850 x 5%);

18. Piutang Jangka Panjang (Lanjutan)

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Lanjutan)

- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TGR sebesar Rp177.798 (berasal dari kerugian wajib kerja dua orang pegawai sebesar Rp35.559.575 dikategorikan ke dalam kualitas lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp35.559.575 x 5%).

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp269.786.990 disebabkan oleh:

- 1) Penambahan dari Penyesuaian atas reklasifikasi penyisihan Piutang tidak Tertagih-Bagian Lancar TP ke penyisihan Piutang tidak Tertagih- Tagihan TP/TGR sebesar Rp72.000;
- 2) Penambahan dari Penyesuaian atas reklasifikasi penyisihan Piutang tidak Tertagih-Bagian Lancar TGR ke penyisihan Piutang tidak Tertagih- Tagihan TP/TGR sebesar Rp292.654;
- 3) Penambahan penyisihan piutang karena adanya penyesuaian atas kenaikan kurs atas saldo Piutang Tagihan TP/TGR dua orang pegawai per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021. Kenaikan kurs tengah Bank Indonesia tersebut menyebabkan kenaikan penyisihan piutang sebesar Rp106.938.301 (Rp52.769.832 + Rp54.168.469);
- 4) Penambahan penyisihan piutang karena adanya penyesuaian atas kenaikan kurs atas saldo Piutang Tagihan TP/TGR dua orang pegawai per 30 September 2022 dibandingkan dengan 30 Juni 2022. Kenaikan kurs tengah Bank Indonesia tersebut menyebabkan kenaikan penyisihan piutang sebesar Rp73.694.506 (Rp36.365.331,00 + Rp37.329.175,00);
- 5) Penambahan penyisihan piutang karena adanya penyesuaian atas kenaikan kurs atas saldo Piutang Tagihan TP/TGR dua orang pegawai per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 30 September 2022. Kenaikan kurs tengah Bank Indonesia tersebut menyebabkan kenaikan penyisihan piutang sebesar Rp89.393.837 (Rp44.112.331 + Rp45.281.506);
- 6) Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang sebesar Rp36.000 karena pembayaran piutang TP senilai Rp7.200.000 selama Semester I tahun 2022 (Rp7.200.000 x 5%);
- 7) Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang sebesar Rp83.827 karena pembayaran piutang TGR senilai Rp16.765.350 selama Semester I tahun 2022 (Rp16.765.350 x 5%);
- 8) Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang sebesar Rp36.000 karena pembayaran piutang TP senilai Rp7.200.000 selama Semester II tahun 2022 (Rp7.200.000 x 5%);
- 9) Pengurangan dari Penyesuaian atas Penyisihan Piutang sebesar Rp83.827 karena pembayaran piutang TGR senilai Rp16.765.350 selama Semester II tahun 2022 (Rp16.765.350 x 5%);
- 10) Pengurangan dari Penyesuaian atas reklasifikasi penyisihan Piutang tidak Tertagih- Tagihan TP/TGR ke penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP sebesar Rp72.000

18. Long - Term Receivable (Continued)

b. Allowance for Doubtful Accounts - Claims for Treasury Claims / Claims for Compensation (TP/TGR) (Continued)

- 4) Allowance for Doubtful Accounts - TGR receivables of Rp177,798 (derived from the loss of mandatory work for two employees of Rp35,559,575 are categorized as current quality, so that the allowance for bad debts is Rp35,559,575 x 5%).

Allowance for Doubtful Accounts Balance – TP/TGR receivables increased by Rp269,786,990 due to:

- 1) The addition of the Adjustment for the reclassification of the allowance for Doubtful Accounts-Current Portion of TP to the allowance for Doubtful Accounts-TP/TGR in the amount of Rp72,000;
- 2) The addition of the Adjustment for the reclassification of the allowance for Doubtful Accounts-Current Share of TGR to the allowance for Doubtful Accounts-TP/TGR in the amount of Rp292,654;
- 3) The addition of allowance for receivables was due to an adjustment to the increase in the exchange rate for the balance of Receivables Receivable TP/TGR for two employees as of June 30, 2022 compared to December 31, 2021. The increase in the Bank Indonesia middle rate caused an increase in the allowance for receivables by Rp106,938,301 (Rp52,769,832 + Rp54,168,469);
- 4) The additional allowance for receivables was due to an adjustment to the increase in the exchange rate for the balance of TP/TGR Receivables for two employees as of September 30, 2022 compared to June 30, 2022. The increase in the Bank Indonesia middle rate resulted in an increase in the allowance for receivables by Rp.73,694,506 (Rp.36,365,331.00 + Rp 37,329,175.00);
- 5) The additional allowance for receivables was due to an adjustment to the increase in the exchange rate for the balance of TP/TGR Receivables for two employees as of December 31, 2022 compared to September 30, 2022. The increase in the Bank Indonesia middle rate resulted in an increase in the allowance for receivables by Rp.89,393,837 (Rp.44,112,331 + Rp.45. 281,506);
- 6) Deduction from Adjustment for Allowance for Receivables of Rp 36,000 due to payment of TP receivables of Rp 7,200,000 during Semester I 2022 (Rp 7,200,000 x 5%);
- 7) Deduction from Adjustment for Allowance for Receivables of Rp 83,827 due to payment of TGR receivables of Rp 16,765,350 during Semester I 2022 (Rp 16,765,350 x 5%);
- 8) Deduction from Adjustment for Allowance for Receivables of Rp 36,000 due to payment of TP receivables of Rp 7,200,000 during Semester II 2022 (Rp 7,200,000 x 5%);
- 9) Deduction from Adjustment for Allowance for Receivables of Rp 83,827 due to payment of TGR receivables of Rp 16,765,350 during Semester II 2022 (Rp 16,765,350 x 5%);
- 10) Deduction from Adjustment for reclassification of allowance for Uncollectible Accounts- TP/TGR Bills to allowance for Uncollectible Accounts Current Part TP of Rp 72,000

18. Piutang Jangka Panjang (Lanjutan)

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Lanjutan)

11 Pengurangan dari Penyesuaian atas reklasifikasi penyisihan Piutang tidak Tertagih- Tagihan TP/TGR ke penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TGR sebesar Rp292.654.

19. Aset Lainnya

	31 Desember/December 31, 2022	2021
Aset Tak Berwujud	205,224,325,682	197,781,459,838
Aset Lain-Lain	15,965,917,960	13,566,193,478
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(169,962,317,265)	(151,245,736,576)
Jumlah	51,227,926,377	60,101,916,740

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

a. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp205.224.325.682 dan Rp197.781.459.838 terjadi kenaikan sebesar Rp7.442.865.844 atau 3,76%.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPK berupa Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	205,224,325,682	197,781,459,838	7,442,865,844	3.76

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Software	90,446,007,604	Software
Lisensi	110,229,676,461	License
Aset Tak Berwujud Lainnya	4,548,641,617	Other Intangible Assets
Jumlah	205,224,325,682	Total

1) Software

Saldo Software per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing masing sebesar Rp90.446.007.604 dan Rp86.227.159.804 terjadi kenaikan sebesar Rp4.218.847.800 atau 4,89%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	90,446,007,604	86,227,159,805	4,218,847,799	4.89

18. Long - Term Receivable (Continued)

b. Allowance for Doubtful Accounts - Claims for Treasury Claims / Claims for Compensation (TP/TGR) (Continued)

11 Deduction from the Adjustment for the reclassification of the allowance for Doubtful Receivables - TP/TGR Bills to the allowance for Uncollectible Receivables Current Part of TGR in the amount of Rp 292,654.

19. Other Assets

	31 Desember/December 31, 2022	2021
Aset Tak Berwujud	205,224,325,682	197,781,459,838
Aset Lain-Lain	15,965,917,960	13,566,193,478
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(169,962,317,265)	(151,245,736,576)
Jumlah	51,227,926,377	60,101,916,740

Other Assets are assets that can not be grouped either into Current Assets or Fixed Assets.

a. Intangible Assets

The value of Intangible Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp205.224.325.682 and Rp197.781.459.838, respectively, an increase of Rp7,442,865,844 or 3.76%.

Intangible assets are assets that can be identified and owned, but do not have a physical form. Intangible Assets at BPK are in the form of Software, Licenses, and Other Intangible Assets used to support office operations.

The details of Intangible Assets as of December 31, 2022 are as follows:

1) Software

Software balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 90,446,007,604 and Rp86,227,159,804, respectively, an increase of Rp4,218,847,800 or 4.89%.

19. Aset Lainnya (lanjutan)

19. Other Assets (Continued)

a. Aset Tak Berwujud (Lanjutan)

a. Intangible Assets (Continued)

1) Software (Lanjutan)

Rincian penambahan dan pengurangan Software adalah sebagai berikut:

1) Software (Continued)

Details of adding and removing software are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	86,227,159,804	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	278,924,000	Correction of Recording
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3,316,902,000	Asset Value Development (Direct)
Pembelian	772,315,800	Purchase
Total Mutasi Tambah	4,368,141,800	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Penghentian Aset dari Penggunaan	67,820,000	Asset Termination from Use
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	81,474,000	Correction of Recording
Total Mutasi Kurang	149,294,000	Total Less Mutation:
Total Mutasi	4,218,847,800	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	90,446,007,604	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2022	86,189,783,570	Akumulated Amortization for 31 Desember 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	4,256,224,034	Book Value as of December 31, 2022

Penambahan Software yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Software additions produced by Expenditures are as follows:

Transaksi	Nilai /Amount	Transaction
Saldo per 31 Desember 2021		Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	772,315,800	Correction of Recording
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3,316,902,000	Asset Value Development (Direct)
Total	4,089,217,800	Total

Penambahan Software sebesar Rp4.089.217.000 tersebut bersumber dari realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

The addition of Software amounting to Rp 4,089,217,000 is sourced from the realization of Capital Expenditures as follows:

Kode Akun/ Account Code	Uraian	Nilai /Amount	Description
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	Capital Expenditures for Equipment and Machinery
5361	Belanja Modal Lainnya	4,089,217,800	Other Capital Expenditures
	Jumlah Belanja	4,089,217,800	Total

2) Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp110.229.676.461 dan Rp107.068.198.154 terjadi kenaikan sebesar Rp3.161.478.307 atau 2,95%.

2) License

License values as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 110,229,676,461 and Rp 107,068,198,154 respectively, an increase of Rp 3,161,478,307 or 2.95%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon 1	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		December 31, 2022	December 31, 2021	Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	110,229,676,461	107,068,198,154	3,161,478,307	2.95

19. Aset Lainnya (Lanjutan)**19. Other Assets (Continued)****2) Lisensi (Lanjutan)****2) License (Continued)**

Rincian penambahan dan pengurangan Lisensi adalah sebagai berikut:

Details of License addition and reduction are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai/ Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	107,068,198,154	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Pembelian	3,279,547,396	Purchase
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	97,735,500	Asset Value Development (Direct)
Total Mutasi Tambah	3,377,282,896	Total Mutation Add
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Penghentian Aset dari Penggunaan	215,804,589	Asset Termination from Use
Total Mutasi Kurang	215,804,589	Total Less Mutation:
Total Mutasi	3,161,478,307	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	110,229,676,461	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2022	68,725,693,872	Akumulated Amortization for 31 Desember 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	41,503,982,589	Book Value as of December 31, 2022

Penambahan Lisensi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Additional Licenses generated by Expenditures are as follows:

Transaksi	Nilai /Amount	Transaction
Pembelian	3,279,547,396	Purchase
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	97,735,500	Asset Value Development (Direct)
Total	3,377,282,896	Total

Penambahan Lisensi sebesar Rp3.377.282.896 tersebut bersumber dari realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

The additional License amounting to Rp 3,377,282,896 was sourced from the realization of Capital Expenditures as follows:

Kode Akun/ Account Code	Uraian	Nilai /Amount	Description
522191	Belanja Jasa Lainnya	-	Expenditures for Other Services
5361	Belanja Modal Lainnya	3,377,282,896	Expenditures for Other Capital
	Jumlah Belanja	3,377,282,896	Total

3) Aset Tak Berwujud Lainnya**3) Other Intangible Asset**

Nilai Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.548.641.617 dan Rp4.486.101.880 terjadi kenaikan sebesar Rp62.539.737 atau 1,39%

The value of Other Intangible Assets as of 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to Rp 4,548,641,617 and Rp 4,486,101,880, an increase of Rp 62,539,737 or 1.39%

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		December 31, 2022	December 31, 2021	Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	4,548,641,617	4,486,101,880	62,539,737	1.39

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

Details of the addition and reduction of Other Intangible Assets are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	4,486,101,880	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Pembelian	259,989,737	Purchase
Total Mutasi Tambah	259,989,737	Total Mutation Add
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Koreksi Pencatatan	197,450,000	Correction of Recording
Total Mutasi Kurang	197,450,000	Total Less Mutation:
Total Mutasi	62,539,737	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	4,548,641,617	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2022	-	Akumulated Amortization for 31 Desember 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	4,548,641,617	Book Value as of December 31, 2022

19. Aset Lainnya (Lanjutan)**19. Other Assets (Continued)****3) Aset Tak Berwujud Lainnya (Lanjutan)**

Penambahan Aset Tak Berwujud Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

Transaksi	Nilai /Amount	Transaction
Pembelian	259,989,737	Purchase
Pengembangan Nilai Aset	-	Asset Value Development
Total	259,989,737	Total

Penambahan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp259.989.737 tersebut bersumber dari realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Kode Akun/ Account Code	Uraian	Nilai /Amount	Description
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	Capital Expenditures for Equipment and Machinery
5361	Belanja Modal Lainnya	259,989,737	Other Capital Expenditures
	Jumlah Belanja	259,989,737	Total

3) Other Intangible Asset (Continued)

The addition of Other Intangible Assets generated by Expenditure is as follows:

The addition of Other Intangible Assets of Rp 259,989,737 was sourced from the realization of Capital Expenditures as follows:

b. Aset Lain-lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp15.965.917.960 dan Rp13.566.193.478 terjadi kenaikan sebesar Rp2.399.724.482 atau 17,69%.

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup BPK RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

b. Other Assets

The acquisition value of Other Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp15,965,917,960 and Rp13,566,193,478, respectively, an increase of Rp2,399,724,482 or 17.69%.

Other Assets are state property (BMN) which are in a severely damaged condition and are no longer used in the operational scope of BPK RI and in the process of being removed from BMN.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	15,965,917,960	13,566,193,478	2,399,724,482	17.69

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Details of Other Assets as of December 31, 2022 are as follows:

Transaksi	Nilai/Value	Transaction
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	15,932,817,960	Fixed Assets that are not used in Government Operations
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	33,100,000	Intangible Assets that are not used in Government Operations
Jumlah	15,965,917,960	Total

1) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Nilai perolehan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp15.932.817.960 dan Rp13.533.093.478 terjadi kenaikan sebesar Rp2.399.724.482 atau 17,73%.

1) Fixed Assets that are not used in Government Operations

The acquisition value of Fixed Assets not used in Government Operations as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 15,932,817,960 and Rp 13,533,093,478, respectively, an increase of Rp 2,399,724,482 or 17.73%.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	15,932,817,960	13,533,093,478	2,399,724,482	17.73

19. Aset Lainnya (Lanjutan)

19. Other Assets (Continued)

b. Aset Lain-lain (Lanjutan)

b. Other Assets (Continued)

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Details of the addition and reduction of Fixed Assets that are not used in Government Operations are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	13,533,093,478	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Penghentian Aset dari Penggunaan	51,929,429,018	Asset Termination from Use
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapus	929,002,000	Recording of Cancellation of Items to be Deleted
Total Mutasi Tambah	52,858,431,018	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Penghapusan	3,841,598,400	Deletion
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapus	46,097,408,136	Recording of Items to be Deleted
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	519,700,000	Re-use of BMN that has been discontinued in active use
Total Mutasi Kurang	50,458,706,536	Total Less Mutation:
Total Mutasi	2,399,724,482	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	15,932,817,960	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2022	15,015,186,138	Akumulated Amortization for 31 Desember 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	917,631,822	Book Value as of December 31, 2022

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

The balance of Fixed Assets that are not used in Government Operations are as follows:

No	Jenis Barang	Kuantitas/Quantity	Nilai/Value	Types of goods
1	Komputer Unit	288	4,448,184,010	Computer Unit
2	Alat Rumah Tangga	793	3,322,184,760	Household appliance
3	Alat Studio	65	2,318,685,521	Studio Tools
4	Alat Kantor	305	1,335,220,987	Office tools
5	Alat Bantu	15	991,551,102	Aids
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	982,584,000	Workplace Building
6	Alat Tetap Yang Tidak Digunakan Lainnya	169	2,534,407,580	Other Unused Fixed Tools
	Jumlah	1,638	15,932,817,960	Amount

2) Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

2) Intangible Assets that are not used in Government Operations

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing masing sebesar Rp33.100.000 dan Rp33.100.000 tidak terjadi kenaikan/penurunan.

The acquisition value of Intangible Assets Not Used in Government Operations as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp33,100,000 and Rp33,100,000, respectively, with no increase/decrease.

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/(Penurunan)
		December 31, 2022	December 31, 2021	Increase/(Decrease)
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	33,100,000	33,100,000	-

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Details of the addition and reduction of Intangible Assets that are not used in government operations are as follows:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	33,100,000	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah:		Mutation Add:
Penghentian Aset dari Penggunaan	283,624,589	Asset Termination from Use
Total Mutasi Tambah	283,624,589	Total Mutation Add
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	283,624,589	Recording of Items to Be Deleted
Penghapusan (BMN yang Dihentikan)	-	Deletion (Terminated State Property)
Total Mutasi Kurang	283,624,589	Total Less Mutation:
Total Mutasi	-	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	33,100,000	Balance as of December 31, 2022
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2022	31,653,685	Akumulated Amortization for 31 Desember 2022
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,446,315	Book Value as of December 31, 2022

19. Aset Lainnya (Lanjutan)

b. Aset Lain-lain (Lanjutan)

Rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas/Quantity	Nilai/Value	Types of goods
1	Aset Tak Berwujud	74	33,100,000	Intangible Assets

c. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp169.962.317.265 dan Rp151.245.736.576, terjadi kenaikan sebesar Rp18.716.580.689 atau 12,37%

Kode/ Code	Uraian Eselon I/ Description Echelon I	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	169,962,317,265	151,245,736,576	18,716,580,689	12.37

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No	Aset Lainnya / Other Assets	Nilai Perolehan / Value	Cost	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi / Accumulated Depreciation/Amortization	Nilai Buku / Book Value
1	Aset Tak Berwujud/Intangible Assets				
a.	Software	90,446,007,604		86,189,783,570	4,256,224,034
b.	Lisensi /License	110,229,676,461		68,725,693,872	41,503,982,589
c.	ATB Lainnya /Other ATB	4,548,641,617		-	4,548,641,617
	Total Aset Tak Berwujud/Intangible Assets	205,224,325,682		154,915,477,442	50,308,848,240
2	Aset Lain-lain/Other Assets				
a.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan/Fixed Assets that are not used in Government Operations	15,932,817,960		15,015,186,138	917,631,822
b.	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan/Intangible Assets that are not used in Government Operations	33,100,000		31,653,685	1,446,315
	Total Aset Lain-lain/Other Assets	15,965,917,960		15,046,839,823	919,078,137
	Total (1 + 2)	221,190,243,642		169,962,317,265	51,227,926,377

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

19. Other Assets (Continued)

b. Other Assets (Continued)

Details of Intangible Assets that are not used in Government Operations are as follows:

c. Accumulated Depreciations/Amortizations of Other Assets

Value of Accumulated Depreciation/Amortization of Other Assets per December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 169,962,317,265.00 and Rp151,245,736,576.00, respectively, an increase of Rp18,716,580,689.00 or 12.37%

Accumulated Depreciation of Other Assets is a contra account of Other Assets which is presented based on the accumulated value adjustments related to the decrease in capacity and benefits of Other Assets.

Specifically, Accumulated Depreciation of Fixed Assets that are not Used in Government Operations is an accumulation of depreciation on Fixed Assets which are declared lost based on valid source documents or in a heavily damaged and/or obsolete condition that has been proposed to the Property Manager for deletion.

Details of Accumulated Depreciation/Amortization of Other Assets as of 31 December 2022 are presented as follows:

Amortization of Intangible Assets with a limited useful life is carried out using the straight-line method with a residual value of nil. Meanwhile, ATB with an unlimited useful life is not subject to amortization.

20. Kewajiban Jangka Pendek

20. Short - Term Liabilities

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Utang Kepada Pihak Ketiga	16,485,408,287	6,932,308,038	Account Payable - Third Parties
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	3,187,000	3,187,000	Debt Overpaid of Income
Pendapatan diterima dimuka	1,960,178,498	2,172,778,102	Unearned Revenues
Uang muka dari KPPN	450	-	Down payment from KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya	11,621,773	88,594,500	Other Short-term Liabilities
Jumlah - Bersih	18,460,396,008	9,196,867,640	Total - Net

20. Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi ketika jumlah pendapatan yang disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena sampai akhir periode pelaporan pengembalian kelebihan pendapatan belum dapat direalisasikan maka satuan kerja mencatat sebagai utang kelebihan pembayaran.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan potongan pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2022.

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp16.485.408.287 dan Rp6.932.308.038 terjadi peningkatan sebesar Rp9.553.100.249 atau 137,81%.

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	16,485,408,287	6,932,308,038	9,553,100,249	137.81

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Kode Akun /Account Code	Nilai (Rp) Amount (Rp)	Description
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	212111	11,121,859,358	Accrued Employee Expenses
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	212112	4,369,316,229	Accrued Capital Expenditure
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	212191	113,195,720	Debt to Other Third Parties
Dana Pihak Ketiga	212192	881,036,980	Third-party funds
Total		16,485,408,287	Total

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	6,932,308,038	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Mutation Add:
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2,117,772,660,862	Accrued Employee Expenditure
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4,373,247,531	Accrued Goods Expenditure
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	176,118,836,170	Payable to Other Third Parties
Dana Pihak Ketiga	881,036,980	Third-party funds
Total Mutasi Tambah	2,299,145,781,543	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Pembayaran Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2,109,873,610,347	Payment of Accrued Employee Expenditure
Pembayaran Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3,571,041,053	Payment of Accrued Capital Expenditure
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	176,148,029,894	Payable to Other Third Parties
Total Mutasi Kurang	2,289,592,681,294	Total Less Mutation:
Total Mutasi	9,553,100,249	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	16,485,408,287	Balance as of December 31, 2022

20. Short - Term Liabilities (Continued)

Short-term liabilities are a group of liabilities that are expected to be settled in less than 12 (twelve) months after the reporting date.

Payables to third parties represent accrued expenses and obligations that must be settled to other third parties in less than 12 (twelve) months.

Debt overpayment income occurs when the amount of income deposited is greater than it should be. Because until the end of the reporting period the return of excess income has not been realized, the work unit records it as overpaid debt.

Unearned income is income already paid to the Treasury Fund, but the Goods/Services have not been delivered to third parties in the framework of Non-Tax Income.

Other Short-term Liabilities are tax deduction withheld by the Expenditure Treasurer and has not been deposited into the State Treasury as of December 31, 2022.

a. Payable to Third Parties

The balance of Payables to Third Parties as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp16.485.408.287 and Rp6.932,308,038, respectively, a decrease of Rp9.553.100.249 or 137.81%.

Details of Payables to Third Parties as of December 31, 2022 are as follows:

20. Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Mutasi tambah sebesar Rp2.299.145.781.543 berasal dari:

- 1) Adanya kekurangan pembayaran gaji/uang makan/TKPK/tunjangan beras pegawai yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.117.772.660.862.
- 2) Adanya belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet/materai KKP/keperluan perkantoran/perjalanan biasa/jasa lainnya yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.373.247.531.
- 3) Adanya uang di Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pegawai/pihak yang berhak sebesar Rp176.118.836.170.
- 4) Adanya Dana Pihak Ketiga di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp881.036.980.

Mutasi kurang sebesar Rp2.289.592.681.294 berasal dari:

- 1) Adanya pembayaran kekurangan gaji/uang makan/TKPK/tunjangan beras yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp2.108.117.186.354.
- 2) Adanya jurnal balik atas saldo utang belanja pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.756.423.993 pada Satker Setjen dan BPK Pusat.
- 3) Adanya pembayaran kekurangan Belanja Barang yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp3.567.080.952.
- 4) Adanya koreksi kurang catat atas utang belanja barang di tahun 2021 sebesar Rp7.799 pada satker Perwakilan Sumatera Utara.
- 5) Adanya koreksi lebih catat atas utang belanja barang sebesar Rp21.000 pada satker Perwakilan Aceh.
- 6) Adanya koreksi utang belanja barang sebesar Rp3.931.302 pada satker perwakilan Gorontalo.
- 7) Adanya uang di Bendahara Pengeluaran yang akan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp75.326.334 pada Satker Setjen.
- 8) Adanya pembayaran utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp176.072.703.560.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.485.408.287 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp11.121.859.358 terdiri dari:
 - a) Kekurangan gaji per 31 Desember 2022 sebesar Rp614.637.341.
 - b) Kekurangan Uang makan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.786.053.350
 - c) Kekurangan Uang Lembur per 31 Desember 2022 sebesar Rp287.000
 - d) Kekurangan Tunjangan-Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.719.631.667.
 - e) Kekurangan Tunjangan Papua per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.250.000.

20. Short - Term Liabilities (Continued)

a. Payable to Third Parties

Mutations added amounting to Rp2,299,145,781,543 came from:

- 1) There is a shortage in payment of salary/meal allowance/TKPK/employee rice benefits that have not been paid as of December 31, 2022 in the amount of Rp2,117,772,660,862.
- 2) Expenditures for goods in the form of electricity/telephone/water/internet/KKP stamps/office needs/ordinary travel/other services that have not been paid as of December 31, 2022 amounting to Rp4,373,247,531.
- 3) There is money in the Spending Treasurer that has not been handed over to the employee/party entitled to Rp176,118,836,170.
- 4) There are Third Party Funds in the Expenditure Treasurer of Rp881,036,980.

Mutations less amounting to Rp2,289,592,681,294 came from:

- 1) There was a payment of salary shortfall/meal allowance/TKPK/allowance originating from the previous period of Rp2,108,117,186,354.
- 2) There is a reverse entry on the balance of employee expenditure payables that must be paid as of December 31, 2021 in the amount of Rp1,756,423,993 at the Working Unit of the Secretariat General and the Central BPK.
- 3) There was an underpayment of Goods Expenditure originating from the previous period of Rp 3,567,080,952.
- 4) There was an under-recorded correction on goods spending debt in 2021 of Rp 7,799 for the North Sumatra Representative working unit.
- 5) There was a more marked correction on the goods shopping debt of Rp 21,000 to the Aceh Representative working unit.
- 6) There was a correction for goods spending debt of Rp 3,931,302 for the Gorontalo representative work unit.
- 7) There is money in the Spending Treasurer that will be deposited into the State Treasury in the amount of Rp75,326,334 at the Secretariat General Work Unit.
- 8) There are payments of debt to other third parties amounting to Rp176,072,703,560.

Balance of Payables to Third Parties as of December 31, 2022 amounting to Rp16,485,408,287 consists of:

1. Employee expenditures that are still to be paid amounting to Rp11,121,859,358 consist of:
 - a) The salary shortfall as of December 31, 2022 is Rp614,637,341.
 - b) Lack of food allowance as of December 31, 2022 amounting to Rp2,786,053,350.
 - c) Shortage of Overtime Pay as of December 31, 2022 amounting to Rp 287,000
 - d) Lack of Allowances as of December 31, 2022 amounting to Rp7,719,631,667.
 - e) The shortage of Papua Allowance as of 31 December 2022 is Rp 1,250,000.

20. Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp4.369.316.229 meliputi:
- Belanja Atas Tagihan Listrik Rp4.052.880.599
 - Belanja Atas Tagihan Air Rp68.597.908
 - Belanja Atas Tagihan Telepon Rp160.390.604
 - Belanja Internet/TV Kabel Rp73.924.560
 - Belanja Media Cetak Rp1.664.000
 - Belanja pengiriman surat dinas Rp424.168
 - Belanja jasa lainnya Rp1.021.590
 - Belanja Perjalanan dinas biasa Rp9.750.000
 - Belanja keperluan perkantoran Rp592.800
 - Belanja Materai untuk KKP Rp70.000.
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp113.195.720 meliputi saldo utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.195.720 sehubungan uang di Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pegawai/pihak yang berhak.

b. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.187.000 dan Rp3.187.000, tidak terdapat perubahan pada akun Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi ketika jumlah pendapatan yang disetorkan lebih besar dari yang seharusnya. Oleh karena sampai akhir periode pelaporan pengembalian kelebihan pendapatan belum dapat direalisasikan maka satuan kerja mencatat sebagai utang kelebihan pembayaran.

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of the Republic of Indonesia	3,187,000	3,187,000	-

c. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.960.178.498 dan Rp2.172.778.102 terjadi penurunan sebesar Rp212.599.604 atau 9,78%.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Kode/ Code	Uraian / Descriptions	TA 2022/FY 2022	TA 2021/FY 2021	Kenaikan/(Penurunan)/	
				Increase/(Decrease)	%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/Audit board of the Republic of Indonesia	1,960,178,498	2,172,778,102	(212,599,604)	9.78
	Realisasi Pendapatan Bruto / Realized Gross Revenue	1,960,178,498	2,172,778,102	(212,599,604)	9.78

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

20. Short - Term Liabilities (Continued)

a. Payable to Third Parties

2. *Accrued Goods expenditure amounting to Rp4,369,316,229 includes:*
- Expenditure on Electricity Bills Rp.4,052,880,599*
 - Expenditure on Water Bill Rp. 68,597,908*
 - Expenditure on Phone Bills Rp. 160,390,604*
 - Expenditure for Internet/Cable TV Rp 73,924,560*
 - Print Media Expenditures Rp 1,664,000*
 - Expenditures for sending official letters Rp 424,168*
 - Expenditures for other services Rp 1,021,590*
 - Expenditures for ordinary business travel Rp9,750,000*
 - Expenditures for office supplies Rp 592,800*
 - Stamp duty for KKP Rp70,000.*
3. *Payable to Other Third Parties amounting to Rp113,195,720 includes the balance payable to Other Third Parties as of December 31, 2022 amounting to Rp113,195,720 in relation to money at the Expenditure Treasurer that has not been handed over to employees/entitled parties.*

b. Debt Overpaid of Income

The balance of Income Overpayment Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp3,187,000 and Rp3,187,000, respectively, there was no change in the Account for Income Overpayment.

Income overpayment debt occurs when the amount of income deposited is greater than it should be. Because until the end of the reporting period the return of excess income has not been realized, the work unit recorded as an overpayment debt.

c. Unearned Revenue

Balance of Unearned Income as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp1,960,178,498 and Rp2,172,778,102 respectively, there was a decrease of Rp212,599,604 or 9.78%.

Revenue Received in Advance is income that has been deposited into the State Treasury, but the Goods/Services have not been handed over to third parties in the framework of PNBPN.

The balance of Unearned Income as of December 31, 2022 is entirely derived from Unearned Rental Income.

20. Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

20. Short - Term Liabilities (Continued)

c. Pendapatan Diterima di Muka (Lanjutan)

c. Unearned Revenue (Continued)

Jenis Transaksi	Nilai /Amount	Type of Transaction
Saldo per 31 Desember 2021	2,172,778,102	Balance as of December 31, 2021
Mutasi Tambah		Mutation Add:
Sewa Penempatan ATM BNI, Perangkat BTS, Kantin kantor pusat, koperasi kantor pusat dan kantor perwakilan, vending machine, perangkat telekomunikasi, perangkat BTS telkom, dan perangkat komunikasi	1,960,178,498	BNI ATM Placement Rent, BTS Equipment, Head office, canteen, head office cooperatives and representative offices, vending machines, telecommunications equipment, telkom BTS equipment, and communication equipment
Total Mutasi Tambah	1,960,178,498	Total Mutation Add:
Mutasi Kurang:		Less Mutation:
Jurnal balik per 2 Januari 2022 atas nilai sewa penempatan ATM BNI, sewa kantin, sewa koperasi, vending machine, sewa mess dan perangkat BTS GSM yang belum digunakan per 31 Desember 2021	2,172,778,102	Reverse journal as of January 2, 2022 for the rental value of BNI ATM placement, canteen rental, cooperative rental, vending machine, mess rental and GSM BTS equipment that has not been used as of December 31, 2021
Total Mutasi Kurang	2,172,778,102	Total Less Mutation:
Total Mutasi	(212,599,604)	Total Mutation
Saldo per 31 Desember 2022	1,960,178,498	Balance as of December 31, 2022

Mutasi tambah sebesar Rp1.960.178.498 berasal dari:

- 1) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan ATM BNI yang belum digunakan oleh PT BNI (Persero) di Kantor Pusat BPK dan Perwakilan BPK per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.342.434.809.
- 2) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk kantin yang belum digunakan oleh Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal BPK di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.795.303.
- 3) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk koperasi yang belum digunakan oleh Koperasi Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Pusat dan Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.822.165.
- 4) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk vending machine yang belum digunakan oleh PT Jatari Boreas Sabha di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.578.549.
- 5) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat BTS GSM yang belum digunakan oleh PT Telekomunikasi Seluler Indonesia di Kantor Pusat BPK dan Perwakilan per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.067.230.
- 6) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk penempatan perangkat BTS yang belum digunakan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi di Kantor Pusat BPK per 31 Desember 2022 sebesar Rp276.500.602.
- 7) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk vending machine yang belum digunakan di Kantor Pusat BPK dan Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.902.194.
- 8) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk Kopi Haloa per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.146.839 pada Kantor Pusat.
- 9) Nilai sewa gedung dan bangunan untuk ATM PT. Bank Mandiri per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.930.807 pada Kantor Pusat.

d. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp450 dan Rp0,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp450.

Uang Muka Dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Additional movements of Rp 1,960,178,498 came from:

- 1) The rental value of buildings and buildings for the placement of BNI ATMs that have not been used by PT BNI (Persero) at the BPK Head Office and BPK Representatives as of December 31, 2022 amounted to Rp1,342,434,809.
- 2) The rental value of buildings and buildings for canteens that have not been used by the Dharma Wanita Association of the BPK General Secretariat at the BPK Head Office as of December 31, 2022 is Rp 28,795,303.
- 3) The rental value of buildings and buildings for cooperatives that have not been used by the Cooperative of the Supreme Audit Agency at the Head Office and BPK Representative Offices of Central Java as of December 31, 2022 is Rp.31,822,165.
- 4) The rental value of buildings and structures for vending machines that have not been used by PT Jatari Boreas Sabha at the BPK Head Office as of December 31, 2022 is Rp2,578,549.
- 5) The rental value of buildings and buildings for the placement of GSM BTS equipment that has not been used by PT Telekomunikasi Seluler Indonesia at the BPK Head Office and Representatives as of December 31, 2022 amounted to Rp.118,067,230.
- 6) The rental value of buildings and buildings for the placement of BTS equipment that has not been used by PT Dayamitra Telekomunikasi at the BPK Head Office as of December 31, 2022 is Rp276,500,602.
- 7) The rental value of buildings and buildings for vending machines that have not been used at the BPK Head Office and BPK South Kalimantan Representative Office as of December 31, 2022 is Rp2,902,194.
- 8) The rental value of buildings and buildings for Kopi Haloa as of December 31, 2022 is Rp26,146,839 at the Head Office.
- 9) The rental value of buildings and buildings for ATM PT. Bank Mandiri as of 31 December 2022 amounted to Rp 130,930,807 at the Head Office.

d. Down Payment from KPPN

The balance of advances from KPPN as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp450 and Rp 0 or an increase of Rp450, respectively.

Advances from KPPNs are supply money (UP) or additional supply money (TUP) given by KPPNs as advances for work that are still at or controlled by the Spending Treasurer on the reporting date.

20. Kewajiban Jangka Pendek (Lanjutan)

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.621.773 dan Rp88.594.500 terjadi penurunan sebesar Rp76.972.727 atau 86,88%.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan potongan pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2022.

Atas utang pajak bendahara yang belum disetor per 31 Desember 2022 tersebut, sudah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2023.

Kode/ Code	Uraian/ Description	31 Desember 2022 December 31, 2022	31 Desember 2021 December 31, 2021	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
					%
01	Badan Pemeriksa Keuangan/The Audit Board of	11,621,773	88,594,500	(76,972,727)	86.88

21. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.861.710.957.987 dan Rp8.787.037.458.515.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

20. Short - Term Liabilities (Continued)

e. Other Short-term Liabilities

The balance of Other Short Term Debt as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp11,621,773 and Rp88,594,500, a decrease of Rp76,972,727 or 86.88%.

Other Short Term Debt is a tax deduction withheld by the Spending Treasurer and has not been paid to the State Treasury as of December 31, 2022.

The treasurer tax debt that has not been paid as of December 31 2022 has been deposited to the State Treasury in January 2023.

21. Equity

Equity Balance as of December 31, 2022 and 2021 each of them amounting to Rp8,861,710,957,987 and Rp8,787,037,458,515.

Equity is the net worth of an entity which is the difference between assets and liabilities. More details on equity are presented in the Statement of Changes in Equity.

22. Pendapatan

22. Revenues

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,330,607,415	1,191,688,097	Rental Land, Properties, and Building Revenue
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1,809,587,500	258,565,000	Revenue from use of facilities and infrastructure in accordance with Task and Functions
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	8,915,800,002	5,452,075,004	Education and/or Training Service Revenue
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	1,236,700,000	-	Other Human Resource Development Revenue
Pendapatan Jasa Pengawasan / Pemeriksaan	6,254,958,999	-	Supervision/examination Service Revenue
Pendapatan Jasa Lainnya	11,910,000	6,251,830,919	Other Service Revenue
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	27,711,686	376,962,197	Revenue from Fines for Completion of Government Work
Pendapatan Anggaran Lain-lain	382,300,027	29,461,651	Other Budget Revenue
Jumlah - Bersih	19,969,575,629	13,560,582,868	Total - Net

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.969.576.629 dan Rp13.560.582.868, terjadi kenaikan sebesar Rp6.408.992.761 atau 47,26%. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak ataupun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan antara lain berasal dari sewa penempatan ATM;

Operating Income for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp19,969,576,629 and Rp13,560,582,868, respectively, a decrease of Rp6,408,992,761 or 47.26%. Overall Operating Income is Non-Tax State Revenue.

Non-Tax State Revenue for the period ended December 31, 2022 and 2021 is entirely derived from Other Non-Tax State Revenues.

Non-Tax State Revenues Others are state revenues that are not derived from taxes or grant revenues and are not part of revenues arising from the utilization of natural resources or the government's share of earnings.

Other Non-Tax State Revenues can be explained, among others:

- a. Land, building and building rental revenue, among others, comes from the rental of ATM placement;

22. Pendapatan (Lanjutan)

- b. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan antara lain berasal dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPK;
- c. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya antara lain berasal dari jasa penilaian kompetensi individu dan tes potensi pegawai;
- d. Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan dan Jasa Lainnya antara lain berasal dari kegiatan transaksi penerimaan pendapatan jasa pemeriksaan BPK atas International Maritime Organization (IMO) dan International Atomic Energy Agency (IAEA);
- e. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah antara lain berasal dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan jasa tenaga ahli pemeriksaan dan jasa KAP;
- f. Pendapatan Anggaran Lain-lain antara lain berasal dari kelebihan penyetoran sisa UP tahun sebelumnya.

Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2022 dibanding periode sebelumnya per 31 Desember 2021 antara lain disebabkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan.

22. Revenues (Continued)

- b. Revenue from the Use of Facilities and Infrastructure in accordance with Task and Functions and Revenue from Education and/or Training Services, among others, comes from Education and Training activities within the BPK;
- c. Other Human Resource Development Revenue, among others, comes from individual competence assessment services and employee potential tests;
- d. Revenue from Supervision/Inspection Services and Other Services, among others, comes from transaction activities of receiving BPK audit service revenue for the International Maritime Organization (IMO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA);
- e. Revenue from Fines for Completion of Government Work, among others, comes from delays in completing the work of expert inspection services and KAP services;
- f. Other Budget Revenue, among others, comes from the excess deposit of the previous year's UP remainder.

The increase in Other Non-Tax State Revenues as of 31 December 2022 compared to the previous period as of 31 December 2021 was partly due to the implementation of Government Regulation Number 81 of 2021 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Supreme Audit Agency.

23. Beban Pegawai

	31 Desember/December 31,	
	2022	2021
Beban Gaji	373,598,801,563	335,700,197,079
Beban Tunjangan-Tunjangan	136,621,558,792	101,151,372,221
Beban Lembur	5,966,528,300	7,097,929,800
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	1,967,430,761,434	1,646,543,529,250
Jumlah - Bersih	2,483,617,650,089	2,090,493,028,350

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.483.617.650.089 dan Rp2.090.493.028.350 terjadi kenaikan sebesar Rp393.124.621.739 atau 18,81%.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

23. Employee Expenses

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Gaji	373,598,801,563	335,700,197,079	Salary Expenses
Beban Tunjangan-Tunjangan	136,621,558,792	101,151,372,221	Benefits Expenses
Beban Lembur	5,966,528,300	7,097,929,800	Overtime Expenses
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	1,967,430,761,434	1,646,543,529,250	Special Benefit Expenses and Employee Expenses Transito
Jumlah - Bersih	2,483,617,650,089	2,090,493,028,350	Total - Net

Total Employee Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp2,483,617,650,089 and Rp2,090,493,028,350, respectively, an increase of Rp393,124,621,739 or 18,81%.

Employee Expenses are the burden of compensation, both in the form of money and goods which are determined based on laws and regulations given to state officials, Civil Servants (PNS), and employees which employed by the government who are not yet civil servants as compensation for the work that has been carried out. except for work related to capital formation.

24. Beban Persediaan**24. Inventory Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Persediaan Konsumsi	22,171,774,949	31,528,953,076	Consumption Supply Expense
Beban Persediaan Lainnya	12,421,643,756	12,705,986,911	Other Supply Expense
Jumlah - Bersih	34,593,418,705	44,234,939,987	Total - Net

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp34.593.418.705 dan Rp44.234.939.987 terjadi kenaikan sebesar Rp9.641.521.282 atau 21,80%.

Total Inventory Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp34.593.418.705 and Rp44.234.939.987, respectively, an increase of Rp9.641.521.282 or 21.80%.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Inventory Expenses are expenses to record consumption of consumables, including manufactured goods, both marketed and unmarketed.

25. Beban Barang dan Jasa**25. Good and Service Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Barang			Operational Goods
Beban Barang Operasional	135,217,527,450	131,876,262,763	Operational Goods Expense
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,738,079,737	7,686,827,114	Operational Goods Expense - Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Barang Non Operasional	256,775,160,328	266,910,376,847	Non Operational Goods Expense
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	2,694,577,162	4,976,569,544	Non Operational Goods Expense - Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Jasa			Services Expenses
Beban Langganan Daya dan Jasa	74,375,018,888	66,774,592,102	Power Subscriptions Services Expense
Beban Jasa Konsultan	18,323,759,711	25,253,585,725	Consultant Services Expense
Beban Sewa	8,497,617,651	10,232,551,081	Rent Expense
Beban Jasa Profesi	60,945,216,391	64,291,540,600	Professional Services Expense
Beban Jasa Lainnya	41,549,331,632	26,953,163,263	Other Services Expense
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,930,232,589	19,140,652,218	Services Expense - Handling the COVID-19 Pandemic
Beban Aset Ekstrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Beban Aset Ekstrakomtabel			Asset Expenses Extracompatible
Peralatan dan Mesin	42,794,700	2,461,625,826	Equipment and Machinery
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	1,010,680,956	-	Equipment and Machinery Expenses - Extracompatible
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	39,320,357	-	Building and Properties Expenses - Extracompatible
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomtabel	153,938,000	-	Other Fixed Assets Expenses - Extracompatible
Jumlah	605,293,255,552	626,557,747,083	Total

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp605.293.255.552 dan Rp626.557.747.083, terjadi penurunan sebesar Rp21.264.491.531 atau 3,39%.

Total Goods and Services Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp605,293,255,552 and Rp626,557,747,083, respectively, an decrease of Rp21,264,491,531 or 3.39%.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

The cost of goods and services consists of the cost of goods and services in the form of consumption of goods and or services in the context of carrying out the entity's activities as well as other expenses in the form of expenses arising from the use of capital expenditure allocations that do not produce fixed assets.

26. Beban Pemeliharaan**26. Maintenance Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	97,861,352,185	98,184,437,194	<i>Building and properties Maintenance Expenses</i>
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	100,917,862	50,401,180	<i>Building and properties Insurance Expenses</i>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,593,500	19,800,000	<i>Building and properties Maintenance Expenses - Handling the COVID-19 Pandemic</i>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	100,433,200	80,702,000	<i>Other building and properties Maintenance Expenses</i>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40,439,233,134	41,780,901,948	<i>Equipment and machinery Maintenance Expenses</i>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249,357,615	237,494,180	<i>Other Equipment and machinery Maintenance Expenses</i>
Beban Pemeliharaan Jaringan	559,496,170	263,036,900	<i>Network Maintenance Expenses</i>
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	88,550,000	<i>Other Maintenance Expenses</i>
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,985,165,898	2,617,301,355	<i>Raw material Inventory Expenses</i>
Beban Persediaan Suku Cadang	136,049,536	222,692,429	<i>Spare parts Inventory Expenses</i>
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	19,136,000	<i>Asset Expenses Extracompatible Building and Properties</i>
Jumlah	141,449,599,100	143,564,453,186	Total

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp141.449.599.100 dan Rp143.564.453.186 terjadi penurunan sebesar Rp2.114.854.086 atau 1,47%.

Total Maintenance Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp141,449,599,100 and Rp143,564,453,186, respectively, a decrease of Rp2,114,854,086 or 1,47%.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Maintenance expense is an expense that is intended to maintain fixed assets or other assets that already exist in normal condition.

27. Beban Perjalanan Dinas**27. Official Travel Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Perjalanan Biasa	516,562,871,007	505,079,270,843	<i>Common Travel Expenses</i>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,629,019,920	22,480,227,500	<i>Official Travel in Town Expenses</i>
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15,544,677,085	18,317,413,180	<i>Official Travel Meeting Package in Town Expenses</i>
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan COVID-19	463,040,000	378,492,200	<i>Official Travel Meeting Package Handling the COVID-19 Pandemic</i>
Beban Perjalanan Dinas - Paket Meeting Luar kota	12,061,271,584	8,407,123,268	<i>Official Travel Meeting Package Package Out of Town Expenses</i>
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	49,499,882,959	23,823,810,200	<i>Overseas Common Travel Expenses</i>
Jumlah	615,760,762,555	578,486,337,191	Total

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp615.760.762.555 dan Rp578.486.337.191 terjadi kenaikan sebesar Rp37.274.425.364 atau 6,44%.

Total Business Travel Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp615,760,762,555 and Rp578,486,337,191, respectively, an increase of Rp37,274,425,364 or 6,44%.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Official travel expenses are expenses incurred for official travel in the context of carrying out duties, functions, and positions.

28. Beban Penyusutan dan Amortisasi**28. Depreciation and Amortization Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	140,265,719,080	136,874,419,174	<i>Equipment and machinery Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63,541,665,655	63,168,027,937	<i>Building and properties Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	8,053,816,436	9,887,852,427	<i>Road, irrigation, and network Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	181,123,183	192,565,407	<i>Other assets Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	79,959,106	70,907,344	<i>Fixed Assets Depreciation Expenses that are not used in Government Operations</i>
Beban Amortisasi <i>Software</i>	6,414,184,727	4,648,628,863	<i>Software Amortization Expenses</i>
Beban Amortisasi Lisensi	10,337,641,776	10,277,085,327	<i>License Amortization Expenses</i>
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	964,215	2,721,119	<i>Intangible Assets Amortization Expenses that are not used in Government Operations</i>
Jumlah	228,875,074,178	225,122,207,598	Total

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp228.875.074.178 dan Rp225.122.207.598, terjadi peningkatan sebesar Rp3.752.866.580 atau 1,67%.

Total Depreciation and Amortization Expenses for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp228.875.074.178 and Rp225.122.207.598, there was a increase of Rp3.752.866.580 or 1,67%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Depreciation and Amortization Expense is an expense to record the systematic allocation of the depreciable assets value over the useful life of the asset. Meanwhile, Amortization Expense is used to record the decrease in economic benefits allocation for Intangible Assets.

29. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**29. Allowance for Bad Debt Expenses**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang jangka Pendek	67,675,333	3,080,533	<i>Allowance for Bad Debt Expenses - Short Term Receivable</i>
a. Beban Penyisihan Piutang PNB	21,409	2,013,662	<i>Bad debt expense for PNB Receivables a</i>
b. Beban Penyisihan Piutang Lainnya	61,936,867	1,066,871	<i>Bad debt expense for Other Receivables b</i>
c. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	5,352,403	-	<i>Bad debt expense for Receivables c - Current Portion OF Other Long-term Receivables</i>
d. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	364,654	-	<i>Bad debt expense for Receivables d Current Part Treasury Claims/ Claims for Compensation</i>
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	269,422,336	30,050,820	<i>Allowance for Bad Debt Expenses - Long Term Receivable</i>
a. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	269,422,336	30,050,820	<i>Bad debt expense for Receivables a Long Term - Treasury Claims/ Claims for Compensation</i>
Jumlah	337,097,669	33,131,353	Total

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp337.097.669 dan Rp33.131.353 terjadi kenaikan sebesar Rp303.966.316 atau 915,46%.

Total Allowance for Doubtful Accounts for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp337,097,669 and Rp33.131.353 increased by Rp303.966,316 or 915,46%.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Allowance for Doubtful Accounts is an expense to record the estimated uncollectible accounts for a period.

30. Kegiatan Non Operasional

30. Non Operational Activities

	31 Desember/December 31, 2022	2021	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(4,612,025,379)	2,130,270,387	<i>Surplus (Deficit) Release of Non Current Assets</i>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,007,635,427	4,089,971,749	<i>Gain on Disposal of noncurrent Assets</i>
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7,619,660,806	1,959,701,362	<i>Loss on Disposal of noncurrent Assets</i>
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	293,806,334	49,194,509	<i>Surplus/Deficit of Other non operation activities</i>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,427,352,043	91,147,347	<i>Gain on Other non operation activities</i>
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,133,545,709	41,952,838	<i>Loss on Other non operation activities</i>
Jumlah	(4,318,219,045)	2,179,464,896	Total

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing defisit sebesar Rp4.318.219.045 dan surplus sebesar Rp2.179.464.896 terjadi kenaikan sebesar Rp6.497.683.941 atau 298,13%.

Non-Operational Activities for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021, respectively, had a surplus of Rp4.318.219.045 and a surplus of Rp2,179,464,896, an increase of Rp6.497.683.941 or 298.13%.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Deficit from Non-Operational Activities consists of non-routine income and expenses and are not the main tasks and functions of the entity.

a. Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp4.612.025.379) dan Rp2.130.270.387, terjadi penurunan sebesar Rp6.742.295.766 atau 316,5%.

Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2022	2021	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			<i>Income on Disposal of Non-Current Assets</i>
a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	889,567,773	1,069,729,921	<i>Income from Sales of Equipment and Machinery</i>
b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	2,118,067,654	3,020,241,828	<i>Income from Transfer of Other BMN</i>
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3,007,635,427	4,089,971,749	<i>Total of Income on Disposal of Non Current Assets</i>
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			<i>Expense on Disposal of Non-Current Assets</i>
a. Beban Pelepasan Aset	7,619,660,806	1,959,701,362	<i>Expense on Disposal Assets</i>
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	7,619,660,806	1,959,701,362	<i>Total of Expense on Disposal of Non-Current Assets</i>
Jumlah	(4,612,025,379)	2,130,270,387	Total

b. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp293.806.334 dan Rp49.194.509, terjadi kenaikan sebesar Rp244.611.825 atau 497,23%

Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan yang bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

a. Surplus or Deficit from Disposal of Non-Current Assets

Total Surplus/(Deficit) Disposal of Non-Current Assets for the periods ended 31 December 2022 and 31 December 2021 amounted to (Rp 4,612,025,379) and Rp 2,130,270,387, respectively, a decrease of Rp 6,742,295,766 or 316 .5%.

Surplus or Deficit on Disposal of Non-Current Assets is an asset disposal activity which includes auction proceeds minus expenses incurred on the difference between the auction value and the book value of Non-Current Assets.

Details of Surplus/(Deficit) Disposal of Non-Current Assets for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

b. Surplus From Other Non-Operating Activities

The total surplus from Other Non-Operating Activities for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 293,806,334 and Rp 49,194,509, respectively, an increase of Rp 244,611,825 or 497.23%

Surplus or Deficit from Other Non-Operating Activities is income that comes from income that is not operating income minus expenses that are not operating expenses.

30. Kegiatan Non Operasional (lanjutan)

b. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (lanjutan)

Rincian Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2022	2021
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
a. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	9,363,290	18,928,240
b. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	270,026,644	72,215,075
c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3,147,962,109	4,032
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,427,352,043	91,147,347
a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3,123,005,413	28,237
b. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	41,924,601
c. Beban Persediaan Rusak/Usang	10,540,296	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,133,545,709	41,952,838
Jumlah	293,806,334	49,194,509

31. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas akhir tahun yang lalu. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.787.037.458.515 dan Rp8.811.904.432.913.

b. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Defisit LO per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.094.275.501.264 dan Rp3.692.751.796.984.

c. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp170.715.485.876 dan Rp15.238.973.768.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

30. Non Operational Activities (continued)

b. Surplus From Other Non-Operating Activities (continued)

Details of Surplus or Deficit from Other Non-Operating Activities for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2022	2021
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
a. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	9,363,290	18,928,240
b. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	270,026,644	72,215,075
c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	3,147,962,109	4,032
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,427,352,043	91,147,347
a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3,123,005,413	28,237
b. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	41,924,601
c. Beban Persediaan Rusak/Usang	10,540,296	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,133,545,709	41,952,838
Jumlah	293,806,334	49,194,509

31. Statement of Changes in Equity

a. Beginning Balance

Beginning Balance of Equity represents the Equity Value derived from the value of the Equity at the end of the previous year. The Beginning Balance of Equity as of January 1, 2022 and 2021 amounted to Rp8,787,037,458,515 and Rp8,811,904,432,913.

b. Surplus (Deficit) SO

LO deficit represents a lesser difference between surplus/deficit operational activities, surplus/deficit non-operational activities, and extraordinary items. The LO Deficit as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp4,094,275,501,264 and Rp3,692,751,796,984.

c. Corrections That Increase/Reduce Equity, which among others from the Cumulative Impact of Changes in Accounting Policies/Fundamental Mistakes

The number of corrections that increase / decrease equity, which, among others, comes from the cumulative impact of changes in accounting policies / Fundamental Mistakes for the period ended 31 December 2022 and 31 December 2021 amounting to Rp170,715,485,876 and Rp15,238,973,768 respectively.

Corrections that increase/reduce equity, which among others stem from the cumulative impact of changes in accounting policies/fundamental mistakes are Adjustment of Asset Value, Inventory Value Correction, Fixed Asset Revaluation Difference, Amendment of Non Performing Assets and Other Amendments made in the current period against the value of equity from Asset accounts last year.

31. Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)

c. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar (Lanjutan)

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
1) Koreksi Nilai Persediaan			1) Inventory Adjustments
Barang Konsumsi	122,706	-	Consumption Goods
Bahan Baku	(7,340,000)	-	Raw Material
Persediaan Lainnya	(7,607,915)	-	Other inventory
Jumlah	(14,825,209)	-	Total
2) Koreksi Atas Reklasifikasi			2) Corrections on Reclasification
Barang Konsumsi	11,664,822	(480,000,000)	Consumption Goods
Bahan Untuk Pemeliharaan	10,315,599	-	Materials For Maintenance
Suku Cadang	(20,893,187)	-	Parts
Pita Cukai, Materai dan Leges	(7,470,000)	-	Customs Ribbons, Stamps and Leges
Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/diserahkan ke Masyarakat	(14,768,900)	-	Other Supply Goods for Sale/hand over to the Community
Bahan Baku	(196,402,033)	-	Supplies in the Context of Social Assistance
Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	(9,895,875)	-	Other Supplies
Persediaan Lainnya	228,345,854	-	Land
Tanah	-	-	Machinery and Equipment
Peralatan dan Mesin	218,352,840	(511,938,700)	Buildings and Properties
Gedung dan Bangunan	-	97,998,200	Irrigation
Irigasi	-	893,940,500	Network
Jaringan	(178,630,000)	-	Renovated Fixed Assets
Aset Tetap Renovasi	-	(2,544,503,000)	Other Fixed Asset
Aset Tetap Lainnya	(39,722,840)	-	Accumulated Depreciation - Machinery and Equipment
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	(704,705,135)	Accumulated Depreciation - Buildings and Properties
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27,972,722	-	Fixed Asset Value Correction
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(27,972,722)	-	Non Revaluation
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	(896,280)	-	Shopping for Consumable Supplies
Jumlah	-	(3,249,208,135)	Total
	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
3) Selisih Revaluasi Aset Tetap			3) Difference in Revaluation of Fixed Assets
Gedung dan Bangunan	-	-	Buildings and Properties
Irigasi	-	-	Irrigation
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	Accumulated Depreciation - Buildings and Properties
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	-	Accumulated Depreciation - Irrigation
Jumlah	-	-	Total

31. Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)**31. Statement of Changes in Equity (continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
4) Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi			4) Fixed Asset Non Revaluation Adjustments
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	170,729,247,875	13,347,630,564	Fixed Asset Non Revaluation Adjustments
Belanja Modal Dibayar Dimuka Tanah	(759,927,568)	-	Prepaid Expenditures Land
Peralatan dan Mesin	170,261,042,000	28,605,322,000	Machinery and Equipment
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(42,997,721,980)	62,659,329	Equipment and Machinery Not Registered
Gedung dan Bangunan	-	68,200,000	Buildings and Properties
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	(6,770,712,707)	18,885,725,124	Buildings and Properties Not Registered
Irigasi	-	759,927,568	Irrigations
Jaringan	(42,133,000)	-	Networks
Aset Tetap Renovasi	273,729,260	(17,898,076,124)	Renovated Fixed Assets
Aset Tetap Lainnya	(120,004,855)	48,600,000	Other Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(216,727,740)	(759,927,568)	Construction in Progress
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,029,426,051	413,006,842	Accumulated Depreciation - Machinery and Equipment
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	43,166,946,582	(14,475,023,064)	Accumulated Depreciation - Buildings and Properties
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	543,713,611	(2,315,798,974)	Accumulated Depreciation - Road and Bridges
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	37,858,331	Accumulated Depreciation - Irrigations
Akumulasi Penyusutan Jaringan	6,019,002	(86,040,900)	Accumulated Depreciation - Networks
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5,749,976	-	Accumulated Depreciation - Other Fixed Asset
Aset Tetap Yang Belum Diregister	35,450,000	-	Unregistered Fixed Asset
Aset Tetap Yang Tidak digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	7,250,831	-	Fixed Assets Not Used in Government Operations
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	52,194,791,018	(226,051,296)	Accumulated Depreciation - Fixed Assets Not Used in Government Operations
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya	(44,174,816,716)	226,051,296	Correction of Inventory/Fixed Asset/ Other Assets Reclassification
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	27,972,722	-	Other Asset Acquisition Income
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	272,032,000	-	Building and Properties Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(1,838,185,790)	-	Maintenance Expenses - Equipment and Machinery
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(134,732,100)	1,198,000	Accumulated Depreciation Expense of Building and Properties
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	(27,972,722)	-	Expense of Extracomtable Assets - Building and Properties
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(11,940,000)	-	Other Asset Non Revaluation Adjustments
Software	(262,150,068)	263,114,528	Software
Lisensi	129,630,000	1,155,110,000	License
Aset Tak Berwujud Lainnya	(215,804,589)	822,162,000	Other Intangible Asset
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	(197,450,000)	-	Fixed Asset Not Used in Government operation
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	-	(462,624,544)	Fixed Asset Not Used in Government operation
Akumulasi Amortisasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	283,624,589	-	Accumulated Amortization-Fixed Assets Not Used in Government Operation
Akumulasi Amortisasi Software	-	42,462,247	Accumulated Amortization-Software
Akumulasi Amortisasi Lisensi	(194,330,068)	(1,170,670,875)	Accumulated Amortization-License
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yg Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	215,804,589	(123,324,300)	Accumulated Amortization of Intangible Assets That Are Not Used in Government Operations
	(283,624,589)	-	
Jumlah	170,467,097,807	13,610,745,092	Total

31. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)**31. Statement of Changes in Equity (Continued)**

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
5) Lain-Lain			5) Others
Koreksi Kas Lainnya di Bendahara			<i>Other Cash Corrections in</i>
Pengeluaran	12,616,600	5,165,921,134	<i>Treasurer</i>
Koreksi Piutang	73,553,271	(187,001)	<i>Receivable Correction</i>
Koreksi Kewajiban	(1,304,688,135)	(298,674,678)	<i>Liability Correction</i>
Koreksi Pendapatan	5,870,470,855	1,320,980,356	<i>Revenue Correction</i>
Koreksi Beban	(4,388,739,313)	(1,310,603,000)	<i>Expenses Correction</i>
Jumlah	263,213,278	4,877,436,811	Total
Jumlah Dampak Kumulatif			Total of Cumulative Impact of Changes in
Perubahan Kebijakan/Kesalahan	170,715,485,876	15,238,973,768	Policies/Fundamental Mistakes

d. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.998.233.514.860 dan Rp3.652.645.848.818. Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain ditambah dengan selisih antara akun Transfer keluar dan Transfer Masuk, serta ditambah dengan Pengesahan Hibah Langsung.

d. Transactions Between Entities

Transaction Value between Entities for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp3,998,233,514,860 and Rp3,652,645,848,818, respectively. Inter-Entity Transaction is the difference between accounts Billed to Other Entities and Received from Other Entities plus the difference between outgoing Transfer and Incoming Transfer accounts, plus Direct Grant Endorsement.

	31 Desember/December 31,		
	2022	2021	
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,988,578,591,379	3,667,714,850,037	<i>Accounts Billed to Other Entities</i>
Diterima dari Entitas Lain	(29,362,424,206)	(29,180,653,415)	<i>Received from Other Entities</i>
Transfer Keluar	(30,076,974,542)	(60,736,655,105)	<i>Transfer Out</i>
Transfer Masuk	50,690,219,842	62,468,239,579	<i>Incoming Transfer</i>
Pengesahan Hibah Langsung	6,807,744,517	12,380,067,722	<i>Direct Grants Authorization</i>
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	11,596,357,870	-	<i>Previous Year Budget of Direct Grants Authorization</i>
Jumlah	3,998,233,514,860	3,652,645,848,818	Total

1) Ditagihkan ke Entitas Lain dan Diterima dari Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.988.578.591.379 dan Rp3.667.714.850.037

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp29.362.424.206) dan (Rp29.180.653.415).

Ditagihkan ke Entitas dan Lain dan Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

1) Billed to Other Entities and Received from Other Entities

Billed to Other Entities for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to Rp3,988,578,591,379 and Rp3,667,714,850,037, respectively.

Received from Other Entities for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounting to (Rp29,362,424,206) and (Rp29,180,653,415, respectively).

Billed to Entities and Others and Received from Other Entities are inter-entity transactions of income and expenditure in KL which involve the state treasury (BUN).

31. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)

2) Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Saldo Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar (Rp30.076.974.542) dan (Rp60.736.655.105).

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp50.690.219.842 dan Rp62.468.239.579.

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu satker ke satker lain pada internal K/L, antara K/L dengan K/L lainnya dan antara K/L dengan BA-BUN.

Terdapat selisih antara Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebesar Rp20.613.245.300,00 pada 31 Desember 2022 yang berasal dari Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Utara (PUPR) ke satker Setjen BPK berupa:

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.247.039.432 dan Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp623.519.826); dan
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.607.964.632 dan Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp618.238.938).

3) Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.807.744.517 dan Rp12.380.067.722.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Rincian Pengesahan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah /Grant Receiver	Bentuk Hibah / Type of Grant	Keterangan/ Information	Nilai Pengesahan/ Validation Value
1	BPK Pusat / BPK Head Office	Jasa Lainnya/ Other Services	Langsung/Direct	6,203,164,518
2	Sekretariat / Secretary	Barang/ Goods (PM dan GB)	Langsung/Direct	604,580,000
Total Pengesahan / Authorization				-
Pengesahan Pengembalian Hibah / Return of Grant Authorization				6,807,744,518

Pengesahan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- BPK Pusat merupakan hibah luar negeri dari Department Of Foreign Affairs And Trade (DFAT) Government Of Australia.
- Sekretaris Jenderal merupakan hibah dalam negeri dari pengurus Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

31. Statement of Changes in Equity (Continued)

2) Transfer Out and Transfer In

Transfer Out balances for the periods ended December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to (Rp30,076,974,542) and (Rp60,736,655,105, respectively).

Incoming Transfer balances for the periods ending December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp50,690,219,842 and Rp62,468,239,579, respectively.

Outgoing Transfers and Incoming Transfers are transfers of assets and/or liabilities from one work unit to another within the internal K/L, between K/L and other K/L and between K/L and BA-BUN.

There is a difference between Incoming Transfers and Outgoing Transfers of Rp 20,613,245,300.00 on December 31, 2022 originating from the North Kalimantan Province Housing Provision Working Unit (PUPR) to the General Secretariat BPK satker in the

- Equipment and Machinery amounting to Rp1,247,039,432 and Depreciation of Equipment and Machinery amounting to (Rp623,519,826); and
- Buildings and Properties amounting to Rp20,607,964,632 and Depreciation of Buildings and Properties amounting to (Rp618,238,938).

3) Direct Grant Authorization

The balance of Direct Grant Authorization for the periods ending December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 6,807,744,517 and Rp 12,380,067,722, respectively.

The authorization of direct grants is a transaction for recording direct KL grants in the form of cash, goods or services, while the recording of grant income is carried out by BA-BUN.

Details of Grants Authorization for the period ending December 31, 2022 are as follows:

Grants Authorization for the period ending December 31, 2022 with the following details:

- Central BPK is an overseas grant from the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Government of Australia.
- The Secretary General is a domestic gift from the management of the Baitul Hasib Mosque of the BPK Representative of West Sumatra Province.

31. Laporan Perubahan Ekuitas (Lanjutan)

4) Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp11.596.357.870 dan Rp0.

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah sedangkan pencatatan pendapatan hibah TAYL dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 ada pada satker BPK Pusat yang merupakan hibah luar negeri dari USAID.

- e. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.861.710.957.987 dan Rp8.787.037.458.515.

32. Pengungkapan Penting Lainnya

a. Rekening Pemerintah di BPK

Dalam rangka memodernisasi pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan rekening pengeluaran berbasis rekening virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo rekening pengeluaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, pemerintah menerbitkan kebijakan restrukturisasi pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara/Lembaga.

Menindaklanjuti hal tersebut, BPK RI melakukan restrukturisasi rekening yaitu dengan membuka Rekening Induk pada Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) bernama RKK SETJEN BPK RI (910224937) dan membuka Rekening Satker dalam bentuk rekening virtual pada Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) atas 42 satker di lingkungan BPK.

Sehingga keseluruhan rekening pemerintah di BPK terdiri atas 42 rekening pengeluaran dan 1 rekening penerimaan Satker di lingkungan BPK.

b. Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan KAP

Laporan Keuangan BPK Tahun 2021 telah diaudit oleh KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan dan koreksi atas angka pada laporan keuangan tersebut telah diakomodir dan menjadi saldo Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* serta menjadi saldo awal Laporan Keuangan Tahun 2022.

Atas temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK telah menindaklanjuti rekomendasi KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan kecuali satu temuan yang masih dalam proses penyelesaian yaitu terkait Tanah milik BPK RI yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

31. Statement of Changes in Equity (Continued)

4) Previous Year Budget of Direct Grant Authorization

The balance of Previous Year Budget of Direct Grant Authorization for the periods ending December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp 11,596,357,870 and Rp 0, respectively.

Approval of Previous Year Budget of Direct Grant Authorization is a transaction for recording direct KL grants in the form of cash, goods or services received in previous years but has not submitted a register number and/or ratification of grants, while the recording of Previous Year Budget of Grant income is carried out by BA-BUN.

Approval of Previous Year Budget of Grant for the period ending December 31, 2022 is with the Central BPK work unit, which is an overseas grant from USAID.

- e. Final Equity Value for the period ended December 31, 2022 and December 31, 2021, amounting to Rp8,861,710,957,987 and Rp8,787,037,458,515, respectively.

32. Other Significant Informations

a. Government Account at BPK

In order to modernize budget execution through the management of consolidated virtual account-based spending accounts and optimizing spending account balances, based on Minister of Finance Regulation Number 183/PMK.05/2019 concerning Management of Expenditure Accounts Owned by State Ministries/Institutions, the government issued a policy restructuring the management of expenditure accounts belonging to Ministries/ Institutions State Ministries/ Institutions.

Following up on this, BPK RI restructured the account to open a Master Account at Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) named RKK SETJEN BPK RI (910224937) and opened a Satker Account in the form of a virtual account at Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) through a change in the treasurer's account. spending on 42 satker within the BPK.

So then all of the government accounts at the BPK consist of 42 expenditure accounts and 1 Satker revenue account within the BPK.

b. Follow-up Monitoring of KAP Examination Findings

The 2021 BPK Financial Statements have been audited by KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan and audit adjustments of the financial statements have been accommodated and become the balance of the Audited 2021 Financial Statements and become the initial balance of the 2022 Financial Statements.

Based on the findings of the Internal Control System (SPI) and compliance with laws and regulations, BPK has followed up on KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan recommendations except for one finding that is still in the process of being resolved, namely related to land owned by BPK RI that has not been certified on behalf of the Government of the Republic of Indonesia c.q. The Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

32. Pengungkapan Penting Lainnya (Lanjutan)

c. Hibah Dari Pihak Luar Kepada Badan Pemeriksa Keuangan

1) Hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) pada program Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau PROSPERA.

Pada Tahun 2018, Satker BPK Pusat (003024) melakukan kerjasama dengan Australian National Audit Office (ANAO) yang didanai oleh Pemerintah Australia (AusAID) dalam bentuk Hibah melalui Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) atau Program PROSPERA. Hibah PROSPERA mempunyai Nomor Register 23TSV7CA berdasar Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2017 sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan Nomor S-594/PR.8/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Hibah tahun 2022 ini merupakan bagian dari kerjasama tahun 2018 tersebut dimana pada semester I tahun 2022 dilakukan 2 (dua) pengesahan yaitu:

- a) BAST Nomor 02/BAST/X.4/06/2021 tanggal 5 April 2022 sebesar AUD 191,491.86 atau senilai Rp2.066.505.471,29 (Kurs tengah BI per tanggal 5 April 2022: 1 AUD = Rp10.791,61). Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta dengan nomor MPHLBJS nomor 83977367738170238, tanggal 17 Juni 2022.
- b) BAST Nomor 01/BAST/X.4/06/2021 tanggal 5 April 2022 sebesar AUD 383,321.77 atau senilai Rp4.136.659.046,35 (Kurs tengah BI per tanggal 5 April 2022: 1 AUD = Rp10.791,61). Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta dengan nomor MPHLBJS nomor 84026938738605216, tanggal 21 Juni 2022.

2) Hibah Langsung Bentuk Jasa Tahun Anggaran yang lalu, Hibah Dari The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Government of Australia Pada Program Dana Kemitraan Pemerintah (Government Partnership Fund/GPV) Fase II

Pada tanggal 30 Agustus 2006, Satker BPK Pusat (003024) melakukan kerjasama bilateral dengan Australian National Audit Office (ANAO) yang didanai Pemerintah Australia (AUSA AID) dalam bentuk Hibah *Dev. Of Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity* melalui *Government Partnership Fund (GPV)* yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2018.

Hibah program Dana Kemitraan Pemerintah (*Government Partnership Fund/GPV*) Fase II ini dengan Nomor Referensi Hibah GA30.08.2006 dan Nomor Register 71012601 berdasar Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2010 sesuai dengan Surat dari Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kementerian Keuangan Nomor S-528/PR.8/2018 tanggal 02 Juli 2018.

32. Other Significant Informations (Continued)

c. Grants from Outside Parties to The Audit Board

1) Grant from Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) on Australia Indonesia Partnership for Economic Development Program (AIECO) or PROSPERA.

In a year 2018, the Central BPK Working Unit (003024) collaborated with the Australian National Audit Office (ANAO) which was funded by the Australian Government (AusAID) in the form of grants through the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (AIECO) or the PROSPERA Program. The PROSPERA grant has Register Number 23TSV7CA based on the Subsidiary Arrangement between the Government of Australia and the Government of Indonesia which was signed on 4 December 2017 in accordance with the Letter from the Directorate General of Risk Management and Financing, Ministry of Finance Number S-594/PR.8/2018 dated 30 July 2018.

This 2022 grant is part of the 2018 collaboration where in semester I of 2022 2 (two) ratifications were carried out, namely:

- a) BAST Number 02/BAST/X.4/06/2021 dated 5 April 2022 in the amount of AUD 191,491.86 or a value of Rp2,066,505,471.29 (BI middle rate as of 5 April 2022: 1 AUD = Rp10,791.61). The grant has been ratified at KPPN VII Jakarta with MPHLBJS number 83977367738170238, June 17, 2022.
- b) BAST Number 01/BAST/X.4/06/2021 dated 5 April 2022 in the amount of AUD 383,321.77 or a value of Rp4,136,659,046.35 (BI middle rate as of 5 April 2022: 1 AUD = Rp10,791.61). The grant has been ratified at KPPN VII Jakarta with MPHLBJS number 84026938738605216, June 21, 2022.

2) Direct Grants in the Form of Services Previous Fiscal Year, Grants From The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) - Government of Australia In the Government Partnership Fund (GPV) Phase II Program

On 30 August 2006, Central BPK Working Unit (003024) conducted bilateral cooperation with the Australian National Audit Office (ANAO) which was funded by the Australian Government (AUSA AID) in the form of a Dev Grant. Of the Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity through the Government Partnership Fund (GPV) which ended on 30 June 2018.

This Phase II Government Partnership Fund (GPV) program grant with Grant Reference Number GA30.08.2006 and Register Number 71012601 based on the Subsidiary Arrangement between the Government of Australia and the Government of Indonesia which was signed on 2 December 2010 in accordance with a Letter from the Director General of Management and Financing Ministry of Finance Risk Number S-528/PR.8/2018 dated 02 July 2018.

32. Pengungkapan Penting Lainnya (Lanjutan)

c. Hibah Dari Pihak Luar Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Lanjutan)

Hibah tahun 2022 ini merupakan bagian dari kerjasama Tahun 2018 tersebut yang dilakukan 2 (dua) pengesahan Hibah langsung bentuk jasa Tahun Anggaran yang Lalu, yaitu:

- a) BAST Nomor 77/BAST/X.4/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 sebesar AUD 191,491.86 atau senilai Rp3.201.966.503,68 (Kurs tengah BI per tanggal BAST: 1 AUD = Rp10.025,39). Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta dengan nomor MPHLBJIS nomor 87901974790367196, tanggal 29 Desember 2022.
- b) BAST Nomor 28/BAST/X.4/07/2013 tanggal 23 Februari 2015 sebesar AUD 836,825.72 atau senilai Rp8.394.391.367,55 (Kurs tengah BI per tanggal BAST: 1 AUD = Rp10.031,23). Atas hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta dengan nomor MPHLBJIS nomor 87875434789775303, tanggal 27 Desember 2022.

3) Hibah Langsung Barang Berupa Bangunan Masjid Permanen dan Peralatan Mesin (Karpet/ Sajadah) Dari Pengurus Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 9 September 2022, Satker Sekretariat Jenderal (003019) menerima Hibah dalam bentuk barang berupa Bangunan Masjid Permanen dan peralatan mesin (karpet/sajadah) dari Pengurus Masjid Baitul Hasib BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Hibah dalam bentuk barang berupa Bangunan Masjid Permanen dan peralatan mesin (karpet/sajadah) dengan Nomor Register 26CHCNSA berdasarkan pada Surat Penetapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta Nomor S.6002/WPB.12/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Dalam Perjanjian Hibah Nomor 01/PJJ/MBHSUMBAR/09/2022 & Nomor 1/NH/X-XIII.2/9/2022 disebutkan bahwa Hibah berupa:

- a) Bangunan masjid permanen yang beralamat pada Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Kota Padang seluas 106 m2 senilai Rp564.500.000.
- b) Karpet/sajadah sejumlah 4 (empat) rol senilai Rp40.080.000.

Hibah tersebut telah dilakukan pengesahan dengan BAST Hibah Nomor 01/BAST/MBHSUMBAR/09/2022; 2/BAST/X-XIII.2/9/2022 tanggal 9 September 2022 sebesar Rp604.580.000. Atas BAST hibah tersebut telah dilakukan pengesahan di KPPN VII Jakarta dengan nomor MPHLBJIS nomor 86440765772410784 tanggal 2 November 2022.

32. Other Significant Informations (Continued)

c. Grants from Outside Parties to The Audit Board (Continued)

This 2022 grant is part of the 2018 collaboration which carried out 2 (two) validations of direct grants in the form of services for the previous fiscal year, namely:

- a) BAST Number 77/BAST/X.4/07/2013 dated 25 July 2013 amounting to AUD 191,491.86 or a value of Rp 3,201,966,503.68 (BI middle rate as of BAST date: 1 AUD = Rp 10,025.39). The grant has been ratified at KPPN VII Jakarta with MPHLBJIS number 87901974790367196, December 29, 2022.*
- b) BAST Number 28/BAST/X.4/07/2013 dated 23 February 2015 amounting to AUD 836,825.72 or a value of Rp 8,394,391,367.55 (BI middle rate as of BAST date: 1 AUD = Rp 10,031.23). The grant has been ratified at KPPN VII Jakarta with MPHLBJIS number 87875434789775303, December 27, 2022.*

3) Direct Grants of Goods in the Form of Permanent Mosque Buildings and Machine Tools (Carpets/Prayer Mats) From the Management of The Baitul Hasib Mosque BPK Representative of West Sumatra Province

On September 9, 2022, the Working Unit of the Secretariat General (003019) received a grant in the form of goods in the form of a permanent mosque building and machine tools (carpets/prayer mats) from the Management of the Baitul Hasib Mosque BPK Representative of West Sumatra Province.

Grants in the form of goods in the form of Permanent Mosque Buildings and machine tools (carpets/prayer mats) with Register Number 26CHCNSA based on the Decree of the Regional Office of the Directorate General of Treasury of DKI Jakarta Number S.6002/WPB.12/2022 dated 14 October 2022.

In the Grant Agreement Number 01/PJJ/MBHSUMBAR/09/2022 & Number 1/NH/X-XIII.2/9/2022 it is stated that the Grant is in the form of:

- a) The permanent mosque building which is located at Jl. Khatib Sulaiman No. 54 City of Padang with an area of 106 m2 worth Rp 564,500,000.*
- b) Carpets /prayer mats in the amount of 4 (four) rolls worth Rp 40,080,000.*

The grant has been ratified by BAST Grant Number 01/BAST/MBHSUMBAR/09/2022; 2/BAST/X-XIII.2/9/2022 dated September 9, 2022 in the amount of Rp 604,580,000. The BAST grant has been ratified at KPPN VII Jakarta with MPHLBJIS number 86440765772410784 dated November 2, 2022.

32. Pengungkapan Penting Lainnya (Lanjutan)

- d. Perubahan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan**
 Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini menggunakan Aplikasi SAKTI, terjadi perubahan aplikasi dari periode sebelumnya menggunakan Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan serta Aplikasi e-Rekon. Penggunaan Aplikasi SAKTI untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

- e. Pandemi Virus COVID-19**
 Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan BPK, telah terjadi pandemi virus COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya kegiatan di sektor ekonomi. Secara langsung dan tidak langsung, dampak ini tentunya juga akan mempengaruhi kegiatan operasional BPK pada beberapa bulan mendatang.

Dampak pandemi COVID-19 dari awal tahun 2021 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan bagi BPK sebagai berikut:

- Ada belanja barang dan belanja modal penanganan COVID-19.
- Belanja barang mengalami penurunan diakibatkan karena banyak kegiatan yang tidak terlaksana dan perjalanan dinas dibatasi.

Tindakan yang dilakukan untuk memitigasi resiko atas dampak COVID-19 terhadap kinerja BPK antara lain:

- Membentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan penularan wabah Covid-19.
- Meniadakan, menunda, menghentikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan orang banyak.
- Diberlakukannya jam kerja WFH dan WFO.
- Kegiatan-kegiatan dilakukan secara daring.

33. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 14 April 2023.

32. Other Significant Informations (Continued)

- d. Changes in Application for Preparation of Financial Statements**
The preparation of the 2022 Financial Statements uses the SAKTI Application, there has been a change in the application from the previous period using the SAIBA Application, SIMAK BMN and the Inventory Application as well as the e-Rekon Application. The use of the SAKTI Application for the preparation of the 2022 Financial Statements is based on Minister of Finance Regulation Number 171/PMK.05/2021 concerning Implementation of the SAKTI System.

- e. COVID-19 Virus Pandemic**
As of the issuance date of the BPK financial statements, there has been a COVID-19 virus pandemic which has resulted in a decline in activities in the economic sector. Directly and indirectly, this impact will of course also affect BPK's operational activities in the coming months.

The impact of the COVID-19 pandemic from the beginning of 2021 until the issuance date of the financial statements for BPK are as follows:

- *There are goods and capital expenditures for handling COVID-19.*
- *Goods spending decreased due to many activities that were not carried out and business trips were limited.*

Actions taken to mitigate the risk of the impact of COVID-19 on BPK's performance include:

- *Establish a Task Force for the prevention and handling of the spread of the Covid-19 outbreak.*
- *Eliminate, postpone, stop activities that involve large crowds.*
- *WFH and WFO working hours are enforced.*
- *Activities are carried out online.*

33. Completion of Financial Statements

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on April 14, 2023.